

**PROBLEMATIKA
PENDIDIKAN DI INDONESIA:**

**MENGURAI
PERMASALAHAN
PENDIDIKAN
DI DAERAH**

SERI 1

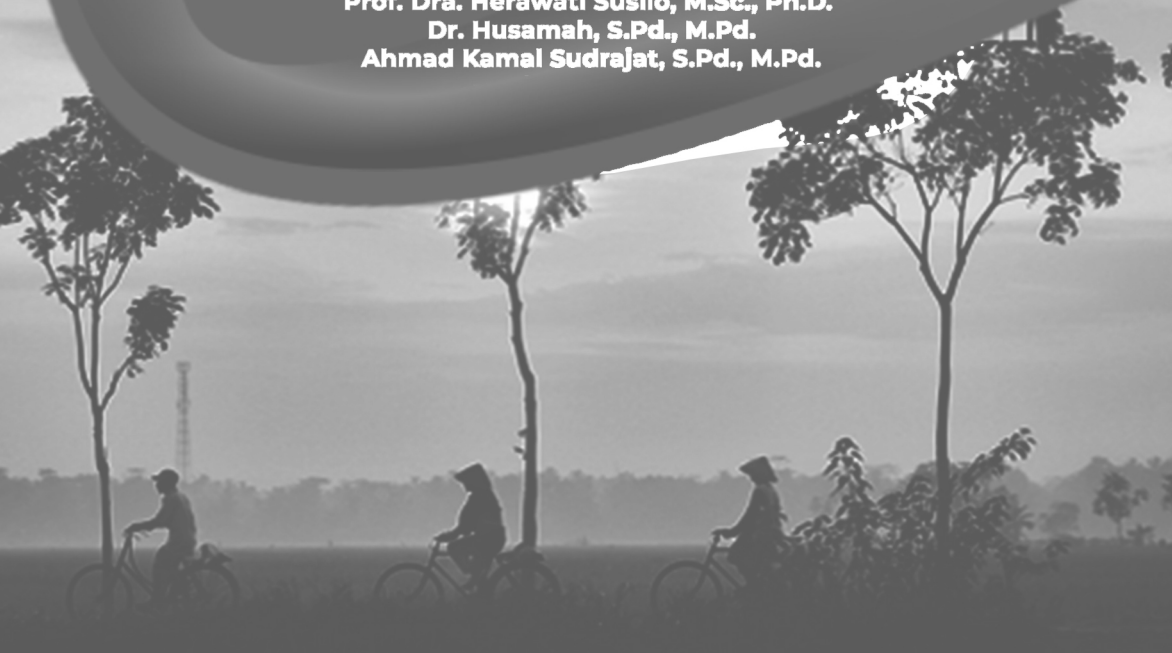
Editor :

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si.

Prof. Dra. Herawati Susilo, M.Sc., Ph.D.

Dr. Husamah, S.Pd., M.Pd.

Ahmad Kamal Sudrajat, S.Pd., M.Pd.



Copyright © 2023

Ukuran : 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-6613-58-0

Hak cipta dilindungi Undang – Undang. Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh dari isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Cetakan 1, Juli 2023

Editor : Prof. Dr. Ibrohim, M.Si.
Prof. Dra. Herawati Susilo, M.Sc., Ph.D.
Dr. Husamah, S.Pd., M.Pd.
Ahmad Kamal Sudrajat, S.Pd., M.Pd.

Cover & layout : Nova Eko

Diterbitkan oleh:



Penerbit Kota Tua

Jalan Sanan No. 27 B, Kelurahan Purwantoro
Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
Telp.: (0341)4352441 SMS/WA: 081333214901

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah was syukurulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat segala rahmatNya, Buku Bunga Rampai “PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA: MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1” ini dapat tersusun seperti yang diharapkan. Penyusunan buku ini dilandasi oleh kecintaan pada dunia pendidikan di Indonesia dengan segala keunikan dan problematikanya, dan pandangan akan pentingnya pendidikan bagi pembangunan manusia Indonesia setiap daerah.

Keberhasilan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, melalui kegiatan ini kami ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang telah memberi dukungan pendanaan melalui Keputusan Rektor UM nomor 4.3.13/UN32/KP/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pemenang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana PNPB UM Tahun 2021, dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 Nomor 5.3.497/UN32.14.1/LT/2021
2. Para mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan Biologi FMIPA UM Angkatan tahun 2020 yang berhasil menyusun artikel dari hasil kajian permasalahan pendidikan di daerah masing-masing, sebanyak 10 mahasiswa.
3. Tim Editor yang telah mencermati dan memberikan masukan untuk penyusunan draf buku Buku Bunga Rampai “PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA: MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1”.
4. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian atau kajian tentang permasalahan pendidikan di daerah, mulai dari para pejabat yang

telah memberikan izin, bantuan informasi dan juga para responden, baik kepala sekolah, guru, siswa maupun masyarakat umum.

Mudah-mudahan keikhlasan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada tim peneliti dan penulis mendapat balasan dari Allah SWT, dengan harapan semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya siswa, para guru dan mahasiswa calon guru dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Malang, Juli 2023

Tim Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	II
Daftar isi.....	V
Pengantar Editor	III
Chapter 1: Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Pendidikan di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur (<i>Ahmad Kamal Sudrajat, M.Pd.</i>).....	1
Chapter 2: Permasalahan Minat dan Sikap Siswa di Daerah Khusus Kalimantan Barat Terhadap Pelajaran IPA (Kalimantan Barat) (<i>Reni Marlina, M.Pd.</i>).....	9
Chapter 3: Kenakalan Remaja di Negeri Syariat Islam (Studi Kasus Kenakalan Remaja di Bukit Pengampunan (Kabupaten Pidie, Nangroe Aceh Darussalam) (<i>Zufahmi, M.Pd.</i>).....	25
Chapter 4: Kompleksnya Permasalahan Pendidikan di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep Jawa Timur (<i>Husamah, M.Pd.</i>)....	34
Chapter 5: Ceramah Dominasi Pembelajaran di Pamekasan Jawa Timur (<i>Chandra Kirana Nasso, M.Pd.</i>).....	44
Chapter 6: Realita Pembelajaran Daring di Daerah Bangkalan Madura pada masa Pandemi Corona (<i>Hefi Rusnita Dewi, M.Pd.</i>)....	60
Chapter 7: Ketahanan Pondok Pesantren Dalam Menghadapi Masa Krisis Pandemi COVID-19 (Pasuruan Jawa Timur) (<i>Muhammad Saefi, M.Pd.</i>).....	68

Chapter 8: Pembelajaran di Tengah Pandemi: Memastikan Pemahaman Siswa Tetap Merata Meskipun Berada di Lokasi Berbeda (Studi Kasus pada Guru Sains di Karesidenan Surakarta Jawa Tengah) (<i>Rahmania Pamungkas, M.Pd.</i>).....	87
Chapter 9: Dampak Banjir Terhadap Kerusakan Infrastruktur Sekolah di Pesisir Danau Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan (<i>Muhammad Nasir, M.Pd.</i>).....	102
Chapter 10: Dikotomi Pandangan Masyarakat Pulau Sapudi Terhadap Pendidikan Umum dan Agama Pesantren (<i>Asy'ari, M.Pd.</i>).....	114
Indeks	130
Glosarium	133

PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah was syukrulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat segala rahmatNya, Buku Bunga Rampai “PROBLEMATIK PENDIDIKAN DI INDONESIA – Seri 1” ini dapat tersusun seperti yang diharapkan. Penyusunan buku ini dilandasi oleh kecintaan pada dunia pendidikan di Indonesia dengan segala keunikan dan problematikanya, dan pandangan akan pentingnya pendidikan bagi pembangunan manusia Indonesia setiap daerah. Topik-topik permasalahan pendidikan seperti ini menjadi tema bahasan dalam perkuliahan Wawasan dan problematika Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan yang mendasar dan harus diperjuangkan oleh setiap bangsa dan negara. Pendidikan Indonesia telah menjalani perjalanan panjang mulai dari zaman penjajahan, pra kemerdekaan, zaman kemerdekaan, orde lama, orde baru, zaman reformasi, dan zaman otonomi daerah. Sejarah panjang pendidikan ini juga menunjukkan upaya dan perjuangan pendidikan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, organisasi dan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, bahwa “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...”. Ini artinya bahwa Pemerintah Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan pendidikan. Lebih jauh dalam tentang pendidikan dijelaskan pada Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen dalam dua bab, yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 28C, menyatakan (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat*

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Pasal 31 yang mengatur prinsip dan pengelolaan pendidikan, yakni:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Dari hasil kajian terhadap pasal dan ayat-ayat tentang pendidikan dalam UUD 1945, sebagai dasar negara, diketahui bahwa pendidikan adalah bidang yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian dan dukungan yang sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar dalam pembangunan dunia pendidikan Indonesia.

Selain diatur di dalam UUD 1945, dalam pengaturan Sistem dan Pembangunan Pendidikan Indonesia juga telah diterbitkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, mulai UU nomor 4 tahun 1950, UU nomor 2 tahun 1989 dan UU nomor 20 tahun 2003. Bahkan sejak tahun 2005 lahir UU nomor 14 tentang Guru dan Dosen, serta UU

nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang Undang tersebut menjadi acuan yang lebih lengkap dan mendasar tentang pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia. Lebih jauh untuk operasionalisasi berbagai bagian sistem terkait aspek pembangunan pendidikan pemerintah juga menerbitkan berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, seperti terkait Standar Nasional Pendidikan (SNP; Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005, diperbaiki dengan PP nomor 13 tahun 2015, dan PP nomor 57 tahun 2021 dan perubahannya dengan PP nomor 4 tahun 2022) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI; Perpres nomor 8 tahun 2012). Sementara penerapan KKNI untuk pendidikan tinggi diperkuat dengan Permendikbud nomor 73 tahun 2013, dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan diperbaiki dengan permendikbud nomor 3 tahun 2020.

Pengaturan dan upaya pembangunan pendidikan oleh Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya diamanahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atau sekarang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam hal ini Menteri Pendidikan bertanggung jawab terhadap semua proses pengelolaan pembangunan pendidikan secara lebih operasional. Dalam rangka pengembangan sistem pendidikan nasional untuk mencapai tujuannya Kemendikbud Ristek mengatur dan menerbitkan berbagai aturan dan panduan untuk setiap aspek pendidikan. Sudah barang tentu pengembangan sistem pendidikan dan pengaturan Kemendikbud diatur dalam bentuk peraturan menteri pendidikan dan turunannya. Sebagai contoh untuk penerapan KKNI untuk pendidikan tinggi diperkuat dengan Permendikbud nomor 73 tahun 2013, dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan diperbaiki dengan permendikbud nomor 3 tahun 2020.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan dalam pengelolaan pendidikan. Namun demikian, harus diakui bahwa karena besarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk dengan variasi suku/etnis, bahasa, budaya dan agama, serta jumlah penduduk usia sekolah, maka sepertinya pembangunan pendidikan tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Tidak jarang para pengamat atau masyarakat menyatakan kurang berhasil karena dibanding dengan negara lain yang kecil, seperti Singapura, Hongkong, Malaysia, dan lain-lain. Bahkan hasil perbincangan penulis dengan sejawat dari Mongolia, pada forum *Dialogue Lesson Study Asia* tahun 2010 di Hiroshima, ditemukan bahwa jumlah guru di Indonesia saat itu, yang mencapai 3,4 juta lebih besar dari pada penduduk negara Mongolia yang hanya 2,6 juta jiwa. Oleh karena mari kita pandang luas dan besarnya permasalahan pendidikan di Indonesia sebagai tantangan dan sekaligus kesempatan untuk menyumbangkan gagasan pemikiran dan tindakan untuk ikut berkontribusi dalam pendidikan Indonesia.

Buku bunga rampai sebagai hasil *mini project* mata kuliah wawasan dan problematik pendidikan di Program Studi S3 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh aspek sosial budaya masyarakat dan potensi daerah. Setiap judul artikel akan menyajikan fakta atau fenomena pendidikan dan permasalahannya di suatu daerah sebagai hasil kajian lapangan dan gagasan pemikiran untuk alternatif solusinya.

Penyajian masalah pendidikan dan gagasan solusinya akan dimulai dari fenomena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di Tulungagung Jawa Timur, rendahnya minat siswa terhadap pelajaran IPA di Kalimantan Barat, kenakalan remaja di bumi serambi mekah Aceh, sampai pada fenomena Kompleksitas Permasalahan Pendidikan di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep. Selain itu juga dibahas masalah kondisi pendidikan pada

masa pandem Covid 19, diawali dengan fenomena dominasi ceramah di Pamekasan Madura, pembelajaran daring selama masa pandemi Covid 19 Bangkalan dan ketahanan pembelajaran daring di Pondok Pesantren Pasuruan, strategi memastikan pemahaman siswa tetap merata meskipun dalam kondisi pandemi di Karesidenan Surakarta Jawa Tengah, serta persoalan kurangnya pelayanan pendidikan akibat banjir tahunan Danau Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Bahasan akan ditutup dengan masalah dikotomi pandangan masyarakat pulau Sapudi terhadap pendidikan umum dan agama pesantren. Bahasan yang sangat luas ini menggambarkan banyaknya permasalahan pendidikan di wilayah Indonesia yang memberikan tantangan serta peluang untuk berkontribusi.

Akhirnya, kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi “sedikit” sumbangan kajian terhadap permasalahan pendidikan yang (walaupun sangat luas) dapat menjadi inspirasi dalam kajian problematika pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan pengayaan wawasan pendidikan. Tentu, di balik keterbatasan dan kekuranglengkapan buku ini, diharapkan dapat menjadi pemantik untuk melahirkan kepedulian terhadap upaya mengurai sedikit demi sedikit problematika pendidikan di Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi pemacu dan pemicu lahirnya buku-buku lain dalam tema yang sama, sehingga bersama-sama dapat memberikan kontribusi luas bagi kemajuan pendidikan di negeri tercinta ini. Oleh karena itu, kami tentu wajib berterima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan kajian berharga mereka dalam buku ini. Tak lupa pula kami berterima kasih kepada Universitas Negeri Malang, yang telah mendanai penerbitan buku ini lewat Hibah Bahan Ajar, Sumber Dana: PNBP UM tahun 2021.

Malang, 1 Februari 2023

Tim Editor

CHAPTER 1

Kesadaran Masyarakat mengenai Pentingnya Pendidikan di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur

Oleh: Ahmad Kamal Sudrajat, M.Pd.

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai Indikator Kesuksesan Gerakan *Education For All*

Kemajuan yang luar biasa telah dicapai dalam menyediakan pendidikan untuk semua sejak tahun 2000 [1]. Berdasarkan survey Global, delapan puluh empat juta lebih sedikit anak-anak dan remaja yang putus sekolah pada tahun 2015 dibandingkan tahun 1999. Tiga puluh empat juta lebih banyak anak bersekolah daripada yang seharusnya, jika tren pada tahun 1990-an tetap ada. Sebagian besar (62%) adalah perempuan, yang menunjukkan bahwa paritas gender terus meningkat. Peningkatan partisipasi ini dapat dikaitkan dengan upaya pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dihasilkan oleh gerakan *Education for All* (EFA). Kemajuan yang telah dicapai merupakan sumber optimisme yang sangat besar karena kami menetapkan visi baru untuk 15 tahun ke depan [2].

Bukti dari laporan *Global Monitoring Report* (GMR) 2015 mencatat pencapaian dan tantangan masing-masing dari enam tujuan EFA [2]. Tujuan 1 meminta pemerintah untuk memperluas perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama untuk anak-anak yang paling rentan. Pada akhir siklus EFA, hampir dua pertiga lebih banyak anak terdaftar di pendidikan anak usia dini dibandingkan tahun 1999. Empat puluh tujuh persen negara mencapai tujuan dan 8% lainnya mendekati, tetapi 20% negara sangat jauh dari mencapai tujuan.

Tujuan 2 menantang negara untuk mencapai pendidikan dasar universal, terutama untuk anak perempuan, etnis minoritas, dan anak-anak yang terpinggirkan. Secara global, sekitar 90% anak terdaftar di sekolah dasar. Lima puluh dua persen negara mencapai tujuan ini; 10% mendekati, dan 38% sisanya jauh atau sangat jauh dari mencapainya. Hal ini menyebabkan hampir 100 juta anak tidak menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2015; Kurangnya fokus pada kelompok yang terpinggirkan telah menyebabkan lima kali lebih kecil kemungkinan kelompok termiskin untuk menyelesaikan satu siklus penuh pendidikan dasar. Lebih lanjut, proporsi anak putus sekolah di negara dan zona yang terkena dampak konflik tinggi (36%) dan telah meningkat sejak tahun 2000. Ada keberhasilan penting: Sekitar 50 juta lebih banyak anak yang bersekolah sekarang dibandingkan pada tahun 1999 [2].

Di Indonesia, prinsip *Education for All* (EFA) telah ada sejak tahun 1989. Dimana pada saat itu dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Disebutkan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kewajiban belajar 9 tahun, dan segala sesuatunya akan dijamin oleh pemerintah [3]. Kebijakan ini diperbarui lagi untuk mengikuti perkembangan zaman melalui Undang-Undang tentang wajib belajar yang dikeluarkan pada tahun 2008. Undang-undang ini menyatakan bahwa wajib belajar di Indonesia ditambah menjadi 12 tahun [4]. Namun, yang terjadi di lapangan dan banyak ditemukan fenomena tidak semua anak dapat melaksanakan wajib belajar 12 tahun tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membuat data statistik berupa APK dan APM untuk mengukur partisipasi anak dalam menempuh pendidikannya.

Perbedaan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Muthlak (APM) terletak pada perbandingan yang digunakan. Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu dalam menentukan penduduk usia sekolah dilakukan dengan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan

tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu, tanpa melihat ketepatan usia dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu dalam menentukan penduduk usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai pada jenjang tersebut dan dinyatakan dalam persentase [5]. Dari angka tersebut dapat diketahui berapa persentase anak usia sekolah yang sedang sekolah dan yang tidak sedang sekolah. Pertanyaan utama yang akan dibahas dalam makalah ini, bagaimana terdapat kesenjangan antara APK dan APM di Pendidikan Menengah kabupaten Tulungagung?

B. Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber yaitu Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dan anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Partisipan anak usia sekolah yang tidak bersekolah dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang mewakili kecamatan di eks kawedanan Ngunut (Kecamatan Ngunut, Rejotangan, Sumbergempol, Kalidawir dan Pucanglaban). Penelitian dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 4-6 Januari 2021. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur kepada partisipan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan telepon. Pedoman wawancara tentang alasan tidak melanjutkan studi mengacu pada [6]–[8]. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis konten [9] dengan bantuan Nvivo. Setelah dianalisis, jawaban dikonfirmasi kembali dengan menggunakan triangulasi [10].

C. Temuan

Hasil wawancara yang diperoleh dikelompokkan menjadi 4 bagian utama yaitu faktor kebijakan, sosial, ekonomi, dan kesadaran diri. Pengelompokan ini dilakukan untuk mempermudah analisis yang dilakukan. Keempat faktor tersebut merupakan faktor utama

yang mempengaruhi alasan anak usia sekolah tidak melanjutkan sekolah. Data hasil temuan ini ditunjukkan pada Tabel 1.

No	Faktor	Uraian
1	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> ● Wajib belajar yang diterapkan pemerintah 9 tahun ● Tidak meratanya beasiswa pendidikan
2	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ● Kebanyakan siswa memilih untuk bekerja ● Lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk sekolah, terutama di pedesaan
3	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ● Mahalnya biaya pendidikan ● Banyak yang berasal dari keluarga kurang mampu
4	Kesadaran Diri	<ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat beberapa siswa yang memilih bekerja karena malas berpikir

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya ketimpangan persentase APK dan APM di Kabupaten Tulungagung. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan konfirmasi data ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dan wawancara ke anak usia sekolah yang tidak sekolah tentang alasan mereka tidak menempuh pendidikan lanjut. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan anak tidak lanjut sekolah yang dikelompokkan

menjadi 4 bagian utama yaitu kebijakan, sosial, ekonomi, dan kesadaran diri.

Pentingnya pendidikan bagi perkembangan anak

Pendidikan memiliki peranan penting bagi perkembangan kognitif anak [11]. Melalui pendidikan anak dapat dilatih untuk mengembangkan keterampilan dan kapabilitas mereka [12] agar dapat bersaing di Abad 21 yang sangat ketat ini [13]. Selama pembelajaran anak-anak berinteraksi dengan orang lain. Ukuran dan intensitas anak berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain membuat mereka berkembang secara psikis maupun fisik [14].

Pendidikan memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya [15]. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa melalui pendidikan yang tepat, keterampilan anak akan meningkat sehingga mereka dapat bersosialisasi, berbaaur dan berkolaborasi dengan orang lain. Penggunaan model, metode dan teknik pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan performa belajar siswa [16]. Keterampilan yang diperoleh anak selama pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka atau untuk meningkatkan performa belajar mereka [17].

Faktor yang mempengaruhi kesadaran pendidikan anak

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran anak dalam menempuh pendidikan, salah satunya adalah gender [18]. Pertama adalah terdapat perbedaan perkembangan otak anak laki-laki dan perempuan dari teknologi pemindaian otak, untuk pola yang muncul membantu (a) untuk memahami bukti eksperimental yang terakumulasi dan agak kontradiktif. tentang kemampuan mental anak; (b) untuk menghilangkan pernyataan sederhana tentang defisit biologis; sementara (c) menyarankan bahwa perbedaan dalam

pemahaman ilmiah antara anak laki-laki dan perempuan mungkin memang diantisipasi [18].

Faktor yang lainnya adalah faktor keluarga. Keluarga adalah tempat utama untuk sosialisasi anak dan karenanya memainkan peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan pendidikan anak [15]. Dalam sebuah studi kasus yang dilakukan oleh [15], Para orang tua muda yang bekerja jauh dari rumah memiliki lebih banyak harapan di kota tempat mereka berakar, tetapi tekanan hidup dan ketidakpastian yang mereka hadapi di kota juga memudahkan mereka untuk memutuskan meninggalkan anak-anak mereka di desa. Ini juga berarti bahwa anak-anak akan tertinggal di usia yang lebih muda dan siklus yang tertinggal akan diperpanjang. Sebagai tanggapan, keluarga pedesaan hanya dapat membesarkan anak-anak yang ditinggalkan selama periode perwalian yang lebih lama oleh generasi yang lebih tua; dalam proses ini, pengasuhan biologis anak-anak yang ditinggalkan tercapai, tetapi pengasuhan sosial melemah. Hal ini menyebabkan motivasi anak untuk melanjutkan pendidikan juga melemah [19].

Selain itu, kondisi ekonomi juga akan mempengaruhi kesadaran pendidikan anak [20]. Dalam penelitiannya, [20] menyatakan bahwa keluarga dengan pendapatan di bawah 1000 yen perbulan akan kesulitan memenuhi biaya pendidikan anaknya. Hal ini yang menyebabkan anak merasa terbebani sehingga memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Kondisi ekonomi secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi psikologi anak untuk melanjutkan pendidikannya [7].

E. Simpulan

Partisipasi murni anak yang rendah dalam pendidikan disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Terdapat peran orang tua dan masyarakat untuk membentuk kesadaran pendidikan bagi anak. Lingkungan pergaulan anak juga patut untuk diberikan pengawasan lebih karena anak lebih nyaman untuk membuat kontak sosial dengan

teman seusianya. Bagaimanapun, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dengan beberapa program seperti Kartu Indonesia Pintar, bebas SPP, dll.

Referensi

- [1] R. Sack, "Education for all," *Forum Dev. Stud.*, vol. 30, no. 1, pp. 120–127, 2003, doi: 10.1080/08039410.2003.9666235.
- [2] UNESCO, "EFA Global Monitoring Report," Paris, 2015.
- [3] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Undang-undang republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989*. 1989.
- [4] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008*. 2008.
- [5] Istiqomah Anny, Sukidin, and S. Pudjo, "Analisis Partisipasi Pendidikan pada Masyarakat Miskin Dusun Gumuk Limo Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember," *J. Pendidik. Ekon.*, vol. 12, pp. 227–235, 2018, doi: 10.19184/jpe.v12i2.8553.
- [6] M. Brown, P. Brown, and T. Bibby, "'I would rather die': Reasons given by 16- year-olds for not continuing their study of mathematics," *Res. Math. Educ.*, vol. 10, no. 1, pp. 3–18, 2008, doi: 10.1080/14794800801915814.
- [7] R. Osborn, "Point of view: Another reason to oppose mandatory continuing education," *J. Contin. High. Educ.*, vol. 37, no. 2, pp. 28–30, 1989, doi: 10.1080/07377366.1989.10401173.
- [8] M. Gianino, B. J. Ruth, and S. Miyake Geron, "Social Work Continuing Education: A Statewide Case Study," *J. Teach. Soc. Work*, vol. 36, no. 4, pp. 342–362, 2016, doi: 10.1080/08841233.2016.1206053.
- [9] J. W. Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, 4th ed. New York: Pearson, 2012.
- [10] W. J. Tibben, "Theory Building for ICT4D: Systemizing Case Study Research Using Theory Triangulation," *Inf. Technol. Dev.*, vol. 21, no. 4, pp. 628–652, 2015, doi: 10.1080/02681102.2014.910635.

- [11] S. Kuldias, H. N. Ismail, S. Hashim, and Z. A. Bakar, “Unconscious learning processes: Mental integration of verbal and pictorial instructional materials,” *Springerplus*, vol. 2, no. 1, pp. 1–14, 2013, doi: 10.1186/2193-1801-2-105.
- [12] B. McCoy, “Active and Reflective Learning to Engage All Students,” *Univers. J. Educ. Res.*, vol. 1, no. 3, pp. 146–153, 2013, doi: 10.13189/ujer.2013.010302.
- [13] H. Susilo, N. Kristiani, and A. K. Sudrajat, “Development of 21st century skills at the senior high school: Teachers’ perspective,” *AIP Conf. Proc.*, vol. 2215, no. 1, p. 30018, Apr. 2020, doi: 10.1063/5.0000559.
- [14] M. M. Davies, “Outdoors: An important context for young children’s development,” *Early Child Dev. Care*, vol. 115, no. 1, pp. 37–49, 1996, doi: 10.1080/0300443961150104.
- [15] L. Pan and J. Ye, “‘Children of Great Development’: Difficulties in the Education and Development of Rural Left-Behind Children,” *Chinese Educ. Soc.*, vol. 50, no. 4, pp. 336–349, 2017, doi: 10.1080/10611932.2017.1382137.
- [16] N. Sasikumar, “Impact of active learning strategies to enhance student performance,” *Innovare J. Educ.*, vol. 2, no. 1, pp. 2–4, 2014.
- [17] R. A. Styron, “Critical Thinking and Collaboration: A Strategy to Enhance
- [18] Student Learning,” *Syst. Cybern. Informatics*, vol. 12, no. 7, pp. 25–30, 2014.
- [19] T. G. K. Bryce and E. J. Blown, “Gender effects in children’s development and education,” *Int. J. Sci. Educ.*, vol. 29, no. 13, pp. 1655–1678, 2007, doi: 10.1080/09500690701278420.
- [20] L. M. Leitner, “Continuing education in humanistic psychology: A report and survey,” *Humanist. Psychol.*, vol. 25, no. 3, pp. 319–322, 1997, doi: 10.1080/08873267.1997.9986889.

CHAPTER 2

Permasalahan Minat dan Sikap Siswa di Daerah Khusus Kalimantan Barat Terhadap Pelajaran IPA (Kalimantan Barat)

Oleh: Reni Marlina, M.Pd.

A. Pendahuluan: Gambaran Pembelajaran IPA di Daerah Khusus Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) memiliki luas wilayah 146.807 km² dengan jumlah penduduk sekitar 4.546.000 jiwa. Secara demografi, kepadatan penduduk rata-rata adalah 30 jiwa/km². Secara geografis Kalimantan Barat memiliki beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain (daerah terdepan) dan memiliki pulau-pulau yang terletak di wilayah terluar. Faktor geografis wilayah yang dipisahkan oleh jalur transportasi sungai yang sulit dijangkau (daerah terpencil) menyebabkan sebagian sekolah di daerah Kalimantan Barat merupakan daerah khusus yang termasuk 3 T (tertinggal/terpencil, terdepan dan terluar). Penyebaran guru yang tidak merata menyebabkan di daerah khusus ditemui adanya sekolah dengan jumlah guru yang tidak mencukupi. Salah satunya guru di SMP Negeri 3 Satap Toba Kabupaten Sanggau yang harus mengajar beberapa mata pelajaran. Hasil penelitian sebelumnya di SD menemukan terdapat sekolah yang harus melaksanakan Pembelajaran Kelas Rangkap karena keterbatasan jumlah guru dan kelas (Maasawet, 2015).

Kompetensi lulusan suatu lembaga pendidikan menekankan pada tuntutan penerapan kurikulum yang mencakup tiga ranah yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif (Depdiknas, 2008). Selain mampu merancang pembelajaran, guru juga harus mampu mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar (Melton,

J., Miller, M., Brobst, 2019). Kajian yang dilakukan oleh Backman, E., G. Nyberg, (2020) dan Erik, B. & Dean, (2020) tentang kompetensi pedagogik guru menyimpulkan bahwa penerapan pedagogi guru di kelas masih perlu ditingkatkan terutama di daerah khusus. Hal ini berkaitan dengan aspek pemerataan dan perluasan pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, kompetensi guru mempengaruhi minat dan sikap siswa dalam belajar (Mohamed, R., Lebar, 2017).

Beberapa temuan melaporkan bahwa siswa cenderung menyukai dan berminat pada salah satu mata pelajaran dikarenakan cara gurunya mengajar (Firdaus & Mukhibat, 2022; Nurhasanah, 2016; Pratama, Y.M.P., Iswari, R.S., dan Ngabekti, 2018). Namun guru cenderung mengabaikan karakteristik siswa dalam menyampaikan konsep karena terlalu banyak materi yang harus disampaikan (Wahyuni, 2015; Nurhasanah, 2016). Metode dan pendekatan guru dalam mengajar terkesan monoton dan terkadang berlangsung satu arah (Knowles, E. Kerkman, 2007; Zee & de Bree, 2017). Hal ini menjadi salah satu dasar bagi peneliti untuk mengukur minat dan sikap siswa yang dibatasi pada daerah khusus. Cara mengajar guru IPA di daerah khusus menjadi salah satu dasar pengukuran minat dan sikap siswa terhadap pembelajaran IPA.

Hasil pra riset sebelumnya (22 Juni 2020) di salah satu sekolah menengah di Kabupaten Kayong Utara memperlihatkan bahwa 10 dari 18 siswa cenderung menghindari untuk masuk ke jurusan IPA. Diperkuat dengan pra riset kedua yang dilakukan di sekolah menengah di kecamatan yang berbeda namun masih dalam status sekolah tertinggal (28 Juni 2020) diperoleh data dari 36 siswa hanya 9 siswa yang bersedia untuk masuk ke jurusan IPA. Hal ini mengindikasikan siswa di Kabupaten Kayong Utara masih kurang berminat dalam belajar IPA. Beberapa penelitian melaporkan bahwa persentase minat dan sikap siswa terhadap jurusan IPA lebih rendah jika dibandingkan dengan minat dan sikap terhadap jurusan sosial

(Holstermann, N., Grube, D., and Bogeholz, 2010; Emaliana, 2007; Hooshyar, D., Malva, L., Yang, Y., Pedaste, M., dan Wang, 2020; Kintu, M.G., Zhu, C., dan Kagambe, 2017). Hal ini membutuhkan analisis lebih lanjut tentang minat dan juga sikap siswa terhadap pembelajaran IPA di daerah khusus Kalimantan Barat.

B. Permasalahan Minat dan Sikap Siswa Terhadap Pelajaran IPA

Permasalahan tentang minat dan sikap siswa terhadap pelajaran IPA dipaparkan oleh guru wali kelas XI. Dinyatakan bahwa sangat sulit menentukan siswa yang memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran IPA walaupun siswa tersebut tergolong pintar. Pada pedoman pengelompokan minat siswa di sekolah menengah, setiap siswa yang telah mencukupi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) berhak mengajukan diri untuk masuk di jurusan IPA (Sinambela, 2017). Disebabkan kurangnya minat siswa untuk memilih jurusan IPA, guru yang menunjuk siswa secara langsung untuk masuk ke jurusan IPA. Akibatnya siswa di jurusan IPA tidak berdasarkan pada minat siswa. Rendahnya minat siswa terhadap IPA memerlukan analisis komprehensif dengan cara memahami bagaimana siswa memaknai mata pelajaran IPA di sekolah (Hanif, 2020). Faktor penting yang paling mempengaruhi siswa dalam membentuk minat dan sikapnya adalah guru. Berhasil tidaknya suatu sistem pendidikan yang diaplikasikan di suatu bidang pendidikan tergantung pada bagaimana sistem tersebut diterapkan oleh guru di dalam kelas dan bagaimana kualifikasi dari guru tersebut. Pelajaran IPA dapat menjadi salah satu pelajaran yang membosankan bagi siswa jika kurang mampu diimplementasikan dengan baik dan benar. Pembelajaran IPA akan lebih baik jika didukung dengan praktek dan pengamatan langsung (Bergman & Vargha, 2013), sehingga seorang guru IPA seharusnya memiliki kompetensi pedagogik dan profesional dalam mengajarkan IPA. Kurang terampilnya guru IPA dalam mengajar

akan menyebabkan kurangnya perhatian, minat, dan sikap siswa dalam pembelajaran IPA (Fixsen et al., 2016).

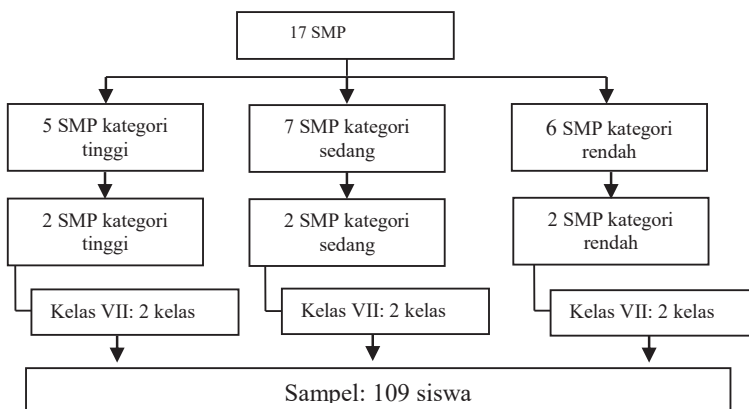
Cara siswa mengikuti pelajaran IPA dipengaruhi oleh minatnya terhadap IPA. Pelibatan siswa dalam belajar juga meningkatkan minat dan sikap siswa dalam pelajaran IPA. Kondisi yang menyenangkan di kelas akan menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar secara aktif bersama-sama dengan siswa lainnya maupun belajar secara mandiri. Siswa akan mengikuti pelajaran dengan giat apabila pelajaran IPA dianggap menyenangkan. Pembelajaran yang berlangsung secara efektif dan menyenangkan akan memunculkan minat siswa dalam belajar IPA. Pembelajaran IPA di sekolah menengah saat ini masih kurang mencapai hasil yang diharapkan (Westine et al., 2020). Rendahnya minat dan sikap siswa terhadap pembelajaran IPA dapat diidentifikasi dari ketekunan siswa dalam belajar. Siswa akan tekun belajar atau tidak sangat tergantung pada sikap dan minat yang ada pada dirinya. Sikap dan minat sebagai faktor psikologis berfungsi sebagai kekuatan yang akan menggerakkan dan mendorong siswa untuk belajar (Taylor et al., 2017).

Faktor yang berkontribusi dalam membentuk minat dan sikap siswa pada pelajaran IPA ialah kompetensi guru IPA. Daerah khusus yang mengalami kekurangan guru, tidak jarang guru IPA juga mengajar mata pelajaran lain seperti prakarya, Bahasa Indonesia, atau PJOK. Setiap guru IPA kadang harus mengajar tidak sesuai dengan latar belakang ilmu yang dimilikinya. Jika terdapat guru yang harus mengajar mata pelajaran yang tidak berhubungan dengan kompetensi pedagogik dan profesionalnya, hal ini menyebabkan tampilannya dalam mengajar kurang optimal (Koedel et al., 2019). Tampilan mengajar setiap guru akan meningkatkan minat siswa sehingga akan menyukai konsep pelajaran yang disampaikan (Polikoff et al., 2018). Setiap siswa akan cenderung berminat dan memilih mata pelajaran yang diyakininya mampu untuk dipelajari (Hock & Mellard, 2011). Penelitian Yusuf &

Ruslan (2014) menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada pelajaran IPA di ranah kognitif termasuk dalam kategori “tinggi”. Namun, tidak ditemukan laporan sehubungan dengan sikap dan minat siswa terhadap pelajaran IPA khususnya di daerah khusus. Hal inilah yang mendasari dilakukannya penelitian ini.

C. Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 SMP yang berada di daerah khusus Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. Populasi terdiri dari seluruh siswa kelas VII dan seluruh guru IPA yang mengajar di kelas VII. Terdapat 12 sekolah dan diambil enam sekolah menengah dengan seleksi bertingkat. Sekolah dikelompokkan menjadi tinggi, sedang dan rendah dan dari masing-masing kelompok dipilih dua sekolah. Diperoleh enam kelas dari kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Jumlah sampel seluruhnya 109 siswa. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner minat dan sikap siswa.



Gambar 1. Proses pemilihan sampel siswa dan guru yang terlibat dalam penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperoleh meliputi data minat dan sikap siswa kelas VII terhadap konsep IPA.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pelajaran IPA yang Diminati Siswa di Daerah Khusus

Dalam kurikulum yang masih diterapkan di sekolah-sekolah daerah khusus, terdapat 37 konsep IPA yang dipelajari siswa di tingkat sekolah menengah. Dari 37 konsep, terdapat 21 konsep (57%) yang sangat diminati untuk dipelajari (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsep IPA sangat disukai oleh siswa di Kabupaten Kayong Utara. Dari 21 konsep yang diminati siswa, hampir seluruhnya (18 konsep atau 85,7%) merupakan konsep konkrit, artinya dapat dipahami dan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1. Konsep yang Diminati Siswa

No	Σ Skor (%)	Konsep
1	48.1	Pergerakan Benda dan Organisme Hidup di Lingkungan Sekitarnya
2	44.2	Pengerahan Tenaga dan Pesawat Sederhana dalam Kehidupan Sehari-hari
3	41.5	Struktur dan Fungsi Tumbuhan
4	36.7	Sistem Pencernaan Manusia
5	41.5	Zat Aditif dan Adiktif
6	43.2	Sistem Peredaran Darah Manusia
7	41.5	Tekanan Zat dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari
8	45.9	Sistem Pernapasan Manusia
9	44.9	Sistem Ekskresi Manusia
10	46.6	Getaran, Ombak, dan Bunyi dalam Kehidupan Sehari-hari
11	41.8	Peralatan Cahaya dan Optik
12	40.1	Objek IPA dan Pengamatannya
13	44.7	Klasifikasi Organisme Hidup
14	43.9	Klasifikasi Konsep dan Perubahannya
15	36.7	Suhu dan Perubahannya
16	37.7	Panas dan Perpindahannya
17	43.3	Energi dalam Sistem Kehidupan
18	48.1	Sistem Organisasi Kehidupan
19	49.3	Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya
20	48.1	Pencemaran lingkungan
21	44.2	Pemanasan global

Pelajaran yang paling diminati siswa di daerah khusus adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Materi ini diminati karena berhubungan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Materi yang kurang diminati ialah sistem pencernaan makanan. Materi ini kurang diminati disebabkan materi ini adalah materi yang tergolong abstrak dan sulit bagi siswa untuk memahami mekanisme pencernaan di dalam organ tubuh. Kondisi sekolah di daerah khusus yang memiliki keterbatasan media pembelajaran, cenderung sulit untuk mengkonkritkan materi yang abstrak. Berdasarkan hasil analisis penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan skor rata-rata minat siswa terhadap pelajaran IPA pada setiap kategori berada pada kategori sedang. Hasil analisis data minat siswa terhadap pelajaran IPA menunjukkan bahwa sebagian siswa yaitu 42,1% mengaku kurang tertarik dengan sebagian besar pelajaran IPA yang diajarkan oleh guru di daerah khusus. Berdasarkan hasil analisis angket, siswa di daerah khusus melaporkan bahwa materi sangat sulit dipahami (77%), belajar hanya di dalam ruangan (47%) dan pelajaran IPA cenderung sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (76%). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Nugroho (2012) bahwa minat dapat ditimbulkan oleh permasalahan kebutuhan siswa di daerah khusus. Artinya jika minat yang muncul sesuai dengan kebutuhan, maka dapat menjadi faktor pemicu untuk belajar. Oleh karena itu guru di daerah khusus hendaknya memberikan motivasi belajar dengan memanfaatkan kebutuhan siswa untuk membangun minat belajarnya. Minat siswa dalam pelajaran IPA dapat dilihat dari ungkapan positif tentang pelajaran tersebut dan sikap memperhatikan pelajaran.

2. Minat Siswa Terhadap Pelajaran IPA

Minat belajar siswa merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mempengaruhi partisipasi aktif dalam mengikuti proses dan memperoleh hasil belajar. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian

bahwa hanya 52,7% siswa yang sangat menyukai pelajaran IPA dan hanya 51,7% menganggap pelajaran IPA menyenangkan untuk diikuti dan mudah dipelajari. Hanya terdapat 41,1% menyatakan bahwa guru IPA yang mengajar di daerah khusus memiliki cara yang menarik untuk menyajikan konsep IPA. Hasil penelitian Hasan et al., (2021) menemukan hal yang sama, bahwa sebagian besar siswa sekolah menengah (71%) memiliki sikap positif terhadap guru IPA karena mampu mempresentasikan konsep dengan baik. Asumsi bahwa minat siswa terhadap suatu mata pelajaran karena penyajian guru yang menarik adalah benar berdasarkan hasil penelitian ini.

Data lain menunjukkan bahwa sebagian siswa yaitu 46,9% tidak terlalu berminat mengikuti pelajaran IPA. Mereka mengatakan tidak ingin lebih sering mengikuti pelajaran IPA. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keadaan ini adalah faktor kebosanan. Ruhland (2001) menyatakan bahwa kebosanan merupakan faktor internal yang dapat menurunkan minat, karena melakukan kegiatan yang monoton secara terus menerus. Selain itu, sebagian siswa (44,4%) tidak menyukai guru IPA karena cara penyampaian konsep yang sulit dipahami. Menurut Ruhland (2001), faktor eksternal yang mempengaruhi minat siswa dapat berasal dari tujuan pembelajaran yang kurang dimengerti, guru yang mengajar, bahan ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, suasana kelas, dan lingkungan belajar.

Beberapa konsep IPA yang kurang diminati siswa berkaitan dengan pengetahuan konseptual guru pada konsep-konsep tersebut. Secara umum, sangat sulit untuk mengajarkan konsep IPA dengan media dan sarana dan prasarana yang terbatas di daerah khusus. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa ada siswa yang menyatakan bahwa beberapa konsep IPA yang kurang disukai dipahami oleh guru dengan kategori “kurang mengetahui konsep IPA” dan “memiliki sedikit pengetahuan konsep IPA”, tetapi ada juga konsep yang sebagian besar dipahami oleh guru tetapi tidak diminati oleh siswa,

antara lain suhu dan perubahan serta enzim pencernaan. Berdasarkan wawancara (Februari 2020) dengan 18 siswa SMP Satap Kayong Utara terungkap bahwa konsep-konsep tersebut merupakan konsep yang abstrak. Sebagian besar guru di daerah khusus (66,7%) mengetahui konsep IPA. Salah satu aspek yang berkontribusi terhadap tingkat penguasaan dan pemahaman guru terhadap konsep IPA adalah kesesuaian latar belakang pendidikan. Hal ini juga didukung oleh Saracagöglü, A.S Yenice (2019) bahwa salah satu variabel yang menentukan meningkatnya minat siswa adalah penguasaan konsep guru dalam mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Kesulitan yang dialami guru di daerah khusus (Gurdasus) antara lain membangun kesadaran siswa akan pentingnya belajar dan juga kemauan untuk memahami materi IPA. Kelelahan setelah tiba di sekolah karena jarak yang sangat jauh antara sekolah dan rumah siswa menjadi faktor utama rendahnya pemahaman siswa terhadap IPA. Siswa menjadi kurang termotivasi terhadap konsep yang disampaikan guru baik di awal jam pelajaran maupun di akhir pembelajaran. Kepuasan diri guru dalam mengajar tidak akan terlaksana dengan baik jika siswa tidak siap untuk belajar. Hal ini juga terkait dengan konsep IPA yang tidak diminati siswa seperti suhu dan perubahannya serta konsep tentang enzim pencernaan. Ketertarikan siswa di daerah khusus terhadap suatu materi sangat bergantung pada bagaimana guru mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan (Chirino, 2011). Oleh karena itu guru IPA di daerah khusus hendaknya selalu meningkatkan ilmunya secara terus menerus agar menarik minat siswa untuk belajar (Revell, 2012).

3. Sikap Siswa Terhadap Pelajaran IPA

Secara keseluruhan nilai rata-rata sikap siswa terhadap konsep IPA pada setiap kategori sekolah di Kabupaten Kayong Utara berada pada kategori sedang. Hal ini berarti siswa di daerah khusus memiliki

sikap yang cukup positif terhadap konsep IPA. Berdasarkan data penelitian, kurang dari separuh siswa (41,1%) memiliki sarana untuk belajar IPA, dan hanya 53% melakukan upaya belajar IPA, misalnya dengan terlebih dahulu membaca konsep-konsep yang akan dipelajarinya di kelas. Situasi ini menunjukkan sikap positif siswa terhadap pelajaran IPA. Sikap siswa ini penting untuk ditingkatkan (Chua, 2005). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh siswa (55,1%) merasakan manfaat belajar IPA karena menurut mereka pelajaran IPA diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah siswa. Menurut Slameto (2019), pembelajaran IPA secara harfiah mampu melatih siswa dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir logis. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang duduk di bangku sekolah menengah, khususnya di daerah khusus menyadari akan pentingnya belajar dan memiliki ilmu pengetahuan (IPA) untuk kehidupan sehari-hari dan karir masa depan mereka.

Hasil penelitian tentang sikap siswa terhadap pembelajaran IPA menunjukkan bahwa hanya 42,1% sangat tertarik dengan pembelajaran IPA, dan hanya 52,7% menyukai mata pelajaran IPA. Dalam proses pembelajaran sering dialami oleh guru bahwa jika siswa tertarik pada materi pelajaran maka siswa memiliki sikap positif untuk lebih memperhatikan pelajaran tersebut (Uran 2018). Siswa yang memiliki sikap positif dalam belajar akan merasa senang mempelajari mata pelajaran tertentu, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal (Sudarsana, 2016). Siswa yang memiliki sikap positif dan selalu ingin mencoba, lebih cenderung memiliki prestasi daripada siswa yang memiliki sikap negatif dan kurang keinginan untuk belajar (Daga, 2018).

Temuan lain dari penelitian ini adalah siswa di daerah khusus mengungkapkan keterbatasannya, hal ini ditunjukkan dengan kondisi sebagian siswa yaitu 33,33% yang tidak tertarik dengan pelajaran

IPA. Ketika siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran IPA, guru IPA di daerah khusus cenderung memberikan soal yang sulit dan diminta untuk mengerjakannya di rumah. Metode ini cenderung kurang efektif dalam membentuk dan membangun interaksi edukatif yang dapat menanamkan minat dan sikap dalam diri siswa untuk menyenangi pelajaran IPA. Berdasarkan perspektif siswa daerah khusus, metode yang paling disenangi dalam pelajaran IPA ialah metode tutor sebaya. Metode ini akan memungkinkan terciptanya sistem lingkungan belajar yang berkontribusi pada peningkatan minat siswa dan membentuk sikap positif siswa terhadap pengajaran IPA tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar sekolah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini siswa di daerah khusus melaporkan bahwa materi IPA sangat sulit dipahami (77%), belajar hanya di dalam ruangan (47%), dan pelajaran IPA cenderung sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (76%). Hampir separuh siswa (41,1%) menyatakan bahwa guru IPA yang mengajar di daerah khusus kurang memiliki cara yang menarik untuk menyajikan konsep IPA. Data lain menunjukkan bahwa sebagian siswa yaitu 46,9% tidak terlalu berminat mengikuti pelajaran IPA. Mereka mengatakan tidak ingin lebih sering mengikuti pelajaran IPA. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap keadaan ini adalah faktor kebosanan. Beberapa konsep IPA yang kurang diminati siswa berkaitan dengan pengetahuan konseptual guru pada konsep-konsep tersebut. Secara umum, sangat sulit untuk mengajarkan konsep IPA dengan media, sarana dan prasarana yang terbatas di daerah khusus. Kesulitan yang dialami guru di daerah khusus (Gurdasus) antara lain membangun kesadaran siswa akan pentingnya belajar dan juga kemauan untuk memahami materi IPA. Kelelahan setelah tiba di sekolah karena jarak yang sangat jauh antara sekolah dan rumah menjadi faktor

utama rendahnya pemahaman siswa terhadap IPA. Siswa menjadi kurang termotivasi terhadap konsep yang disampaikan guru baik di awal jam pelajaran maupun di akhir pembelajaran. Temuan lain dari penelitian ini adalah 33,33% siswa di daerah khusus tidak tertarik dengan pelajaran IPA. Ketika siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran IPA, guru IPA di daerah khusus cenderung memberikan soal yang sulit dan diminta untuk mengerjakannya di rumah. Metode ini cenderung kurang efektif dalam membentuk dan membangun interaksi edukatif yang dapat menanamkan minat dan sikap dalam diri siswa untuk menyenangi pelajaran IPA.

Referensi

Backman, E., G. Nyberg, and H. L. (2020). "Moving Beyond Rigid Orthodoxies in the Teaching and Assessment of Movement in Swedish PETE-a Student Perspective. *European Physical Education Review*, 26(1), 111-127.

Bergman, L. R., & Vargha, A. (2013). Matching method to problem: A developmental science perspective. *European Journal of Developmental Psychology*, 10(1), 9–28. <https://doi.org/10.1080/17405629.2012.732920>

Chirino, V. (2011). Critical factors in defining the mobile learning model: An innovative process for hybrid learning at the tecnologico de Monterrey, a Mexican University. *Handbook Of Research on Mobility and Computing: Evolving Technologies and Ubiquitous Impacts*, 19. <https://doi.org/DOI:10.4018/978-1-60960042-6.ch048>.

Chua, L. C. (2005). A critical review of commitment studies: A call for research in Sarawak school settings. *Jurnal Penyelidikan Maktab Perguruan Bukit Lintang*, 6(2).

Daga, A. T. (2018). *Sekolah Dasar Di Malaysia, India Dan Indonesia*.

Depdiknas. (2008). *Pengembangan Perangkat Penilaian Afektif*. Depdiknas.

Emaliana, E. (2007). Teacher-centered or Student-centered Learning Approach to Promote Learning. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 59–70.

Erik, B. & Dean, M. B. (2020). Re-thinking pedagogical content knowledge for physical education teachers – implications for physical education teacher education. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 25(5), 451–463. <https://doi.org/DOI: 10.1080/17408989.2020.1734554>.

Firdaus, A. I., & Mukhibat. (2022). Pengaruh Sikap dan Minat Belajar Siswa dengan Nilai Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VIII Mts Pondok Pesantren Sareh Wasilah Al Islam Magetan Tahun Ajaran 2020/2021. *JIIPSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/jiipsi.v2i1.510>

Fixsen, D. L., Schultes, M.-T., & Blase, K. A. (2016). Bildung-Psychology and implementation science. *European Journal of Developmental Psychology*, 13(6), 666–680. <https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1204292>

Hanif, M. (2020). The Development and Effectiveness of Motion Graphic Animation Videos to Improve Primary School Students' Sciences Learning Outcomes. *International Journal of Instruction*, 13(3), 247–266.

Hasan, A., Jung, H., Kinnell, A., Maika, A., Nakajima, N., & Pradhan, M. (2021). Contrasting Experiences: Understanding the Longer-Term Impact of Improving Access to Pre-Primary Education in Rural Indonesia. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 14(1), 28–56. <https://doi.org/10.1080/19345747.2020.1839989>

Hock, M. F., & Mellard, D. F. (2011). Efficacy of Learning Strategies Instruction in Adult Education. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 4(2), 134–153. <https://doi.org/10.1080/19345747.2011.555291>

Holstermann, N., Grube, D., and Bogeholz, S. (2010). Hands-on Activities and Their Influence on Students' Interest. *Res Sci Educ.* <https://doi.org/Res Sci Educ. 40. 743–757>. DOI 10.1007/s11165-009-9142-0.

Hooshyar, D., Malva, L., Yang, Y., Pedaste, M., dan Wang, M. (2020). An adaptive educational computer game: Effects on students' knowledge and learning attitude in computational thinking. *Computers in Human Behavior*, 114, 1–13.

Kintu, M.G., Zhu, C., dan Kagambe, E. (2017). Blended learning effectiveness: The relationship between student characteristics, design features and outcomes. *International Journal of Educational Technology in Higher Education.*, 14(7), 1–20. <https://doi.org/DOI 10.1186/s41239-017-0043-4>.

Koedel, C., Li, J., Springer, M. G., & Tan, L. (2019). Teacher Performance Ratings and Professional Improvement. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 12(1), 90–115. <https://doi.org/10.1080/19345747.2018.1490471>

Liakopoulou, M. (2011). The professional competence of teachers: Which qualities, attitudes, skills, and knowledge contribute to a teacher's effectiveness. *Journal Of Humanities And Social Science International*, 1(21), 68–69.

Maasawet, E. T. (2015). Model Pengelolaan Kelas Rangkap (PKR) untuk Sekolah Dasar yang Mengalami Kekurangan Guru di Daerah Perbatasan atau Terpencil di Provinsi Kalimantan Timur. *Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/bioedukasi-uns.v8i1.2944>

Melton, J., Miller, M., Brobst, J. (2019). Mentoring the mentors: Hybridizing professional development to support cooperating teachers' mentoring practice in science. *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 19(1), 23-44.

Mohamed, R., Lebar, O. (2017). Authentic assessment in assessing higher order thinking skills. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(2).

Nugroho, P. J. (2012). Pengembangan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Pada Daerah Terpencil Daratan Pedalaman. *Manajemen Pendidikan*, 23(6), 513–531.

Nurhasanah, S. A. S. (2016). *Minat Belajar sebagai Determinan Hasil Belajar Peserta didik. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran.* 1(1), 135–142.

Polikoff, M., Le, Q. T., W. Danielson, R., M. Sinatra, G., & A. Marsh, J. (2018). The Impact of Speedometry on Student Knowledge, Interest, and Emotions. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 11(2), 217–239. <https://doi.org/10.1080/19345747.2017.1390025>

Pratama, Y.M.P., Iswari,R.S.,dan Ngabekti, S. (2018). Korelasi Persepsi dan Minat dan Hasil Belajar Peserta didik Kelas 10 Lintas Minat Biologi SMAN 1 Ambarawa. *Phenomenon Jurnal Pendidikan MIPA*, 8(1), 57–67. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21580/phen.2018.8.1.2183>

Revell, L. and J. A. (2012). *Character education in schools and the education of teachers Canterbury Christ. UK.*

Ruhland, S. K. (2001). “Factor that Influence the Turnover and Retention of Minnesota’s Technical College Teachers. *Journal of Vocational Education Research.*, 26(1), 56-76.

Saracagolu, A.S Yenice, N. (2019). Investigating the self-efficacy beliefs of science and elementary teachers with respect to some variables”. *Journal of Theory and Practice in Education.*, 5(2), 244-260.

Sinambela, M. (2017). Kurikulum 2013 dan Implementasinya dalam Pembelajaran. *Generasi Kampus.* 6(2), Article 2. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/7085>

Slameto. (2019). *Evaluasi, Model Program Evaluasi Beserta Tren Supervisi Pendidikan.* Qiara Media.

Sudarsana, I. K. (2016). *Pemikiran Tokoh Pendidikan dalam Buku Lifelong Learning: Policies, Practices, and Programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia)*, 2 (Perspektif Peningkatan Mutu di Indonesia), 10.

Taylor, J. A., Roth, K., Wilson, C. D., Stuhlsatz, M. A. M., & Tipton, E. (2017). The Effect of an Analysis-of-Practice, Videocase-Based, Teacher Professional Development Program on Elementary Students’ Science Achievement. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 10(2), 241–271. <https://doi.org/10.1080/19345747.2016.1147628>

Uran, L. L. (2018). Evaluasi Implementasi KTSP dan Kurikulum 2013 pada SMK Se Kabupaten Belu. *Nusa Tenggara Timur*, 22(1), 1–11.

Wahyuni, L. (2015). Hubungan Keterampilan Mengajar Guru dengan Minat Belajar Peserta didik. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 11(4), 1–15.

Westine, C. D., Unlu, F., Taylor, J., Spybrook, J., Zhang, Q., & Anderson, B. (2020). Design Parameter Values for Impact Evaluations of Science and Mathematics Interventions Involving Teacher Outcomes. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 13(4), 816–839. <https://doi.org/10.1080/19345747.2020.1821849>

Yurizki, Desita, Murniati Murniati, S. Nur. (2018). Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Peserta Didik SMAN di Wilayah Barat Kabupaten Bireuen. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 6(2), 68–74.

Yusuf & Ruslan. (2014). Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Biologi Yang Telah Tersertifikasi Terhadap Hasil Belajar Peserta didik di SMA Se-Kota Ternate. *Jurnal Bioedukasi*, 3(1), 306-312.

CHAPTER 3

Kenakalan Remaja di Negeri Syariat Islam: Studi Kasus Kenakalan Remaja di Bukit Pengampunan (Kabupaten Pidie, Nangroe Aceh Darussalam)

Oleh: Zufahmi, M.Pd.

A. Pendahuluan

Remaja merupakan individu yang mengalami peralihan kanak-kanak menjadi pribadi yang lebih dewasa yang ditandai dengan munculnya pertumbuhan seks sekunder. Menurut Monk, Knoers dan Haditono (2004) masa remaja dibedakan menjadi 4 masa, terdiri dari pra-remaja atau pra-pubertas (10-12 tahun), remaja awal atau pubertas (12-15 tahun), remaja pertengahan (15-18 tahun) dan remaja akhir (18-21 tahun). Seseorang yang memasuki masa remaja akan terjadi perkembangan fisik dan sosio-emosional yang sangat signifikan untuk menemukan jati dirinya sendiri. Masa pencarian jati diri ini, remaja cenderung mengarah pada kenakalan remaja, seperti tingkat agresivitas yang tinggi, minum-minuman keras, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran, tindak kriminal, homoseksual, melarikan diri dari rumah (Santrock, 2011). Hal ini tentu saja dapat membahayakan diri sendiri, baik sekarang maupun di masa yang akan datang (Andika, 2009).

Produktivitas seseorang di masa remaja sangat dipengaruhi oleh orang tua, lingkungan di sekitar, dan budaya yang mengarahkannya. Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu atau dikenal dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-

remaja yang gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja (Aulia, 2012).

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan otonomi di bidang keagamaan. Penegakan syariat islam merupakan suatu tuntutan yang sangat realistis. Namun, kenyataannya masih banyak perilaku penyimpangan norma dan etika yang terjadi di Provinsi Aceh. Kenakalan remaja semakin meningkat dan meresahkan masyarakat, seperti balap liar, mencuri, pergaulan bebas, narkoba, *bullying* bolos saat jam sekolah, dan sebagainya. Hal ini akan berdampak negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kenakalan remaja agar mampu memberikan solusi untuk memecahkan permasalahannya.

Kenyataan tersebut merupakan suatu indikator bahwa pendidikan belum maksimal dapat membentuk karakter peserta didik, dan merupakan fenomena yang harus dijawab oleh dunia pendidikan. Sauri dan Firmansyah (2010:30) menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dapat menghasilkan perubahan dalam segala aspek, termasuk perilaku, sikap dan perubahan intelektualnya. Pendidikan sebagai usaha sadar untuk membantu mencapai tingkat kedewasaan, pola pikir dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya dan menanamkan nilai-nilai, sikap dan keterampilan agar mereka kelak mampu memainkan peranan sesuai kemampuan dan kedudukan masing-masing sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Melalui pendidikan akan terbentuk tatanan kehidupan masyarakat yang maju, tentram, damai dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai dan norma budaya.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Bukit Jabal Ghafur, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, provinsi Aceh. Subjek penelitian merupakan siswa Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas yang sering berkumpul di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penggambaran, penjelasan, dan penguraian dalam bentuk kalimat tentang keadaan yang sebenarnya.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Perilaku Kenakalan Remaja di Bukit Jabal Ghafur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan sebanyak 20 orang remaja yang melakukan penyimpangan atau kenakalan di masyarakat terdiri dari 6 remaja perempuan dan 14 remaja laki-laki dengan rata-rata berusia 10-18 tahun. Adapun perilaku penyimpangan atau kenakalan yang dilakukan seperti penipuan, pergi tanpa pamit kepada orang tua, membolos sekolah, mencuri, pergaulan bebas, balap liar, dan menggunakan narkoba. Bentuk kenakalan remaja dilakukan secara berkelompok. Hal ini sesuai dengan karakteristik remaja yang suka berkelompok dan lebih percaya diri dan berani bila ada di dalam kelompok tertentu.

Tahap remaja yang berbeda dengan tahap sebelumnya membuat individu harus menyesuaikan diri dan menerima perubahan ini dengan sikap yang tepat. Menurut Oswalt (2010) keterlibatan dalam hubungan sosial masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibanding masa kanak-kanak. Komunitas kelompok remaja sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja di dalamnya.

Kenakalan remaja yang terjadi di Bukit Jabal Ghafur semakin meresahkan masyarakat di sekitar. Masyarakat semakin terganggu dengan suara bising dari knalpot blong kendaraan yang digunakan untuk balap liar. Warga juga mengeluh dengan pergaulan bebas yang dilakukan remaja yang dikhawatirkan berdampak pada hamil di luar nikah bagi anak-anak di usia dini.

Sementara itu, informasi dari beberapa warga desa bahwa kebanyakan remaja laki-laki yang sering melakukan pelanggaran dibanding dengan remaja perempuan. Banyaknya remaja laki-laki melakukan kenakalan disebabkan karena faktor lemahnya tingkat pemahaman agama dalam diri remaja tersebut, sehingga dalam berperilaku remaja kerap kali tidak dapat mengendalikan emosinya. Hal ini disebabkan meskipun remaja tinggal di lingkungan masyarakat yang mayoritas memiliki tingkat pemahaman agama yang baik namun pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari kurang mencerminkan perilaku yang religius.

Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Bukit Jabal Ghafur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan Tuha Peut Gampong, dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja sebagai berikut.

1. Faktor Internal

a. Krisis Identitas

Awal masa remaja, seorang anak perlu penyesuaian diri dengan kelompok sehingga mereka dituntut untuk mencari identitas diri berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa peranannya dalam masyarakat, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, dan sebagainya. Hurlock (1980) menyatakan bahwa status remaja yang mendua dalam kebudayaan yang menyimpang saat ini menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan krisis identitas pada remaja.

b. Kontrol Diri yang Lemah

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku menyimpang. Mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Remaja di Bukit Jabal Ghafur sudah mengenal mencuri, membolos sekolah, dan balap liar. Kebanyakan remaja melakukan hal-hal negatif seperti itu karena alasan ingin coba-coba, tidak mau dianggap culun oleh teman sebayanya karena tidak melakukan hal yang dilakukan oleh beberapa remaja lainnya.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan faktor yang sangat menentukan karakter remaja. Remaja membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua yang dapat terwujud dalam keluarga yang harmonis. Kenakalan remaja dapat terjadi apabila mereka berada dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti pertengkaran, tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, kurangnya ekonomi dan pendidikan dalam keluarga. Hal ini berdampak pada kenakalan remaja seperti, remaja membantah perintah kedua orang tua, berkelahi dengan remaja lain, keluyuran hingga larut malam, penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya.

Menurut Siege dan Welsh (2011), keluarga yang bermasalah merupakan penyebab utama dalam pembentukan masalah emosional pada anak dan dapat mengarah pada masalah sosial jangka panjang. Sedangkan menurut Suyanto dan Hariadi (2002) orang tua yang mengacuhkan atau tidak memenuhi kebutuhan anak dengan baik akan meningkatkan resiko keterlibatan anak dalam perilaku sosial yang tidak adaptif seperti agresi dan perilaku eksternal lainnya.

Hal serupa terjadi di Bukit Jabal Ghafur, Kabupaten Pidie yang bermula dari masalah di dalam keluarga yaitu orang tua yang kurang menjalin komunikasi dengan anak remajanya, sehingga perhatian dan pengawasan terhadap anak tidak terjalin di dalam keluarga sehingga menyebabkan mayoritas remajanya keluyuran, sering bolos sekolah dan melakukan balap liar di jalanan gampong dengan membunyikan suara knalpot yang memekakkan telinga.

b. Faktor Pendidikan

Faktor ini merupakan salah satu penyebab remaja menjadi nakal. Seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin rendah melakukan kenakalan. Sebab dengan pendidikan yang semakin tinggi, nalarnya semakin baik. Artinya mereka tahu aturan-aturan ataupun norma sosial mana yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Atau mereka tahu rambu-rambu mana yang harus dihindari dan mana yang harus dikerjakan.

Remaja di Bukit Jabal Ghafur pada tingkat sekolah menengah justru paling banyak melakukan tindak kenakalan, di gampong sendiri namun juga di luar, seperti contoh balap liar di gampong lain, bolos dengan mengajak siswa sekolah lain, merokok, nonton film porno, sedang kan mereka yang hanya tamat SD, melakukan kenakalan yang didasari karena pengaruh teman sebaya dan faktor ikut-ikutan.

c. Perkembangan Teknologi dan Informasi

Faktor penyebab kenakalan remaja yang terakhir adalah perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan informasi dapat menjadi penyebab kenakalan remaja. Para remaja selalu ingin tahu tentang apa yang belum dia lakukan, tetapi jika mencontoh berbagai tayangan media internet yang dibuka lebar tanpa filter dapat mendorong para remaja melakukan berdasarkan apa yang telah mereka saksikan. Oleh karena itu, orang tua harus dapat membekali pendidikan karakter dan keagamaan yang baik

terhadap anak mereka agar memiliki dasar keimanan dan ketaqwaan dalam menghadapi era millennial.

d. Faktor Pembentukan dan Implementasi Kereligiusan Remaja

Religiusitas timbul bukan karena dorongan alami atau asasi, melainkan dorongan yang tercipta karena tuntutan perilaku. Menurut Freud dalam (Ancok, 2001), religiusitas seseorang timbul karena reaksi manusia atas ketakutannya sendiri. Lebih lanjut Freud menegaskan bahwa orang mempunyai sikap keberagamaan semata-mata karena didorong oleh keinginan untuk menghindari keadaan yang berbahaya yang akan menimpanya dan memberi rasa aman bagi dirinya sendiri.

Thouless dalam Rakhmat (2000), mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi perkembangan sikap religius pada remaja yaitu (1) Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial, termasuk di dalamnya pendidikan dari orang tua, tradisi sosial, tekanan lingkungan sosial yang disepakati oleh lingkungan itu (faktor sosial) (2) Berbagai pengalaman yang membentuk sikap keagamaan terutama pengalaman mengenai keindahan, keselarasan dan kebaikan didunia lain (faktor alami), konflik moral (faktor moral) dan faktor pengalaman emosional atau afektif (3) Faktor-faktor yang seluruhnya timbul atau sebagian timbul dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan terhadap keamanan, cintakasih, harga diri dan ancaman kematian (4) Berbagai proses pemikiran verbal (faktor intelektual).

Lemahnya sikap religius yang ada pada diri remaja menyebabkan semakin meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial dalam masyarakat. Idealnya, semakin besar tantangan yang dihadapi, akan diikuti semakin kuat orang berpegang teguh pada ajaran agamanya. Namun yang terjadi adalah remaja jauh dari orientasi religiusitas. Mereka berani melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran agamanya karena merasa tidak diterima di kelompoknya.

D. Upaya Yang Perlu Dilakukan Terhadap Permasalahan Kenakalan Remaja Di Bukit Jabal Ghafur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Kenakalan remaja dalam bentuk apapun mengakibatkan hal negatif baik bagi masyarakat maupun bagi dirinya sendiri. Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh remaja merupakan penyakit masyarakat yang perlu dicarikan obat untuk penyembuhannya. Menurut Kartono (2010), menjelaskan bahwa penyakit masyarakat adalah semua bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dengan pola tingkah laku umum. Hal ini relevan dengan pemahaman tugas-tugas perkembangan remaja dalam bersikap dan berperilaku dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya.

Menurut Jessor (2003) perilaku kenakalan remaja dapat diminimalisir dengan adanya dukungan sosial keluarga, sikap positif keluarga, dan memberikan contoh sikap yang benar kepada remaja. Betapa pentingnya peran orang tua terhadap perkembangan anaknya, sangat bermakna bagi sikap dan perilaku anaknya. Keluarga yang terbuka, hangat dan utuh serta memberikan dukungan kepada anak untuk bersikap baik dan memerankan perilaku yang adaptif menjadi kondisi yang ideal bagi anak untuk membentuk kepribadian yang baik. Karena keluarga menjadi tempat pertama bagia anak untuk mengenal dan mempelajari bagaimana cara bersikap dengan baik yang dicontohkan oleh figur orang tua dan orang disekelilingnya. Maka jelas bahwa peran keluarga sangat besar bagi pembentukan sikap dan kepribadian anak. Namun keluarga bukan satu-satunya yang berperan dalam membentuk sikap dan perilaku anak, melainkan terdapat faktor sekolah dan lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, J. M. 2012. Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah, catatan pertama, Jogjakarta.
- H. Thouless. 2000. Pengantar Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali Press
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. Psikologi Perkembangan, Jakarta: Erlangga.
- J. Rahmat. 2000. Psikologi Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jessor, R., Turbin, M.S., Costa, F.M., Dong, Q., Zhang, H., & Wang, C. (2003). Adolescent Problem Behavior in China and The United States: A Cross-National of Psychosocial Protective Factors. *Journal of Research on Adolescence*.
- Kartono 2010, Psikologi Sosial. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Monk, F., J., K. & Haditono, S., R. 1999. Psikologi Perkembangan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Narwoko D. J & B. Suyanto. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta: Penada Media.
- Santrock, John W. Adolescence. 2011. Perkembangan Remaja. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, S. W. 2012. Psikologi remaja edisi revisi,catatan lima belas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siegel, J. & Welsh, B. 2011. Juvenile Delinquency The Core. California: Wadsworth
- Suyanto, B., & Hariadi, S. 2015. Krisis dan Child Abuse. Surabaya: Airlangga University Press.

CHAPTER 4

Kompleksnya Permasalahan Pendidikan di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep Jawa Timur

Oleh: Husamah, M.Pd.

A. Pendahuluan

Pendidikan sejatinya adalah bentuk investasi sumber daya manusia (SDM) jangka panjang dalam menumbuhkan dan mewujudkan daya saing bangsa masa kini dan di masa depan (Karini, 2018; Lengkong et al., 2017). Negara berkewajiban menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak (Fironika, 2015). Suatu negara menyelenggarakan pendidikan bagi bangsanya adalah dengan maksud mencerdaskan rakyat, meningkatkan pengetahuan mereka demi kesejahteraan bersama, yang pada gilirannya akan menjadikan negara itu mengalami kemajuan (Wardi, 2017). Mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak warga negara Indonesia, merupakan hal yang sangat utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi (Nadziroh et al., 2018).

Namun realitas yang terjadi selama ini di Indonesia berkaitan dengan pendidikan, masih berupa tingginya kesenjangan aksesibilitas pendidikan (Hidayat, 2017), antara desa dan perkotaan (Vito & Krisnani, 2015), ataupun antar daerah (Suyahman, 2015). Permasalahan ini tidak semata menjadi beban dan tugas pemerintah pusat, sebab upaya peningkatan mutu dan pembangunan bidang pendidikan juga menjadi isu strategis bagi setiap pemerintah daerah. Upaya peningkatan mutu dan pembangunan bidang pendidikan di era otonomi daerah bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, melainkan juga merupakan tanggung jawab

pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang berada di wilayah Pulau Madura (Febrianto & Sulaiman, 2014), tak terkecuali Kabupaten Sumenep (Prasetyo et al., 2014).

Salah satu wilayah di Kabupaten Sumenep yang perlu mendapat perhatian, khususnya di sektor pendidikan adalah Kecamatan (Kepulauan) Sapeken (Hidayatullah & Husamah, 2020; Nurwidodo Nurwidodo, Husamah, et al., 2017). Sehubungan dengan itu, artikel ini mendeskripsikan problematika pendidikan di daerah kepulauan terpencil, studi kasus di Kepulauan Sapeken, Sumenep, Jawa Timur.

B. Mengenal Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki 27 kecamatan yang terbagi atas 18 kecamatan di wilayah daratan dan 9 kecamatan terletak di kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau, terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Kabupaten Sumenep, secara geografis terbagi atas dua bagian, yaitu bagian daratan dengan luas 1.146,927065 km² (54,79%) dan bagian kepulauan dengan luas 946,530508 km² (45,21%) dari total luas wilayahnya dengan luas wilayah perairan sekitar 50.000 km². Secara geografis, Kabupaten Sumenep terbentang antara 113° 32'54" LS - 116° 16'48" LS dan 04° 55'33" BT - 07° 24'19" BT.

Sapeken adalah salah satu kecamatan yang terletak di kepulauan, dan merupakan kecamatan terjauh. Sapeken memiliki luas 201,89 km² atau 9,64% dari luas Kabupaten Sumenep. Daerah di Sapeken berada pada ketinggian 1-2 meter dari permukaan laut sehingga merupakan dataran rendah. Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan Sapeken terletak pada koordinat 115,330-115 Lintang Selatan dan 6,280 -7,120 Bujur Timur. Sapeken terletak ±80 mil di sebelah utara Pulau Bali dan ±200 mil sebelah timur Pulau Jawa (Surabaya). Secara geografis, Sapeken berada di Laut Jawa dengan batas-batas

wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan perairan Kalimantan, sebelah selatan berbatasan dengan perairan Bali, sebelah timur berbatasan perairan Sulawesi, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa dan Madura. Sapeken memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 53 pulau, dengan 21 pulau berpenghuni. dan 32 pulau tidak berpenghuni.

Akses ke Kepulauan Sapeken adalah dengan menggunakan kapal penumpang atau kapal Perintis yang tersedia hanya dua kali perjalanan dalam 10 sampai 12 hari. Perjalanan dapat melalui rute Madura (Pelabuhan Kalianget, Sumenep) atau Banyuwangi (Pelabuhan Tanjungwangi) menuju Pulau Kangean (Pelabuhan Batuguluk) dan selanjutnya ke Pulau Sapeken. Masa pelayaran kapal reguler pada jalur ini adalah $\pm 8-12$ jam. Sebagai alternatif, penumpang dapat menaiki kapal cepat (Express Bahari) dari Pelabuhan Kalianget menuju Pelabuhan Batuguluk di Pulau Kangean dengan waktu tempuh ± 3 jam. Kemudian menggunakan angkutan darat yang mengambil waktu perjalanan ± 2 jam melalui Arjasa untuk sampai ke ujung timur, yaitu Pelabuhan Kayu Waru kemudian menggunakan perahu angkutan menyusuri Pulau Paliat sampai ke Pulau Sapeken dengan waktu pelayaran ± 2 jam. Selanjutnya dari Pulau Sapeken penumpang dapat menggunakan jasa perahu angkutan-masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah taksian atau tambangan-menuju pulau-pulau yang dituju dengan lama waktu ± 30 menit untuk yang terdekat sampai ± 5 jam untuk yang terjauh (Pulau Sakala). Kecamatan Sapeken terletak sangat jauh dari ibu kota kabupaten (Sumenep daratan). Medan menuju lokasi sangat sulit akibat faktor geografis dan sarana transportasi yang tidak memadai. Kondisi geografis dan keterbatasan akses seperti inilah yang menjadi faktor penyebab kawasan terpencil semakin berada dalam keterisolasian, mengalami kesenjangan, dan jauh tertinggal dari daerah daratan (perkotaan) yang dekat peradaban ekonomi (N. Nurwidodo, Rahardjanto, Husamah, Mas'odi, et al., 2018).

Menurut data Kecamatan Sapeken dalam Angka 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Sapeken sebanyak 53.889 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 26.094 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 27.795 jiwa. Adapun jumlah KK sebesar 15.395 (BPS, 2020). Penduduk di Kepulauan Sapeken ini umumnya berbahasa Sulawesi (bahasa Bajau/ Bajo/Same, bahasa Mandar dan sebagian kecil berbahasa Bugis) bukan berbahasa Madura karena dalam sejarahnya para pelaut dari Sulawesi yang menemukan kepulauan ini (Rahman, 2018). Begitu juga dengan kultur budaya sangat berbeda dengan budaya Madura, rata-rata suku yang ada di Kepulauan Sapeken (Kecamatan Sapeken) Suku Bajau/Bajo, suku Mandar dan suku Bugis. Dari aspek mata pencaharian, mayoritas penduduknya adalah nelayan. Secara ekonomi, kondisi mereka tergolong sulit atau tertinggal dibandingkan masyarakat Sumenep daratan (Hindun et al., 2019; N. Nurwidodo, Rahardjanto, Husamah, & Mas'odi, 2018b, 2018a; Nurwidodo Nurwidodo, Rahardjanto, et al., 2017).

C. Permasalahan Pendidikan di Kepulauan Sapeken

Untuk melihat permasalahan pendidikan di Kepulauan Sapeken, maka terlebih dahulu perlu dicermati mengenai data jumlah sekolah yang mendukung program wajib belajar 12 tahun, jumlah murid, dan jumlah guru. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Sekolah (Wajib Belajar), Murid, dan Guru

No	Indikator	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
1	TK	47	Laki-laki: 850 Perempuan: 919 Total: 1772	117
2	SD Negeri	27	Laki-laki: 2180 Perempuan: 1912 Total: 4092	194
3	Madrasah Ibtidaiyah	42	Laki-laki: 2723 Perempuan: 2494 Total: 5217	201

No	Indikator	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
4	SMP Negeri	3	Laki-laki: 506 Perempuan: 504 Total: 1110	55
5	Madrasah Tsanawiyah	25	Laki-laki: 1100 Perempuan: 1016 Total: 2116	135
6	SMA Negeri	1	Laki-laki: 126 Perempuan: 137 Total: 263	29
7	Madrasah Aliyah	8	Laki-laki: 948 Perempuan: 979 Total: 1927	81
8	Pondok Pesantren	11	Laki-laki: 2005 Perempuan: 2220 Total: 4225	16 (pengasuh)
Jumlah (tidak termasuk data TK dan pesantren)		106	14.725	695

(Sumber: Data diringkas dari BPS, 2020)

Gelar yang Diperoleh Guru Swasta Diragukan

Berdasarkan Tabel 1 bahwa jumlah lembaga pendidikan telah cukup memadai pada setiap jenjangnya. Keberadaan sekolah swasta, mulai dari MI hingga MA berkontribusi penting dalam memberikan peluang untuk menempuh pendidikan bagi masyarakat usia sekolah. Namun demikian, permasalahan akan muncul dari sisi jumlah guru, kualitas guru, dan tentu saja sarana dan prasarana yang ada. Kualifikasi guru di lembaga pendidikan swasta menjadi masalah utama di Kepulauan Sapeken, terlebih banyak guru yang memperoleh gelar S1 (Khususnya gelar S.Pd.I) dengan cara tidak wajar, atau sekedar mendaftar di perguruan tinggi tertentu di Indonesia untuk memperoleh ijazah (dengan berbagai kelonggaran/kemudahan). Hal tersebut berdasarkan pengamatan, pengakuan warga/masyarakat, dan beberapa tokoh masyarakat di Kepulauan Sapeken. Dengan demikian, kita dapat membayangkan bagaimana permasalahan terkait dengan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Guru ASN Sering Membolos

Hal ini relatif berbeda dengan guru-guru di sekolah negeri (dari jenjang SD sampai SMA). Namun demikian, permasalahan yang terkait dengan guru sekolah negeri (khususnya yang ASN) adalah masa tinggal mereka yang relatif singkat. Kebanyakan guru ASN berasal dari Madura daratan dan bahkan Jawa. Ketika mereka pulang kampung, maka umumnya “molor” sehingga menyebabkan absen dalam mengajar. Bahkan, sampai berbulan-bulan. Berdasarkan pengamatan kami dan juga penuturan masyarakat, ada guru yang membolos sampai setengah semester. Meskipun demikian, sebagaimana temuan Nurwidodo Nurwidodo, Husamah, et al (2017) guru-guru ASN yang sudah menetap di kepulauan atau menikah dengan warga kepulauan relatif memiliki komitmen mengajar dengan baik, tetapi tetap perlu membutuhkan *upgrade* kompetensi.

Sarana-Prasarana yang Kurang Memadai dan Problem dana BOS

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, baik negeri maupun swasta. Jauhnya akses dan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah menyebabkan fasilitas di sekolah-sekolah tidak diperhatikan. Kecenderungan bantuan pendidikan hanya diberikan oleh Pemda ke sekolah-sekolah yang ada di Sumenep daratan. Selain itu, lemahnya pengawasan dana BOS menyebabkan kebanyakan dana tidak “terpakai” sebagaimana mestinya. Banyak pihak yang mengatakan bahwa dana BOS cenderung hanya dinikmati oleh pengelola/pemilik sekolah swasta.

Rendahnya Angka Melanjutkan ke PT dan Lulusan SLTA yang Tidak Siap Kerja

Jumlah lulusan SMA dan MA yang melanjutkan sangat sedikit. Selain terkendala faktor demografis, biaya (ekonomi) menjadi masalah utama. Sangat jarang dari mereka yang mendapatkan program beasiswa.

Masalahnya lainnya adalah bahwa karena mereka lulusan SMA dan keagamaan (MA) maka mereka relatif tidak memiliki “skill” khusus bidang perikanan (kecuali pengetahuan yang secara turun-temurun diturunkan/tradisional). Padahal bila melihat dari potensi daerah, seharusnya kepulauan Sapeken memiliki SMK Perikanan.

D. Beberapa Alternatif Solusi

Ada dan terus berkembangnya lembaga pendidikan swasta merupakan bentuk partisipasi masyarakat kepulauan Sapeken (meskipun secara ekonomi kebanyakan dari mereka memiliki keterbatasan) untuk mendukung program pemerintah dalam bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Hidayaturrahman dan Husamah (2020) bahwa masyarakat Kepulauan Sapeken telah terbiasa secara mandiri menggalang dana pendidikan di daerahnya. Sebagai nelayan, penduduk pulau ini menunjukkan kemandirian dan keinginan untuk mengenyam pendidikan yang baik, dari tingkat dasar, bahkan hingga perguruan tinggi. Mereka secara rutin mengalokasikan sebagian pendapatannya dari melaut untuk pendidikan anak-anaknya dengan harapan generasi penerusnya dapat hidup lebih baik. Selain itu, para nelayan juga rela mengorbankan penghasilannya untuk disumbangkan ke lembaga pendidikan di pulau mereka, baik sekolah agama maupun sekolah umum. Meski demikian, ke depan masyarakat pulau tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah dan perguruan tinggi, agar kemajuan yang menyikapi perkembangan zaman dapat terwujud dengan cepat dan terarah. Menurut teori partisipatif Arnstein, partisipasi masyarakat berada pada level kemitraan-bersinergi dengan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut beberapa solusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian khusus kepada sekolah-sekolah swasta

di Kepulauan, baik terkait fasilitas (sarana dan prasarana) dan kualitas guru (pembinaan berkelanjutan).

2. Perlu ada penyelidikan yang ketat terkait gelar-gelar akademik yang diperoleh guru- guru swasta (yang terkesan sangat instant)
3. Perlu ada pengawasan yang ketat terhadap kinerja guru-guru ASN.
4. Perlu adanya pengawasan yang ketat terkait dengan pencairan dan penggunaan dana BOS.
5. Perlunya pendirian SMK Perikanan

Jika beberapa hal tersebut dapat terlaksana maka kualitas pendidikan di Kepulauan Sapeken, sebagaimana merujuk pada Karini (2018), akan mengalami perbaikan yang progresif. Harus diingat bahwa kendati mulai banyak penduduk dengan pendidikan tingkat menengah tetapi potensi sumber daya manusia yang masih relatif banyak berpendidikan rendah, tentu bukan hal mudah bagi Kepulauan Sapeken secara umum untuk dapat segera keluar dari tekanan kemiskinan dan ketertinggalan. Oleh sebab itu ke depan sangat dibutuhkan komitmen dan sikap konsisten dari berbagai pihak untuk senantiasa memberikan dukungan pembangunan terutama di bidang pendidikan agar terwujud cita-cita bagi pengembangan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas.

Referensi

- BPS. (2020). *Kecamatan Sapeken dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- Febrianto, P. T., & Sulaiman, S. (2014). Kajian strategis dan prioritas pembangunan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pulau Madura. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(4), 211–220.
- Fironika, K. R. (2015). Pembiayaan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(1), 43–64.
- Hidayat, A. (2017). Kesenjangan sosial terhadap pendidikan sebagai pengaruh era globalisasi.

Jurnal Justisi Hukum, 2(1), 15–25.

- Hidayaturrehman, M., & Husamah, H. (2020). Participation in building human resources: Independent strategies for facing a demographic expansion in a remote island. In A. Ashadi, J. Priyana, B. Basikin, A. Triastuti, N. Hidayanto, & P. S. Putro (Eds.), *Teacher Education and Professional Development in Industry 4.0* (pp. 141–150). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1201/9781003035978-22>
- Hindun, I., Mulyono, M., & Husamah, H. (2019). Pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis solar cell untuk mengatasi permasalahan IRT nelayan Sapeken Kabupaten Sumenep. *International Journal of Community Service Learning*, 3(4), 198. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v3i4.21791>
- Karini, P. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 10 (1), 103–115.
- Lengkong, S. M. K., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2017). Pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–20.
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(3), 400–405.
- Nurwidodo, N., Rahardjanto, A., Husamah, H., & Mas'odi, M. (2018a). From shark hunter to seaweed and sea-cucumber cultivator: A phenomenology study at Sapeken Islands, Indonesia. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 2(10), 119–124. <http://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2018/10/N18210119124.pdf>
- Nurwidodo, N., Rahardjanto, A., Husamah, H., & Mas'odi, M. (2018b). Pendampingan masyarakat dalam budidaya rumput laut di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *International Journal of Community Service Learning*, 2(3), 157–166. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v2i3.14770>
- Nurwidodo, N., Rahardjanto, A., Husamah, H., Mas'odi, M., & Hidayatullah, M. S. (2018).

- Model pendampingan masyarakat kepulauan berbasis rumput laut (Best practices program IbW-CSR di Kepulauan Sapeken Sumenep).* Kota Tua.
- Nurwidodo, Nurwidodo, Husamah, H., Rahardjanto, A., Mas'odi, M., & Mufrihah, A. (2017). Teacher resilience in remote islands area: A case study in Small Pagerungan Island Sumenep Regency, Indonesia. *Journal of Education and Learning*, 11(1), 47–56. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v11i1.4669>
- Nurwidodo, Nurwidodo, Rahardjanto, A., Husamah, H., Mas'odi, M., & Mufrihah, A. (2017). Potentions, obstacels, and strategy in collaboration based developing seaweed cultivation at Sapeken Islands, Sumenep Regency. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL III TAHUN 2017*, 350–360.
- Prasetyo, N. D., Yulianto, A., & Effendi, L. (2014). Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Terkait Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kabupaten Sumenep (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Su. *Sarjana Ilmu Hukum*, Juli, 1–5.
- Rahman, A. (2018). *Suku Bajo dan kemiskinan (Studi kasus kemiskinan nelayan suku Bajo di Desa Saur Saibus Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Suyahman. (2015). Pendidikan untuk Semua antara harapan dan kenyataan (studi kasus permasalahan pendidikan di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 1(2), 274–280.
- Vito, B., & Krisnani, H. (2015). Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 247–251. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13533>
- Wardi, M. (2017). Madura Awards Dan Perbandingan Prestasi Pendidikan Empat Kabupaten Di Madura. *KABILAH : Journal of Social Community*, 2(1), 60–82. <https://doi.org/10.35127/kbl.v2i1.3087>

CHAPTER 5

Ceramah Dominasi Pembelajaran di Pamekasan Jawa Timur

Oleh: Chandra Kirana Nasso, M.Pd.

A. Pendahuluan: Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Permasalahan pendidikan di Indonesia banyak macamnya, mulai dari sarana prasarana sekolah, input siswa, ekonomi keluarga, juga masalah lokasi peserta didik yang tersebar di banyak lokasi, di desa dan di kota, bahkan di daerah pedalaman. Hal ini mengingat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain permasalahan tersebut juga masalah kurikulum dan pendanaan sekolah.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi telah ditetapkan pemerintah pusat dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, ketatanegaraan dan Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Presiden Republik Indonesia).

Mujahidun (2016) menyatakan bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali (UU Nomor 32 Tahun 2014 dan PP Nomor 25 Tahun 2005). Pemerintah dituntut untuk

mewujudkan pemerataan di bidang pendidikan. Salah satu gerakan yang dilakukan pemerintah adalah program wajib belajar 9 tahun melalui yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2006. Untuk itu tujuan pendidikan diletakkan pada tiga pilar, yaitu 1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses, 2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public.

Hal lainnya adalah reformasi di Indonesia yang seakan menjadi cahaya impian bagi semua perubahan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan, juga adanya perubahan paradigma sentralisasi menjadi desentralisasi yang kemudian disusul dengan regulasi pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang justru tidak sedikit menimbulkan masalah baru. hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan kebijakan pemerintah pusat (pendidikan gratis) disesuaikan dengan kondisi dan situasi keberadaan daerah yang ada.

Pemerataan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya. Permasalah tersebut antara lain disebabkan oleh daerah pedesaan sangat terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata (Zulkarnain, Handoyo, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dan ketidakadilan disebabkan oleh aksesibilitas layanan pendidikan yang belum merata, terbatasnya tenaga pendidik, infrastruktur yang belum memadai, prasarana jalan dan transportasi. Akses pendidikan yang terbatas, dan mahalnya biaya pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi.

Dalam Aristo (2019), dijelaskan bahwa pemerataan pendidikan yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia memiliki macam-macam kendala. Permasalahan disebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan sehingga kesulitan untuk mengakses layanan pendidikan, juga disebabkan oleh faktor keuangan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan menjadikan beberapa guru mengajar dengan apa adanya sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki di sekolah masing-masing. Biasanya guru mengajar dengan metode ceramah. Tuntutan pencapaian kurikulum menjadi pertanyaan yang harus dijawab dengan banyaknya permasalahan di dunia pendidikan. Diharapkan ada solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Pamekasan, sehingga target kurikulum yang diharapkan pemerintah akan tercapai.

B. Pengumpulan Data

Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Koordinator Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Ketua MGMP Biologi Kabupaten Pamekasan, 85 orang guru MAN di Pamekasan, 50 guru MA swasta, dan 30 guru SMA Negeri di Pamekasan, mulai tanggal 13 Oktober sampai 11 Desember 2020. Data dianalisis secara deskriptif.

C. Temuan

Permasalahan pendidikan di Kabupaten Pamekasan bisa dikelompokkan menjadi 5, yaitu:

Sarana dan Prasarana

Menurut Kepala Diknas Pamekasan, bahwa sarana prasarana lembaga pendidikan di bawah naungan Diknas masih belum memadai. Diperbaiki di bagian depan, bagian belakang rusak, dan seterusnya. Sekolah terakreditasi B masih dibawah 50 persen. Untuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama banyak yang bernaung di dalam pondok pesantren ataupun yayasan. Sarana kelas yang tidak sesuai dengan standar dan ada yang masih semi permanen,

tidak memiliki laboratorium IPA, dan laboratorium komputer, serta perpustakaan.

Sumber belajar terbatas, media pembelajaran terbatas, administrasi madrasah kurang baik (lemah dalam pengarsipan). Banyak SD negeri sekarang digabungkan (*regrouping*) karena kekurangan murid. Dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan hanya 4 kecamatan yang memiliki SMAN, yaitu Kecamatan Kota Pamekasan, Pademawu, Pakong, dan Kecamatan Waru. Beberapa keterbatasan di atas menyebabkan guru mengajar dengan metode ceramah.

Kompetensi guru

Guru yang kompeten adalah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sekitar 80 persen yang sudah tersertifikasi. Banyak guru di lembaga pendidikan swasta yang mengajar tidak sesuai dengan ijazah bidang studi (tidak linier). Guru jarang *diberi pelatihan (upgrading)* dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Guru mengajar dengan cara yang nyaman menurut dirinya, biasanya dengan ceramah.

Kurikulum

Apa saja kurikulumnya, sebagian besar guru mengajar sebagaimana biasanya yaitu ceramah. Alokasi waktu yang diberikan yayasan kurang karena terbentur dengan kegiatan pondok pesantren.

Pemerataan Guru

Wilayah Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi bagian utara dan selatan. Wilayah selatan adalah daerah perkotaan dan sekitarnya dimana sejak jaman Belanda telah menjadi pusat pendidikan. Sedangkan wilayah utara meliputi Kecamatan Pakong, Pegantenan, Waru, Pasean, dan Batumarmar yang merupakan wilayah pegunungan dan pantai terlambat dalam perkembangan pendidikan. Umumnya di wilayah utara mengenyam pendidikan di pondok pesantren.

Guru banyak menumpuk di wilayah selatan, untuk guru daerah utara banyak yang berasal dari kota dan pulang pergi setiap hari dengan jarak tempuh sekitar 30 – 50 km dengan medan daerah pegunungan.

Masalah pribadi siswa

Input siswa di beberapa sekolah minim, motivasi belajar kurang, minat baca rendah, buku tidak menjadi kebutuhan bagi sebagian besar siswa, siswa ikut bekerja mencari nafkah membantu orang tua, dan masih banyaknya pernikahan dini dan putus sekolah. Dalam masa pandemi siswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain games.

D. Pembahasan dan Solusi

Sarana dan prasarana

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai di beberapa lembaga pendidikan negeri dan swasta, di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan disebabkan banyak faktor, diantaranya bantuan pemerintah yang masih kurang, sehingga saat ada bantuan hanya mampu memperbaiki salah satu bagian saja, misal bagian depan saja, atau bagian belakang saja. Sehingga saat memperbaiki bagian depan, bagian belakang rusak, saat memperbaiki bagian belakang, bagian depan yang rusak, dan seterusnya.

Lembaga-lembaga swasta yang tidak memperoleh dana dari DIPA, hanya mengandalkan dana BOS atau bantuan rehab atau pengadaan kelas baru. bahkan ada lembaga swasta yang belajar di kelas semi permanen. Tidak memiliki ruang laboratorium IPA, laboratorium komputer dan perpustakaan juga mengakibatkan siswa memiliki ketertinggalan dalam banyak hal, diantaranya pengalaman

menemukan dengan eksperimen di laboratorium, mengikuti pembelajaran komputer yang sekarang sudah sangat dibutuhkan. Untuk kepentingan ujian nasional sebelumnya biasanya bergabung dengan sekolah yang memiliki fasilitas komputer, atau meminjam *laptop*. Hal lainnya adalah siswa tidak betah di kelas, misalnya karena suasana kelas yang panas. Tidak adanya perpustakaan juga mengakibatkan sulitnya membelajarkan siswa untuk memiliki keterampilan literasi karena bacaan terbatas.

Faktor penyebab terhambatnya kegiatan belajar mengajar karena kurangnya sarana prasarana pendukung antara lain karena keterbatasan dana dari pemerintah, juga pendanaan dari yayasan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah terlalu mudah memberikan izin pendirian lembaga pendidikan baru, sehingga sekolahnya bertambah banyak, tetapi muridnya hanya sedikit.

Alternatif pemecahan masalah dengan upaya melengkapi sarana dan prasarana sekolah dengan mengajukan pengadaan atau perbaikan kepada pemerintah. Pemerintah harus menyediakan pendanaan sesuai yang dibutuhkan secara merata. Hal lainnya adalah dengan mencari donatur dari alumni atau pihak lainnya yang tidak mengikat. Pemerintah juga selektif untuk memberikan izin pendirian lembaga pendidikan yang baru, lebih baik memaksimalkan sekolah yang sudah ada.

Sejalan dengan hal tersebut, Mujahidun (2016) mengatakan bahwa pemerataan pendidikan merupakan turunan dari isu pemerataan pembangunan. Masalah ini kemudian melahirkan gagasan yang dikenal dengan Trilogi Pembangunan yakni pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Dengan demikian masalah pembangunan bertumpu pada pertumbuhan. Selanjutnya pertumbuhan itu dibagi dan diratakan. Oleh karena itu pembangunan pendidikan pun dihadapkan pada isu yang sama dengan pembangunan dalam konteks ekonomi.

Pemerataan pendidikan di Indonesia yang pertama kali secara formal dilaksanakan pemerintah sejak tahun 1984 dalam program

wajib belajar Sembilan tahun mulai tahun 1994. Tahapan selanjutnya adalah memberikan beasiswa dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sekarang pun pemerintah juga telah memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan dan keberlangsungan pendidikan agar siswa tidak putus sekolah. Pemerataan pendidikan ini juga sangat bergantung pada sumber dana APBN dan APBD.

Dengan menyadari bahwa anggaran pendidikan dari pemerintah secara nasional ini belum optimal, maka antisipasi pemerintah dengan melakukan program subsidi mulai dari pendidikan dasar hingga jenjang di atasnya. Berikutnya, pemerintah mengajak kemitraan masyarakat untuk ikut memikirkan dan mendukung pembiayaan pendidikan terutama pada sekolah swasta.

Kompetensi Guru

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang kompeten, walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Tergantung kepada orangnya mau digunakan untuk apa uang kesejahteraan dari pemerintah tersebut. Seharusnya uang sertifikasi yang diperoleh salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru.

Banyaknya guru di lembaga swasta yang mengajar tidak sesuai dengan ijazah yang dimiliki, mengakibatkan mereka tidak terdaftar di Dapodik (Data Pokok Kependidikan). Sehingga tidak akan mendapatkan sertifikasi. Dengan kondisi tersebut pembelajaran kurang atau bahkan tidak optimal.

Guru jarang *diupgrade* atau mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan atau seminar-seminar sehingga guru kurang mengikuti perkembangan di dunia pendidikan. Pemerintah sudah memberikan dana kesejahteraan pada sebagian besar guru, harusnya dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru, mengikuti pelatihan atau seminar secara mandiri, tidak hanya menggantungkan pada dana dari sekolah.

Untuk guru yang belum sesuai ijazah dan mata pelajaran yang diampunya, sebaiknya mengajar sesuai dengan keilmuannya atau mengikuti program-program penyesuaian yang dilakukan pemerintah.

Masalah ini bisa dijawab dengan berbagai penyelesaian, antara lain; pemerintah memberikan program pelatihan dan sejenisnya secara merata agar semua guru bisa menikmati dan belajar. Guru juga harus *out of the box*, berani keluar dari zona nyaman yang selama ini dilakukan dan dinikmati. Mau berkorban untuk meningkatkan kompetensinya misal dengan melanjutkan kuliah, seminar dan sejenisnya dengan biaya mandiri. Untuk Kabupaten Pamekasan ke depan akan mengadakan semacam PPG bagi guru yang belum tersertifikasi.

Penambahan guru yang tersertifikasi diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahu 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pola sertifikasi guru dalam jabatan diubah menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dibandingkan dengan pola sertifikasi sebelumnya, PPG memerlukan waktu yang lebih lama dari 10 hari menjadi 6 bulan yang memerlukan biaya lebih besar.

Kurikulum

Di lapangan masih banyak guru yang mengajar dengan ceramah, atau mengajar sesuai dengan kemauannya untuk mengajar. Banyak guru yang belum dilatih untuk setiap perubahan kurikulum yang ada. Guru sulit untuk keluar dari zona nyaman. Hal ini juga karena lemahnya pengawasan, baik dari pengawas maupun dari kepala sekolah. Penyediaan waktu belajar juga menjadi masalah tersendiri, karena akan mengakibatkan tidak selesainya kurikulum yang telah dirancang oleh guru. Hal ini terjadi karena menyesuaikan dengan kegiatan di pondok pesantren.

Alternatif pemecahan masalahnya antara lain adalah guru mau berubah dengan belajar mengikuti perkembangan dalam dunia pendidikan. Pengawas dan kepala sekolah rutin melaksanakan supervisi dan memberikan wawasan perkembangan dalam dunia pendidikan. Stakeholder melakukan komunikasi yang intens dengan pihak pondok pesantren untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Wahid (2006), kurikulum dan pendidikan merupakan dua konsep yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum membahas pengembangan kurikulum. Sebab dengan pemahaman yang jelas atas kedua konsep tersebut diharapkan pengelola pendidikan terutama pelaksana kurikulum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kurikulum digunakan sebagai acuan pengalaman pembelajaran siswa yang ditunjukkan dengan pembentukan tujuan, rencana, dan rancangan untuk pembelajaran dan pengimplementasian dari rencana-rencana tersebut di sekolah.

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan bervariasi sesuai dengan aliran dan teori yang dianut. Ada tiga konsep kurikulum yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan sebagai bidang studi (Sukmadinata, 2000).

Kurikulum sebagai substansi, bahwa kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah. Kurikulum sebagai sistem, yaitu merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan system masyarakat. Kurikulum sebagai suatu bidang studi kurikulum merupakan kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mempelajari konsep-konsep dasar kurikulum dengan studi pustaka dan kegiatan penelitian.

Pemerataan guru

Pemerataan guru di Pamekasan yang masih sangat dirasakan yaitu menumpuknya guru di wilayah selatan. Akibatnya ada sekolah yang semua tingkatan diajari guru yang jumlahnya tidak sesuai, misal 6 kelas diajar oleh 3 atau 4 orang guru saja. Pembelajaran pasti tidak maksimal, ditambah lagi dengan jumlah jam mengajar yang biasanya dibatasi sampai jam 11.00 WIB atau jam 12.00 WIB, karena jam 13.00 WIB siswa harus belajar di madrasah diniyah.

Di wilayah utara hanya ada 2 SMAN, yaitu di Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru, selebihnya adalah sekolah di pondok-pondok pesantren atau yayasan swasta lainnya. Alternatif penyelesaian masalah ini salah satunya adalah wewenang pemerintah daerah untuk memetakan guru, mutasi guru daerah selatan ke daerah utara, serta pemanfaatan perumahan kepala atau guru secara maksimal agar kepala dan guru tidak terlambat datang ke sekolah.

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam masyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia.

Sesuai pula dengan pasal 31 UUD 1945 amandemen mengatakan, (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berdasarkan hal tersebut, negara memiliki 2 kewajiban yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara di manapun, dan membiayai pendidikan bagi warga negaranya.

Menyelenggarakan pendidikan berarti pemerintah harus menyiapkan tempat, pendidik, serta sarana dan prasarananya baik di desa maupun

di kota. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan anggaran kegiatan pembelajaran yang melibatkan guru, sekolah, serta sarana dan prasarana.

Masalah pribadi siswa

Banyaknya masalah pribadi yang dialami oleh siswa juga menjadi hal yang penting untuk dibahas karena memiliki akibat yang cukup signifikan terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Permasalahan antara lain adalah siswa berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tidak memiliki sarana belajar, kurang perhatian orang tua, dan jauhnya jarak rumah ke sekolah, yang penting mereka datang ke sekolah. Apalagi saat pandemi Covid-19 saat ini, mereka kesulitan untuk belajar secara online karena tidak memiliki handphone, atau tidak memiliki uang untuk membeli paket internet. Bahkan pada saat pembelajaran tatap muka juga mereka tidak datang ke sekolah karena kesulitan biaya transportasi.

Kesulitan ekonomi keluarganya juga mengakibatkan anak harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ada yang menjadi tukang becak, ikut bekerja mengiris tembakau, ikut kerja di sawah sebagai buruh tani, kuli bangunan, bahkan ikut melaut. Berikutnya adalah masih banyaknya pernikahan dini yang biasa terjadi di daerah pedesaan. Orang tua merasa anaknya cukup bekal ilmu di SD atau SMP saja, setelah itu dinikahkan. Pernikahan dini ini bisa menyebabkan banyak hal, misal meningkatnya angka perceraian, kurang pemahannya tentang kesehatan dan kebersihan, sehingga anak yang dilahirkan juga dalam perawatan kurang maksimal. Akibat berikutnya adalah meningkatnya angka pengangguran.

Rendahnya motivasi belajar dan motivasi untuk membaca disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ekonomi keluarga yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan fasilitas belajarnya, misal buku-buku yang mengakibatkan anak tidak terbiasa untuk

membaca. Untuk di masa pandemi Covid-19 ini, siswa banyak bermain game sehingga lalai untuk belajar. Bermain sampai dini hari dan paginya tidak belajar baik online maupun tatap muka.

Alternatif pemecahan masalahnya antara lain, bantuan biaya pendidikan yang memadai dari pemerintah, pemerintah intens menyosialisasikan tentang pendidikan anak, kesehatan ibu dan anak akibat pernikahan dini. Sosialisasi pemerintah kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan melalui PKK, pengajian, dan kegiatan lain. Komunikasi yang intensif 3 pilar pendidikan, pihak sekolah (guru BK, wali kelas, orang tua, stakeholder). Sekolah memberikan kegiatan ekstra berupa keterampilan-keterampilan kewirausahaan misal memasak, make up, sablon, fotografi, desain dan sebagainya yang bisa digunakan anak untuk bekerja sambil sekolah.

Metode Ceramah Menjadi Pilihan Guru dalam Pembelajaran

Proses pembelajaran di sekolah merupakan interaksi antara siswa dan guru yang didukung dengan berbagai fasilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Banyak metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran tergantung kepada guru dan materi yang diajarkan. Pembelajaran dengan metode ceramah menjadi salah satu pilihan guru dalam mengajar.

Hasil wawancara dengan guru-guru di Pamekasan, 70% menyatakan bahwa mereka memilih metode ceramah dalam proses pembelajaran. Berbagai masalah yang dihadapi guru-guru di Pamekasan seperti yang telah disampaikan menjadi pendukung bagi guru untuk menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya. Alasan pemilihan metode tersebut antara lain adalah karena guru sudah merasa nyaman dengan metode ceramah, tidak usah menyiapkan sarana prasarana belajar yang menyita waktu, guru sudah hafal dengan materi yang akan diajarkan. Alasan lainnya adalah dapat menyelesaikan semua materi tepat waktu, metode dianggap praktis

dan efisien, tidak ada sarana pendukung misalnya laboratorium untuk praktikum, siswa tidak memiliki bahan bacaan, siswa ,menjadi pendengar yang baik di kelas.

Dalam berbagai penelitian, dinyatakan bahwa masih banyak guru menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajarannya, Hamzah & Afiat dalam penelitiannya menyampaikan bahwa metode ceramah adalah metode yang paling sering digunakan pada pembelajaran PAI di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Nurhaliza dkk (2021), metode ceramah dilakukan dengan menyampaikan materi secara langsung pada siswa secara lisan. Metode ceramah dianggap kurang efektif karena pembelajaran hanya berpusat pada guru, siswa hanya mendengarkan penjelasan guru sehingga kreativitas siswa tidak ada, siswa juga tidak aktif. Guru hanya memanfaatkan buku pegangan sebagai sumber belajar.

Guru memang memiliki hak penuh atas kelas yang diajarnya, tetapi sebaiknya guru juga mau belajar dan terbuka kepada hal-hal yang baru agar proses pembelajaran di kelas menjadi variatif. Pembelajaran ceramah bisa digunakan pada materi-materi tertentu saja. Hal ini untuk menjawab kemajuan jaman dan teknologi di abad 21. Siswa diharapkan sudah disiapkan sejak di bangku sekolah untuk memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan di abad 21, sehingga nanti dapat dipastikan bahwa siswa mampu menjalani kehidupan yang layak di masa depannya.

Penelitian-penelitian-penelitian telah banyak membuktikan, bahwa metode-metode selain ceramah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam Rikawati & Sitinjak (2020), guru menjelaskan pelajaran dengan baik dan sistematis dengan metode ceramah. Siswa menjadi pendengar yang baik, namun tidak aktif. Siswa mencatat penjelasan guru, tidak banyak berbicara dengan teman, tetapi siswa tidak mau bertanya bahkan tidak merespon pertanyaan guru yang pada akhirnya siswa tidak memahami materi yang disampaikan oleh

guru. Harsono dkk (2009), ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar dengan metode ceramah konvensional dan metode ceramah berbantuan animasi. Pembelajaran menggunakan media animasi memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan menggunakan metode ceramah konvensional.

Adilah (2017), dalam hasil penelitiannya menyampaikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang belajar dengan mind map dan dengan ceramah. Hasil belajar siswa dengan mind map lebih baik dari kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah. Hasil penelitian Ghezlezh dkk (2015) menunjukkan bahwa pembelajaran tradisional dengan ceramah dan multimodal memiliki efek positif yang signifikan terhadap pengetahuan, tetapi metode multimodal lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan. Gholami dkk (2016), menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan yang teramati pada kemampuan berpikir kritis dan kesadaran metakognitif siswa setelah melakukan pembelajaran dengan ceramah, tetapi terjadi peningkatan yang signifikan setelah menggunakan model PBL.

Diharapkan guru-guru mau belajar untuk menerapkan metode pembelajaran yang variatif, sehingga siswa lebih senang untuk belajar dan kompetensinya meningkat. Sekarang banyak webinar yang bisa diikuti guru secara gratis melalui online, juga seminar-seminar pendidikan yang dilaksanakan secara offline. Pemerintah juga diharapkan mampu mensosialisasikan setiap perubahan kurikulum atau kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan sampai kepada guru-guru di seluruh Indonesia, sehingga guru mampu mengikuti semua perubahan dalam proses pendidikan yang akan diimplementasikan di kelas.

E. Kesimpulan dan Saran

Ada 5 permasalahan besar di dunia pendidikan di Kabupaten Pamekasan, yaitu bidang sarana dan prasarana, kompetensi guru, kurikulum, pemerataan pendidikan, dan masalah pribadi siswa.

Berbagai permasalahan tersebut menjadi pendukung guru untuk memilih metode ceramah pada proses pembelajarannya di sekolah. Kedepan diharapkan guru untuk mau belajar dan menyesuaikan proses pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku. Guru mau menggunakan metode pembelajaran yang variatif sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran berpusat pada siswa.

Referensi

- Adilah, 2017, *Perbedaan hasil belajar IPA melalui penerapan metode Mind Map dengan metode ceramah*, Indonesian Journal of Primary Education, Vol: 1, No. 1 98 - 103
- Ahid, Nur, 2006, *Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan*, Islamica I (1): 12-26
- Aristo Thomas Joni Verawanto, 2019, *Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan Kabupaten Sintang*, Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 7, No 1, April 2019 (25-34) Online: <http://juurnal.uny.ac.id/index.php/jamp>.
- Ghezjeljeh et al, 2015, *Effect of a multimodal training program and traditional lecture method on nurses hand hygiene knowledge, belief, and practice: A brief report*, American Journal of Infection Control, Vol 1, No. 3, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2015.03.018>
- Gholami et al, (2016), *Comparing the effects of problem-based learning and the traditional lecture method on critical thinking skills and metacognitive awareness in nursing students in a critical care nursing course*, Nurse Education Today, <http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2016.06.007>
- Hamzah & Afiat, *Penerapan Metode Ceramah dengan Audio Visual untuk Meningkatkan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan, Vol: 1, No. 1 (42 – 50)
- Harsono dkk, 2009, *Perbedaan hasil belajar antara metode ceramah*

konvensional dengan ceramah berbantuan media animasi pada pembelajaran kompetensi perakitan dan pemasangan sistem rem, Jurnal PTM, Vol: 9, No. 2 Desember 2009

Mujahidun, 2016, *Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan, Tarbiyatuna, Vol. 7, No. 1, Juni, 2016*

Nurhaliza dkk, 2021, *Analisis metode ceramah dalam pembelajaran IPS terpadu di kelas VII SMP Negeri 1 Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol: 1, No. 2 Desember 2021*

Rikawati & Sitingjak, 2020, *Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa dengan Penggunaan Metode Ceramah Interaktif, Journal of Education Chemistry, Vol. 2, No. 2, Doi: 10.21580/jec.2020.2.2.6059*

Sukmadinata, N. Syaodih, 2000, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya*

Zulkarnaen & Handoyo Ari Dwi, 2019, *Faktor-faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional “Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri 4.0 dan Cociety 5.0, <http://bimawa.uad.ac.id/wp-content/upload/Paper-Seminar-Nasional-2.pdf>.*

CHAPTER 6

Realita Pembelajaran Daring di Daerah Bangkalan Madura pada Masa Pandemi Covid-19

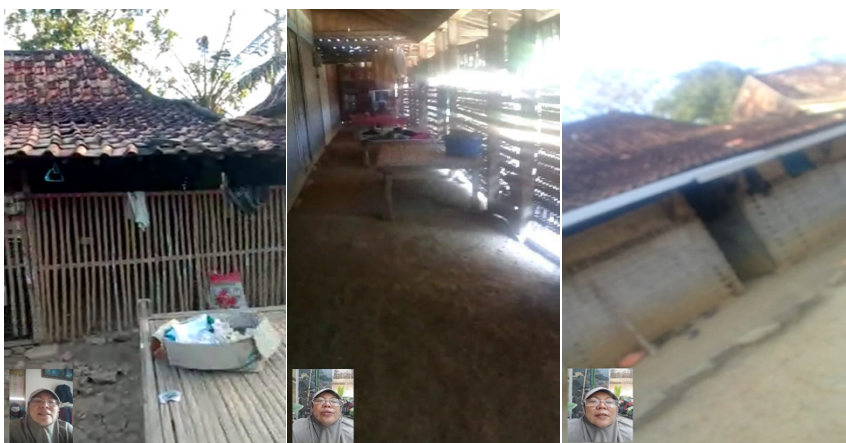
Oleh: Hefi Rusnita Dewi, M.Pd.

A. Pendahuluan

Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten di Madura yang lokasinya terdekat dengan wilayah Surabaya mengisahkan berbagai persoalan masalah pendidikan yang kompleks. Beberapa permasalahan diantaranya tentang kemampuan dari beberapa kepala sekolah di tingkat PAUD, SD dan SMP wilayah Bangkalan dalam mengoperasikan komputer masih sangat kurang, hal ini diketahui pada saat mendampingi para kepala sekolah pada acara Diklat Penguatan Kepala Sekolah di bulan Oktober 2019. Persoalan lain yang adalah motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi masih sangat rendah terutama di daerah-daerah pedesaan (VA, N.B., 2011), hal ini dipengaruhi dari pola pikir orang tua khususnya yang memiliki anak perempuan masih sering ditunangkan saat masih di bangku sekolah, sehingga cenderung untuk dinikahkan di usia yang masih muda (Rifai, M., 2019) hal ini masih sering terjadi terlebih bagi orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi yang kurang, karena ada kekhawatiran orang tua apabila anaknya “Lok pajuh Lakeh” (istilah Madura bagi wanita yang tidak kawin-kawin/perawan tua) dan permasalahan yang urgent adalah permasalahan yang dihadapi selama pemberlakuan pembelajaran daring di masa pandemi corona (Tirajoh, C. V., Munayang, H., & Kairupan, B. H., 2021).

Hal yang sangat penting bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran daring adalah lama waktu siswa harus belajar dan paket data (kuota) yang mereka miliki, sedangkan masalahnya adalah banyak orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau tidak mampu. Kendala

lain dalam pelaksanaan pembelajaran, diantaranya tidak semua siswa dan wali memiliki handphone android, sehingga siswa mencoba untuk meminjam atau menumpang dengan teman lain yang memiliki handphone android, selain itu terdapat kendala sinyal baik dari pihak siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar (Alfiyatin, Y., 2020). Hingga akhirnya hal tersebut diserahkan kepada para orang tua siswa yang menginginkan anaknya tetap belajar daring. Pembelajaran online tidak dapat dipisahkan dari internet (Sari, A. P., & Utami, N., 2019). Koneksi internet merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh siswa yang kesulitan mengakses internet di rumah, terutama ketika siswa tersebut tinggal di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal (Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., & Toharudin, T., 2021). Dalam menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan tersebut tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan jaringan seluler. Hal ini juga menjadi masalah yang sering dihadapi pembelajar daring, sehingga implementasinya kurang optimal (Fauzi, M., 2020). Berbagai permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi covid-19 di daerah Bangkalan, menjadikan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita pembelajaran daring di daerah Bangkalan pada masa pandemi corona.



Gambar 1. Salah satu rumah siswa di Desa Kokop

B. Realita Pembelajaran Di sekolah di Masa Pandemi Covid-19

Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 mengalami perubahan yang radikal. Pertemuan tatap muka tradisional tidak lagi digunakan dalam pembelajaran, tetapi secara bertahap diintegrasikan ke dalam pembelajaran daring (Susanti, D. I., & Prameswari, J. Y., 2020) Akibat derasnya informasi wabah Covid-19, sejak hari Senin tanggal 16 Maret 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melalui Dinas Pendidikan menghimbau untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa di satuan pendidikan Formal dan Non Formal untuk dilaksanakan di rumah masing-masing. Pendidik dan tenaga kependidikan tetap bertugas di satuan pendidikan masing-masing guna melakukan layanan pembelajaran jarak jauh dan melakukan pembersihan lingkungan satuan pendidikan. Serta menginformasikan kepada orang tua siswa untuk memastikan putra/putrinya melaksanakan pembelajaran dan untuk melakukan pengawasan pembelajaran di rumah serta membatasi aktivitas di luar rumah.

C. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur kepada para partisipan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan Telepon Genggam (HP) terhadap lima orang guru sebagai partisipan dari beberapa sekolah di daerah Bangkalan , di antaranya satu orang guru dari SMAN 3 Bangkalan, satu orang guru dari UPTD SMPN 2 Bangkalan, satu orang guru dari UPTD SMPN 5 Bangkalan, satu orang guru dari UPTD SD Negeri Kelean 1 Kecamatan Socah Kab. Bangkalan dan satu orang guru dari MTs Jungkebulan Bangkalan (Gambar 2). Wawancara meliputi beberapa hal mengenai hambatan/kendala dalam penerapan pembelajaran daring di sekolah, partisipasi dalam kehadiran dan menyelesaikan tugas selama pembelajaran daring, pentingnya pembelajaran luring dan persiapan pembelajaran luring di sekolah.



Gambar 2. Lokasi sekolah partisipan

D. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan lima orang guru sebagai narasumber diperoleh informasi sebagai berikut :

Hambatan/Kendala Dalam Penerapan Pembelajaran Daring di Sekolah

Hal yang dihadapi guru ketika memulai dan menerapkan proses PBM via daring diantaranya adalah

1. Akses internet tiap siswa dan ketersediaan gadget bagi mereka yang dirasa cukup mewah mengingat rata-rata siswa bukan dari kalangan menengah atas.
2. Karena ekonomi orang tuanya yang sebagian tidak mampu, maka sebagian siswa tidak dapat menggunakan HP setiap saat, terkadang meminjam HP ke saudara atau ke tetangganya.
3. Sinyal yang tidak stabil terutama di daerah pedesaan, menjadi salah satu alasan utama para siswa sulit menerima materi dengan tepat waktu dan menghambat proses pembelajaran.
4. Siswa bermalas-malasan / tidak disiplin waktu.
5. Ditambah para wali murid yang belum begitu memahami tata cara/prosedur PBM via daring.
6. Pada siswa kelas rendah (SD), lebih banyak peran ibu yang menggantikan anaknya untuk menjadi murid, mereka datang

ke sekolah untuk mengambil tugas per sub tema dan seminggu kemudian menyetorkan hasil tugas tersebut ke Sekolah.

7. Kebanyakan tugas dari Siswa SD yang mengerjakan adalah ibunya, tulisannya ya tulisan ibunya dan rata-rata nilainya 100, namun dalam hal ini ibunya merasa senang karena bisa mengenang dan mengingat pelajaran saat masih di bangku sekolah dulu.

Partisipasi Siswa dalam Kehadiran dan Penyelesaian Tugas Sekolah Saat Mengikuti Pembelajaran Daring

1. Alasan yang paling utama yang menghambat kelancaran pada kehadiran dan penyelesaian tugas dari siswa adalah kuota internet dan sinyal yang tidak begitu baik di lingkungan rumah mereka. Namun seiring berjalannya waktu, ketika ada bantuan dari pemerintah tentang kuota internet, memberi harapan cukup besar akan kelancaran kehadiran dan pengumpulan tugas dan pemberian materi.
2. Tidak semua murid dapat hadir dikarenakan HP yang tidak memadai, dan untuk tugas siswa setingkat SLTA diantarkan ke sekolah sesuai jadwal yang disepakati dengan guru yang bersangkutan.
3. Kurang disiplin waktu
4. Cara belajarnya tidak fokus
5. Kurangnya kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas

Tentang Pentingnya Penyelenggaraan Pembelajaran Luring/ Tatap Muka di Sekolah

1. Pembelajaran tatap muka atau yang dikenal luring (luar jaringan) adalah pembelajaran yang urgent dan utama, karena para guru bisa mengetahui sejauh mana kompetensi dan perkembangan afektif & psikomotorik secara langsung dari

para siswa. Sehingga kami dapat mengevaluasi dan membenahi kekurangan pada siswa dengan tepat dan efisien.

2. Materi pembelajaran dan Tindakan asesmen dapat berjalan dengan maksimal dan efektif ketika proses belajar mengajar dilakukan dengan luring / tatap muka.
3. Dapat menanamkan budi pekerti bagi para siswa
4. Saling mengenal antara warga sekolah satu dengan yang lainnya.
5. Pentransferan materi pelajaran pada siswa langsung dapat diterima dan dimengerti oleh murid yang bersangkutan.

Masalah yang Dihadapi Sekolah dalam Menghadapi Persiapan Pembelajaran Luring/Tatap Muka

1. Berbicara tentang masalah yang dihadapi sekolah di MTSS Al Hidayah terkait dengan persiapan pembelajaran luring/tatap muka adalah masalah pada penyediaan fasilitas proses yang belum maksimal seperti belum tersediannya tempat cuci tangan, belum adanya thermogun, dan penyediaan masker belum mencukupi, serta pemberian tanda jaga jarak dalam kelas agar yang tercipta kondisi yang physical distancing di tiap kelas dan tiap jenjang.
2. Pihak sekolah berusaha berikhtiar dan berdoa agar proses belajar mengajar yang nantinya secara luring/tatap muka dapat berjalan dengan baik dengan konsep 3M, karena masyarakat khususnya di Daerah Bangkalan banyak yang tidak percaya tentang keberadaan Covid-19 ini , hampir tidak ada masyarakat desa yang pakai masker dan angkutan umum di daerah Bangkalan yang juga ditumpangi siswa yang mau bersekolah juga masih berjubel, tanpa jarak tempat duduk serta banyak yang tidak memakai masker.

E. Solusi

Adapun solusi yang bisa dilakukan atas permasalahan yang telah disampaikan, adalah:

1. Permasalahan kurang disiplinnya siswa, kejujuran, serta kurang fokusnya siswa dalam mengikuti pembelajaran daring perlu adanya upaya guru untuk melakukan Morning Spirit pada siswanya di waktu-waktu tertentu , serta melaksanakan pembelajaran dengan cara yang lebih bervariasi supaya siswa lebih termotivasi dan tidak merasa jenuh, saat mengikuti pembelajaran daring.
2. Perlu adanya Sosialisasi dalam bentuk Parenting, Home visit untuk mengatasi permasalahan pembelajaran daring pada siswa kelas rendah.

Referensi

- Alfiyatin, Y. (2020). Efektivitas Pembelajaran Daring Dalam Pandangan Siswa MI Al-Falah
Bangkalan. *AL-IBRAH*, 5(2), 1-22.
- Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., & Toharudin, T. (2021, December). Learning loss akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19 di Indonesia. In *E-Prosiding Seminar Nasional Statistika| Departemen Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran* (Vol. 10, pp. 27-27).
- Fauzi, M. (2020). Strategi Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 STIT Al-Ibrohimy
Bangkalan. *Al-Ibrah*, 5(2), 120-145.
- Rifai, M. (2019). *Persepsi Da'i Madura tentang Perjudohan Dini: studi kasus di Pamekasan dan Sumenep* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sari, A. P., & Utami, N. (2019). Pengaruh Intensitas Penggunaan Internet Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMA Negeri 13 Kerinci. *Jurnal Wahana Konseling*, 2(1), 1-12.
- Susanti, D. I., & Prameswari, J. Y. (2020). Adaptasi Blended Learning di Masa Pandemi

- COVID-19 untuk Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar. *Lingua Susastra*, 1(2), 50-61
- Tirajoh, C. V., Munayang, H., & Kairupan, B. H. (2021). Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Kecemasan Orang Tua Murid di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Biomedik: JBM*, 13(1), 49-57
- VA, N. B. (2011). Faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(1), 43-55.

CHAPTER 7

Ketahanan Pondok Pesantren Dalam Menghadapi Masa Krisis Pandemi COVID-19 (Pasuruan Jawa Timur)

Oleh: Muhammad Saefi, M.Pd.

A. Pesantren di Tengah Pandemi COVID-19: Konteks dan Rasional

Virus SARS-COV-2 penyebab wabah coronavirus (COVID-19) teridentifikasi di Wuhan, China, pada 12 Maret 2020 [1]. Kurang lebih satu minggu kemudian menyebar ke sebagian besar negara dan mengakibatkan penutupan sekolah [2]. Tercatat hampir 1 miliar siswa terdampak keputusan penutupan sekolah [3]. Di Indonesia, pondok pesantren juga ditutup hingga pertengahan Juni 2020 [4].

Penutupan pondok pesantren sebenarnya didasarkan atas kondisi penularan COVID-19 yang masih tinggi di daerah [5]. Kemudian didukung oleh sejumlah data ilmiah yang menunjukkan bahwa membatasi pergaulan di kalangan santri dapat menghentikan penyebaran dan mengurangi tingkat kematian [3], [6], [7]. Namun, keputusan ini juga sangat beresiko dalam jangka waktu panjang, penutupan pondok pesantren dapat berdampak negatif karena santri terancam sebagai *loss academic generation* [8].

Dengan teknologi yang semakin maju, sebenarnya pembelajaran daring dapat menjadi *platform* yang sesuai dengan kebutuhan pesantren selama masa COVID-19 [9] [10]. Namun, perkembangan yang luar biasa dari pembelajaran daring tidaklah berpengaruh, pesantren menemui kendala besar untuk menerapkannya terkait sumber daya manusia dan infrastruktur yang kurang memadai [11]. Hambatan ini nampak sepenuhnya mencegah pemanfaatan pembelajaran daring dalam lingkungan pondok pesantren.

Disisi lain, efektivitas pendekatan dengan menutup pesantren diakui tidak begitu jelas, karena COVID-19 mempunyai dinamika transmisi yang berbeda [12], [13]. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dengan penutupan sekolah memiliki efektivitas yang kecil [14]–[16] bahkan tidak signifikan dalam menurunkan tingkat transmisi [17], [18]. Mempertimbangkan kondisi tersebut, dan adanya dukungan dari pemerintah daerah serta organisasi kemasyarakatan keagamaan, pemimpin pesantren akhirnya memilih untuk memulai kembali pembelajaran luring. Di Jawa Timur, pondok pesantren dibuka kembali secara bertahap mulai 16 Juni 2020 [4].

Namun, ketika pilihan itu diambil, ada masalah krusial yang dihadapi pesantren. Kapasitas asrama di pesantren umumnya terbatas; fasilitas mandi, cuci dan kakus yang digunakan bersama, serta sanitasi di lingkungan pesantren juga terbatas [4]. Dengan segala keterbatasan tersebut, justru pesantren mempunyai potensi besar menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Terbaru, penyebaran COVID-19 ditemukan di pondok pesantren di wilayah Gunungkidul, Yogyakarta dengan kasus 31 kasus [19]. Pertanyaan utama yang akan dibahas dalam makalah ini, bagaimana pondok pesantren dapat bertahan selama pandemi dan pasca COVID-19?

B. Pengumpulan Data

Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yang terdiri dari empat pengurus pondok pesantren merangkap menjadi pengajar (kode PP1-PP4) seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, dua pasang wali santri (kode OT1-OT4), dan dua orang santri laki-laki (kode S1 dan S2). Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Putra Darul Khoirot Sunan Bonang Kraton Kabupaten Pasuruan, selama dua hari, 21-22 Desember 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur selama \pm 30 menit. Pertanyaan wawancara mengacu pada empat dimensi pendidikan

yang menerima dampak dan tantangan akibat pandemi COVID-19, yakni kebijakan, struktural, sosial, dan finansial [20]. Hasilnya dianalisis menggunakan analisis konten menurut Bengsston [21], dengan level analisis manifes dan kode ditentukan secara deduktif. Untuk menghasilkan temuan yang reliabel, dilakukan *member check* dengan menanyakan kembali hasil yang ditemukan kepada partisipan [22].

C. Temuan

Tinjauan kualitatif dari konten tersebut dikelompokkan menjadi empat dimensi mendasar mengenai dampak dan tantangan pesantren akibat pandemi COVID-19 dari perspektif pengurus pondok pesantren, orang tua, dan santri terkait pembelajaran luring di pondok pesantren. Tabel 1 memberikan beberapa contoh respon yang diberikan oleh partisipan yang termasuk dalam keempat dimensi ini serta sub dimensi yang muncul dari masing-masing dimensi utama.

Tabel 1. Ringkasan analisis terhadap respon partisipan tentang pembelajaran luring selama pandemi COVID-19 di pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan

Tema	Sub tema	Respon terpilih	
		Langkah yang diambil	Masalah yang dihadapi
Kebijakan	Kontinuitas akademik	<p>“Kami mengambil keputusan untuk membuka kembali pesantren untuk memastikan santri tetap belajar, tidak ada pilihan bagi kami, dan pembelajaran daring tidak mungkin dilakukan” PP1</p> <p>“Kami mengambil keputusan membuka kembali pesantren karena pilihan daring mempunyai masalah</p>	<p>“Pembukaan pesantren akan bisa ditutup kapan saja, misalkan ada pelonjakan kasus positif di lingkungan pesantren dan sekitarnya, pembelajaran berlangsung dalam ketidakpastian” PP1</p>

dalam hal kompatibilitas, pendidikan pesantren membutuhkan pembelajaran langsung” PP4

Organisasi	“Sesuai dengan arahan Bupati bahwa pondok pesantren dibuka harus melakukan koordinasi dengan puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat” PP3	“Mekanisme koordinasi kurang jelas di antara pondok dan puskesmas, bahkan kami tidak mendapatkan informasi penting secara akurat dan cepat” PP3	
Komunikasi <i>stakeholders</i>	“Meskipun sulit, kami terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak” PP2	“Komunikasi kurang efektif, karena beberapa hal, pertama karena ketidakjelasan untuk menghubungi siapa, dan kedua, gaya kepemimpinan kyai di ponpes sangat dominan” PP2	
Struktural	Infrastruktur	“Kami lebih menyiapkan infrastruktur pendukung protokol kesehatan dibandingkan pembelajaran daring, walaupun dipaksakan daring masih akan banyak kendala seperti akses internet, dan tidak semua santri mampu” PP2	“infrastruktur yang terpenuhi hanya tempat cuci tangan dan pengukuran suhu, sementara untuk perluasan tempat untuk menjalankan social distancing belum dilakukan”PP2 “Bagaimana saya bisa menjaga jarak, sedangkan kebiasaan bersalaman dengan kyai masih terus dilakukan, termasuk oleh Ustadz saya, dari segi gedung

tidak ada perubahan, kami di asrama tetap melebihi kapasitas yang seharusnya” S2

Kemampuan pengajar	“Pembelajaran daring tidak dilakukan karena Ustadz tidak familiar dengan pembelajaran menggunakan teknologi, selain itu, kegiatan pembelajaran pesantren tidak cocok dengan daring, aneh saja, jadi selama daring kami memfokuskan untuk Ustadz bisa mengarahkan santri tetap menerapkan protokol kesehatan” PP4	“Tentu, saya sebagai pengajar pula disini, terus mengarahkan santri untuk menerapkan protokol kesehatan, walaupun kami akui dengan gedung pesantren seperti ini sangatlah sulit, dan santri mulai ada yang bosan menggunakan masker” PP4 “Tempat cuci tangan ada, tapi saya sendiri hampir tidak menggunakannya lagi, bahkan kalau berkumpul dengan teman, saya lebih sering tidak menggunakan masker” S1
--------------------	--	--

Kalender akademik	“Terdapat sejumlah perubahan kegiatan besar di pondok pesantren, mulai dari mempersingkat jam pelajaran, meniadakan acara pengajian besar, dan acara akhir tahun” PP3	“Jam pelajaran yang lebih singkat, membuat beberapa tujuan pembelajaran tidak tercapai bahkan penundaan pembukaan pesantren telah membuat banyak sekali ketertinggalan” PP3 “Peniadaan acara akhir tahun membuat saya kecewa, seperti tidak ada batas kapan pembelajaran berakhir dan dimulai kembali,
-------------------	---	---

hal ini membuat saya kurang termotivasi untuk belajar lebih giat lagi” S2

Sosial	Dukungan pesantren	“Terus terang kami belum mempunyai konselor sejenis guru BK yang ahli seperti di sekolah pada umumnya, tetapi berbekal dari pengalaman sebelum pandemi biasanya santri mengkonsumsi makanan tanpa memperhatikan gizi, jadi kami fokus untuk terus menghimbau orang tua dan santri untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi” PP1	“Kebanyakan dari santri kami berasal dari ekonomi menengah kebawah sehingga dengan ekonomi yang semakin sulit seperti ini, makanan bukan menjadi salah satu prioritas, dan pesantren juga tidak mempunyai cukup dana untuk memberikan bantuan makanan” PP1 “Saya konsumsi apa yang biasanya, dengan pandemi ini, tidak lantas membuat saya lebih memperhatikan apa yang saya makan” S2 “Saya cukup stres karena bertemu dengan orang tua dibatasi apalagi harus izin pulang, diizinkan tapi tidak seleluasa dulu” S1
	Dukungan orang tua	“Kami secara penuh mendukung pesantren untuk dibuka kembali, karena kalau di rumah, saya tidak bisa mengarahkan dan membelajarkan mereka, tentu karena saya tidak punya cukup waktu dan tidak tau bagaimana caranya, termasuk	“Ketika berada di rumah, sebelum pondok pesantren dibuka kembali, anak saya lebih banyak bermain di luar rumah, dan bermain <i>handphone</i> , tidak ada yang bisa saya perbuat lebih banyak, karena saya juga tidak mau anak saya stres selama berada di

		tidak mempunyai alat memadai, pokoknya setelah pondok dibuka, kami tetap mengunjungi anak saya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan” OT2	rumah, makanya saya mendukung pembukaan pesantren” OT1
Finansial	Dukungan finansial	<p>“Kami tidak memberikan bantuan apapun kepada santri apalagi dalam bentuk dana, biasanya malah orang tua yang memberikan sumbangan ke pondok pesantren” PP4</p> <p>“Biasanya kami memberikan bantuan secara sukarela ke pondok untuk pembangunan fisik gedung, tapi untuk tahun ini, sepertinya belum ada, mungkin mereka memahami bahwa wali santri juga kesulitan dalam hal keuangan” OT4</p>	<p>“Seperti yang saya bilang tadi, bahwa dengan berkurangnya pemasukan pesantren, karena tidak ada bantuan dari orang tua, maka tidak cukup untuk meneruskan pembangunan pesantren, sebenarnya ada dana bantuan dari pemda, tapi itu juga tidak mungkin hanya untuk pembangunan fisik pondok” PP4</p>
	Anggaran belanja	<p>“Karena pemasukan pesantren sangat kurang, jadi anggaran belanja perlu penyesuaian, alokasi lebih banyak pada fasilitas protokol kesehatan dan tunjangan bagi pengajar” PP3</p>	<p>“Kami tidak punya dana cukup untuk kebutuhan yang tak terduga dan kritis” PP3</p>

Investasi	“Untuk investasi, sebenarnya pesantren kami telah merintis usaha koperasi seperti BMT sidogiri, tapi masih dalam skala yang kecil, jauh lebih kecil dibandingkan BMT” PP2	“Ketika masa pandemi, omsetnya juga sangat berkurang, jadi ini adalah pelajaran penting bagi kami termasuk dalam hal investasi” PP2
-----------	---	---

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasi dampak dan tantangan yang dialami oleh pondok pesantren selama krisis COVID-19. Penting untuk memahami permasalahan ini agar pemerintah dan pengambil kebijakan dapat mengembangkan solusi untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi ketahanan pondok pesantren. Dari hasil analisis, terlihat jelas bahwa banyak hambatan yang dihadapi oleh pondok pesantren sangat kompleks, mulai dari hambatan pada dimensi kebijakan hingga masalah finansial di semua subdimensi.

Hambatan penerapan pembelajaran daring di pondok pesantren

Terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan pembelajaran daring tidak bisa diterapkan di pesantren, yakni faktor orang tua, guru (*ustadz/ustadzah*), dan pesantren. Pertama, ketika santri diharuskan untuk tetap di rumah, seperti yang terjadi pada awal pandemi COVID-19, orang tua tidak hanya harus memperhatikan tentang pola asuh yang baik, tapi juga harus memberikan pendidikan dan pengajaran yang layak selama di rumah. Selain itu, mereka juga harus memantau emosi dan motivasi belajar anak. Orang tua harus berusaha seefektif mungkin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak selama di rumah. Ini artinya, orang tua menghadapi akumulasi

stres karena perubahan peran dan tugas yang mendadak [23]. Disisi lain, mereka mempunyai keterbatasan mulai dari keterbatasan perangkat teknologi, waktu, keahlian, ditambah lagi dengan sejumlah pendekatan yang beragam di setiap mata pelajaran yang tentunya tidak dapat diikuti oleh orang tua dengan mudah [24], [25]. Artinya, orang tua mempunyai hambatan pribadi yakni kurangnya pelatihan dan dukungan, kurangnya keahlian dalam hal teknologi, komunikasi yang tidak memadai, dan kurangnya kemampuan pedagogis.

Kedua, penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan pribadi merupakan jenis penghalang yang paling nyata bagi guru. Kurangnya pelatihan dalam penerapan daring adalah hambatan yang paling sering dilaporkan. Selaras seperti yang disampaikan oleh Irvin dkk. [25] bahwa kurangnya profesional terlatih dan tidak adanya personel yang mampu mengelola pembelajaran daring adalah penghalang umum. Rahasia sukses pembelajaran daring adalah dilakukan dengan cara yang menarik. Dengan demikian, sangat jelas bahwa tanpa keahlian yang memadai, pembelajaran daring tidak akan dapat dilakukan dengan optimal. Guru harus memiliki pemahaman terhadap teknologi [26], [27].

Ketiga, dalam penelitian ini, beberapa respon mengungkapkan bahwa ada hubungan antara hambatan logistik dan pembelajaran daring di pondok pesantren. Hambatan ini termasuk kesulitan dalam hal kurangnya persiapan, keterbatasan infrastruktur, ketidakpuasan dengan modalitas pembelajaran daring, dan ketidakmampuan pembelajaran daring untuk memenuhi kebutuhan santri [28]. Ada masalah dalam hal kompatibilitas antara pendidikan keagamaan dan pembelajaran daring. Secara garis besar, analisis kami menunjukkan pola yang jelas bahwa penerapan pembelajaran daring di pesantren menemui dua hambatan utama, yakni hambatan logistik (yaitu, sulit untuk menerapkan pembelajaran daring), dan hambatan pribadi (yaitu, kurangnya pelatihan pada pengajar).

Urgensi penyelenggaraan pembelajaran luring di pondok pesantren

Pendidikan pesantren memiliki ciri khas tersendiri [4]. Pertama, berhubungan penguasaan agama seperti tafsir Al-Qur'an, penguasaan hadist Nabi, dan tata cara ibadah. Kedua, pendidikan pesantren menitikberatkan pada penanaman dan internalisasi nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam. Ketiga, kehidupan pesantren menekankan pada pilar belajar hidup bersama (*learning to live together*), sejak awal mereka dibiasakan untuk hidup bersama dan saling menghargai. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pola pembelajaran dengan menerapkan hidup Islam dan belajar hidup bersama dalam kerangka nilai-nilai Islam seperti ini tidak bisa dilatihkan secara daring, tetapi harus langsung melalui pengalaman di pesantren.

Praktik pembelajaran semacam itu juga tidak bisa ditunda hingga pandemi COVID-19 selesai tanpa ada kepastian kapan pandemi itu berakhir. Justru, dengan penundaan dan peniadaan beberapa agenda dalam kalender akademik membuat santri kecewa, yang pada gilirannya membuat motivasi belajar turun. Seperti yang telah dijelaskan oleh penundaan dimulainya aktivitas pendidikan di pesantren dapat menyebabkan santri mengalami depresi karena kurangnya rutinitas [29]. Hilangnya rutinitas sehari-hari pada santri [30], ditambah lagi kewajiban menjalankan karantina di rumah sebelum kembali ke pondok pesantren akan memperburuk kesehatan mental [31]. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Ifdil [32] menunjukkan bahwa tingkat kecemasan remaja selama pandemi sangat tinggi.

Dengan kata lain, jikalau pun infrastruktur teknologi pembelajaran daring tersedia dengan layak, disertai dengan keahlian teknologi pengajar dan orang tua, pendidikan keagamaan di pesantren masih akan memiliki masalah kompatibilitas dengan pembelajaran daring. Setidaknya, kami mencatat tiga hal terkait dengan masalah ini yakni sebagai berikut.

- 1) Pembelajaran daring memberikan kesempatan yang lebih tinggi kepada santri untuk melakukan penyimpangan dan perilaku tidak

etis, misalnya mencontek dan melakukan hafalan dengan membaca [33], [34].

- 2) Komunikasi verbal dan non-verbal penting dalam pembelajaran agama [35]. Seringkali, pembelajaran daring mengenyampingkan empati. Sementara itu, prinsip dari pembelajaran agama adalah metode dari “hati ke hati” [36], dimana hubungan antara guru dan santri diwakili kebaikan dan simpati [37]. Dengan pembelajaran daring, hubungan ruhaniyah antara guru dan santri akan melemah [38].
- 3) Santri memiliki persepsi bahwa teknologi dalam pembelajaran agama tidak terlalu dibutuhkan [35]. Dengan demikian, ada potensi bahwa pembelajaran daring tidak selalu cocok untuk kelompok pembelajar tertentu, terutama bagi santri yang membutuhkan belajar secara langsung di pondok pesantren.

Dengan demikian, meskipun terdapat banyak keuntungan yang didapatkan dengan pembelajaran daring terutama dalam masa krisis COVID-19 ini, modalitas pembelajaran ini juga memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran keagamaan di pesantren yang sangat lekat dengan proses pembelajaran tradisional. Dalam pembelajaran tradisional pesantren, relasi terapeutik antara kyai dan santri sangat ditekankan [38]. Pembelajaran luring secara tidak langsung memberikan dukungan sosial tersendiri, dimana secara psikologis santri merasa lebih aman. Oleh karena itu, pesantren menilai pembukaan kembali pembelajaran tatap muka di pesantren adalah pilihan yang terbaik.

Masalah yang dihadapi pondok pesantren selama pembelajaran luring

Berdasarkan sejumlah fakta adanya kluster COVID-19 di sejumlah pondok pesantren, serta penjelasan yang diberikan pengurus pesantren bahwa penerapan protokol kesehatan sangat sulit diterapkan oleh

santri, maka dapat dikatakan bahwa pencegahan pondok pesantren menjadi klaster baru adalah masalah utama yang dihadapi. Wrighton & Lawrence [39] menjelaskan bahwa membiarkan santri berkumpul tanpa penerapan *social distancing* yang ketat adalah tindakan tidak bertanggung jawab. Jadi, strategi yang diterapkan pondok pesantren dalam pembukaan kembali pembelajaran luring masih belum maksimal karena tidak mampu menerapkan *social distancing* dengan baik [23], [40]

Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa membiayai penerapan protokol kesehatan merupakan kendala lain yang dihadapi oleh pondok pesantren karena membeli peralatan cuci tangan, sabun, dan pengukur suhu badan dalam jumlah yang besar dan biaya melakukan perluasan gedung dan asrama dapat menimbulkan tantangan finansial. Sebenarnya, bantuan keuangan dapat digunakan untuk membeli peralatan yang mendukung protokol kesehatan. Pemerintah pusat sendiri juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk 21.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia [4]. Meskipun demikian, dengan kebutuhan finansial yang tinggi disertai pemasukan dan bantuan orang tua yang jauh berkurang, maka pendanaan terkait dengan penerapan *social distancing* tetap dilihat sebagai penghalang. Ukuran asrama pesantren saat ini jauh dari apa yang dipersyaratkan. Menurut Wise [41], rasio santri dan luas bangunan adalah 1:3 meter, sementara di pesantren saat ini masih kurang dari 1:2 meter.

Di tengah keterbatasan ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pesantren untuk fokus pada pengajaran yang menekankan pentingnya protokol kesehatan adalah solusi sementara yang tepat. Prinsip pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 adalah tidak memaksakan siswa untuk memenuhi semua target [42]. Guru hanya menyediakan materi yang relevan dengan keadaan [43]. Jadi, yang perlu dilakukan oleh guru adalah mengajarkan santri berkaitan dengan *social distancing* [44] dan *hygiene sanitation* [45].

Pergeseran pola dan gaya kepemimpinan sebagai kunci utama ketahanan pesantren

Untuk menghilangkan sejumlah hambatan tersebut, beberapa modifikasi diperlukan, terutama pola dan gaya kepemimpinan Kyai. Telah dijelaskan dalam temuan, bahwa pola dan gaya kepemimpinan Kyai di pesantren yang karismatik, dominan, dan personal [46] memberikan kesulitan dalam melakukan koordinasi. Pola dan gaya kepemimpinan ini tidak akan mampu membawa pondok pesantren melalui masa krisis COVID-19 [47]. Kyai perlu merubah pola kepemimpinannya menjadi lebih demokratis dan fleksibel [48]. Dengan kata lain, Kyai harus menerapkan pola kepemimpinan yang setara, tersebar, terkoneksi, dan kolaborasi [49]. Dengan pola kepemimpinan ini, maka diharapkan hambatan dalam komunikasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* dan otoritas kesehatan akan teratasi, sehingga timbul kebutuhan untuk menumbuhkan pemahaman dalam pembuatan kebijakan bersama [50].

E. Simpulan

Pelaksanaan pembelajaran daring memiliki masalah kompatibilitas sehingga tidak dapat diterapkan. Pembelajaran daring juga bermasalah dalam hal modalitas sehingga tidak dapat menggantikan pembelajaran tatap muka di pondok pesantren. Santri membutuhkan interaksi langsung dan pengalaman langsung melalui pembelajaran tatap muka dan kehadiran secara fisik di pesantren. Proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan oleh pesantren di tengah pandemi COVID-19 tetap perlu diwaspadai karena penerapan protokol kesehatan di pondok pesantren masih longgar dan sulit untuk menerapkan *social distancing*. Pemberian dana bantuan yang lebih besar perlu dilakukan untuk menyediakan lingkungan pondok pesantren yang sesuai dengan standar dan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, pergeseran pola dan gaya kepemimpinan kyai dari pola normal (karismatik) ke

pola krisis (progresif) perlu dilakukan untuk memberikan ketahanan bagi pesantren sehingga dapat melewati masa krisis ini, dan mendapatkan posisi lebih baik setelah masa krisis ini selesai.

Referensi

- [1] World Health Organization, “WHO Director-General’s opening remarks at the Mission briefing on COVID-19 - 19 March 2020,” *World Health Organization*, 2020. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---19-march-2020> (accessed Dec. 23, 2020).
- [2] UNESCO, “Interim Guidance for COVID-19 Prevention and Control in Schools,” 2020. <https://www.unicef.org/reports/key-messages-and-actions-coronavirus-disease-covid-19-prevention-and-control-schools> (accessed Jul. 04, 2020).
- [3] S. Abuhammad, O. F. Khabour, and K. H. Alzoubi, “COVID-19 Contact-Tracing Technology: Acceptability and Ethical Issues of Use,” *Patient Prefer. Adherence*, vol. Volume 14, pp. 1639–1647, Sep. 2020, doi: 10.2147/PPA.S276183.
- [4] A. M. Fahham, “Learning at Islamic Boarding Schools During Covid-19 Pandemic Period,” *Social Welfare Division*, vol. 12, no. 14, pp. 13–18, 2020.
- [5] S. Setiati and M. K. Azwar, “COVID-19 and Indonesia,” *Acta Medica Indones.*, vol. 51, no. 1, pp. 84–89, 2020.
- [6] R. M. Anderson, H. Heesterbeek, D. Klinkenberg, and T. D. Hollingsworth, “How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?,” *The Lancet*, vol. 395, no. 10228, pp. 931–934, Mar. 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30567-5.
- [7] C. Wenham, J. Smith, and R. Morgan, “COVID-19: the gendered impacts of the outbreak,” *The Lancet*, vol. 395, no. 10227, pp. 846–848, Mar. 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(20)30526-2.
- [8] A. Harris and M. Jones, “COVID 19 – school leadership in disruptive times,” *Sch. Leadersh. Manag.*, vol. 40, no. 4, pp. 243–247, Aug. 2020, doi: 10.1080/13632434.2020.1811479.

- [9] W. H. Hannum, M. J. Irvin, P.-W. Lei, and T. W. Farmer, "Effectiveness of using learner-centered principles on student retention in distance education courses in rural schools," *Distance Educ.*, vol. 29, no. 3, pp. 211–229, Nov. 2008, doi: 10.1080/01587910802395763.
- [10] M. B. Cahapay, "Rethinking Education in the New Normal Post-COVID-19 Era: A Curriculum Studies Perspective," *Aquademia*, vol. 4, no. 2, p. ep20018, Jun. 2020, doi: 10.29333/aquademia/8315.
- [11] M. Muazza, A. Mukminin, A. Habibi, and M. Hidayat, "Education in Indonesian Islamic Boarding Schools: Voices on Curriculum and Radicalism, Teacher, and Facilities," *Islam. Q.*, vol. 62, no. 4, pp. 507–536, 2018.
- [12] J. Bayham and E. P. Fenichel, "Impact of school closures for COVID-19 on the US health-care workforce and net mortality: a modelling study," *Lancet Public Health*, vol. 5, no. 5, pp. e271–e278, May 2020, doi: 10.1016/S2468-2667(20)30082-7.
- [13] K. Shen *et al.*, "Diagnosis, treatment, and prevention of 2019 novel coronavirus infection in children: experts' consensus statement," *World J. Pediatr.*, vol. 16, no. 3, pp. 223–231, Jun. 2020, doi: 10.1007/s12519-020-00343-7.
- [14] S. Bin Nafisah, A. H. Alamery, A. Al Nafesa, B. Aleid, and N. A. Brazanji, "School closure during novel influenza: A systematic review," *J. Infect. Public Health*, vol. 11, no. 5, pp. 657–661, Oct. 2018, doi: 10.1016/j.jiph.2018.01.003.
- [15] C. Jackson, P. Mangtani, J. Hawker, B. Olowokure, and E. Vynnycky, "The Effects of School Closures on Influenza Outbreaks and Pandemics: Systematic Review of Simulation Studies," *PLOS ONE*, vol. 9, no. 5, p. e97297, 2014, doi: 10.1371/journal.pone.0097297.
- [16] R. M. Viner *et al.*, "School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review," *Lancet Child Adolesc. Health*, vol. 4, no. 5, pp. 397–404, May 2020, doi: 10.1016/S2352-4642(20)30095-X.
- [17] S. Lai *et al.*, "Effect of non-pharmaceutical interventions for containing the COVID-19 outbreak in China," *medRxiv*, Mar. 2020, doi: 10.1101/2020.03.03.20029843.

- [18] H. Tian *et al.*, “The impact of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China,” *medRxiv*, p. 2020.01.30.20019844, Mar. 2020, doi: 10.1101/2020.01.30.20019844.
- [19] “31 Santri Pondok Pesantren di Gunungkidul Positif Covid-19,” *iNewsYogya.id*, Yogyakarta, Indonesia, Dec. 20, 2020.
- [20] J. Youssef, A. Alyousef, D. Hamid, L. Kuznezov, and N. Choucair, “Education in the New Normal: Education Leadership Response to COVID-19,” Oliver Wayman, 2020. [Online]. Available: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2020/jun/Education_In_The_New_Normal.pdf.
- [21] M. Bengtsson, “How to plan and perform a qualitative study using content analysis,” *NursingPlus Open*, vol. 2, pp. 8–14, Jan. 2016, doi: 10.1016/j.npls.2016.01.001.
- [22] M. Catanzaro, “Using Qualitative Analytical Techniques,” in *Nursing Research: Theory and Practice*, N. Woods and M. Catanzaro, Eds. St Louis: Mosby Incorporated, 1988, pp. 437–456.
- [23] OECD, “Coronavirus special edition: Back to school,” May 2020, doi: <https://doi.org/10.1787/339780fd-en>.
- [24] C. Brom, J. Lukavsky, D. Greger, T. Hannemann, J. Straková, and R. Švaříček, “Mandatory Home Education during the COVID-19 Lockdown in the Czech Republic: A Rapid Survey of 1st-9th Graders’ Parents,” *PsyArXiv*, preprint, Apr. 2020. doi: 10.31234/osf.io/fbhn3.
- [25] M. J. Irvin, W. H. Hannum, C. de la Varre, and T. W. Farmer, “Barriers to Distance Education in Rural Schools,” *Q. Rev. Distance Educ.*, vol. 11, no. 2, pp. 73–90, 2010.
- [26] J. Obana, “Could educational technology be a ‘holy grail’ amid Covid-19 crisis?,” *The Manila Times*, Mar. 18, 2020. <https://www.manilatimes.net/2020/03/18/business/columnists-business/could-educational-technology-be-a-holy-grail-amid-covid-19-crisis/704202/> (accessed Jul. 04, 2020).
- [27] W. Olivier, “Education post-COVID-19: customised blended learning is urgently needed,” *The Conversation*, 2020. <http://theconversation.com/education-post-covid-19-customised-blended-learning-is-urgently-needed-138647> (accessed Jul. 04, 2020).

- [28] S. Lloyd, T. McCoy, and M. Byrne, "Faculty perceived barriers to online education," *MERLOT J. Online Learn. Teach.*, vol. 8, pp. 1–12, Jan. 2012.
- [29] K. Brazendale *et al.*, "Understanding differences between summer vs. school obesogenic behaviors of children: the structured days hypothesis," *Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act.*, vol. 14, no. 1, p. 100, Dec. 2017, doi: 10.1186/s12966-017-0555-2.
- [30] YoungMinds, "Coronavirus: Impact on young people with mental health needs," 2020. [Online]. Available: https://youngminds.org.uk/media/3708/coronavirus-report_march2020.pdf.
- [31] G. Sprang and M. Silman, "Posttraumatic Stress Disorder in Parents and Youth After Health-Related Disasters," *Disaster Med. Public Health Prep.*, vol. 7, no. 1, pp. 105–110, Feb. 2013, doi: 10.1017/dmp.2013.22.
- [32] L. Fitria and I. Ifdil, "Kecemasan remaja pada masa pandemi Covid -19," *J. Educ. J. Pendidik. Indones.*, vol. 6, no. 1, p. 1, Jul. 2020, doi: 10.29210/120202592.
- [33] K. Musbahtiti, M. Saady, and A. Muhammad, *Comprehensive e-Learning system based on Islamic principles*. 2013, p. 5.
- [34] M. Hoque, A. M. Yusoff, A. K. Toure, and Y. Mohamed, "Teaching Hadith Subjects through E-Learning Methods: Prospects and Challenges," *Int. J. Acad. Res. Progress. Educ. Dev.*, vol. 8, no. 2, p. Pages 507-514, Mar. 2019, doi: 10.6007/IJARPED/v8-i2/6164.
- [35] Y. Hanafi, N. Murtadho, A. R. Hassan, M. A. Ikhsan, and T. N. Diyana, "Development and validation of a questionnaire for teacher effective communication in Qur'an learning," *Br. J. Relig. Educ.*, pp. 1–11, Dec. 2019, doi: 10.1080/01416200.2019.1705761.
- [36] M. S. Salleh, "Strategizing Islamic Education," *Int. J. Educ. Res.*, vol. 1, no. 6, pp. 1–14, 2013.
- [37] C. Alkoutli, "Pedagogies in Becoming Muslim: Contemporary Insights from Islamic Traditions on Teaching, Learning, and Developing," *Religions*, vol. 9, no. 11, p. 367, Nov. 2018, doi: 10.3390/rel9110367.

- [38] S. Arifin, "Dinamika Perubahan Relasi Kiai Santri Pada 'Ngaji Online' Di Masa Pagebluk Covid-19," *J. Kependud. Indones.*, no. Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, pp. 75–80, 2020.
- [39] M. S. Wrighton and S. J. Lawrence, "Reopening Colleges and Universities During the COVID-19 Pandemic," *Ann. Intern. Med.*, Jul. 2020, doi: 10.7326/M20-4752.
- [40] L. Uscher-Pines *et al.*, "School practices to promote social distancing in K-12 schools: review of influenza pandemic policies and practices," *BMC Public Health*, vol. 18, no. 1, p. 406, Dec. 2018, doi: 10.1186/s12889-018-5302-3.
- [41] J. Wise, "Covid-19: Delaying school reopening by two weeks would halve risks to children, says iSAGE," *BMJ*, p. m2079, May 2020, doi: 10.1136/bmj.m2079.
- [42] S. J. Daniel, "Education and the COVID-19 pandemic," *PROSPECTS*, Apr. 2020, doi: 10.1007/s11125-020-09464-3.
- [43] W. Bao, "COVID-19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University," *Hum. Behav. Emerg. Technol.*, vol. 2, no. 2, pp. 113–115, Apr. 2020, doi: 10.1002/hbe2.191.
- [44] M. E. Flannery, "How Teachers Are Integrating COVID-19 Crisis Into Their Lessons," *NEA Today*, Apr. 22, 2020. <http://neatoday.org/2020/04/22/teaching-about-coronavirus/> (accessed Jul. 04, 2020).
- [45] S. Goser, "Innovative Ways to Make Coronavirus a Teachable Moment," *Edutopia*, 2020. <https://www.edutopia.org/article/innovative-ways-make-coronavirus-teachable-moment> (accessed Jul. 04, 2020).
- [46] N. A. R. Alam, "Strengthening Leadership Culture (The Role of Kyai in Indonesian Pesantren)," *-Tadib*, vol. 13, no. 1, pp. 5–17, Jun. 2018, doi: 10.21111/at-tadib.v13i1.1986.
- [47] K. M. Dirani *et al.*, "Leadership competencies and the essential role of human resource development in times of crisis: a response to Covid-19 pandemic," *Hum. Resour. Dev. Int.*, vol. 23, no. 4, pp. 380–394, Aug. 2020, doi: 10.1080/13678868.2020.1780078.
- [48] L. Smith and D. Riley, "School leadership in times of crisis," *Sch. Leadersh. Manag.*, vol. 32, no. 1, pp. 57–71, Feb. 2012, doi: 10.1080/13632434.2011.614941.

- [49] A. Harris, “COVID-19 – school leadership in crisis?,” *J. Prof. Cap. Community*, vol. 5, no. 3/4, pp. 321–326, Jul. 2020, doi: 10.1108/JPCC-06-2020-0045.
- [50] C. M. Weible *et al.*, “COVID-19 and the policy sciences: initial reactions and perspectives,” *Policy Sci.*, vol. 53, no. 2, pp. 225–241, Jun. 2020, doi: 10.1007/s11077-020-09381-4.

CHAPTER 8

Pembelajaran di Tengah Pandemi: Memastikan Pemahaman Siswa Tetap Merata Meskipun Berada di Lokasi Berbeda: (Studi Kasus pada Guru Sains di Karesidenan Surakarta Jawa Tengah)

Oleh: Rahmania Pamungkas, M.Pd.

A. Pendahuluan

Penyakit *coronavirus* 2019 (COVID-19) terdeteksi di China pada Desember 2019, menyebar ke seluruh dunia dalam beberapa bulan dan dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020. Sekolah di seluruh dunia harus menutup sekolahnya dan mengalihkan semua program akademik mereka secara online (Bao, 2020). Banyak sekolah yang tidak siap dengan adanya transisi dari pendidikan berbasis kelas ke pendidikan online sepenuhnya. Sebagian besar sekolah kekurangan infrastruktur dan strategi (Zhang, Wang, Yang, & Wang, 2020).

Di Indonesia telah banyak kemajuan teknologi pendidikan beberapa dekade terakhir dan hal yang sama terbukti sangat berguna selama pandemi ini (Chatterjee & Chakraborty, 2020; Dhawan, 2020). Beberapa platform online untuk mendukung pendidikan online telah tersedia (Nash, 2020). Meski demikian, menjadi tantangan bagi sekolah dan pendidik untuk memetakan kegiatan pendidikannya di ruang online. Selain itu, guru dan siswa menghadapi berbagai masalah logistik, teknis, keuangan, dan sosial (Lassoued, Alhendawi, & Bashitialshaaer, 2020; Peters et al., 2020).

Pandemi dan pembatasan berbagai kegiatan di banyak sektor telah mempengaruhi kesehatan mental orang di seluruh dunia. Banyak siswa yang menderita stres dan kecemasan (Cao et al., 2020;

Islam, Barna, Raihan, Khan, & Hossain, 2020). Masalah psikologis seperti itu seringkali menghalangi siswa untuk beradaptasi dengan pendidikan online. Selain itu, tidak semua siswa memiliki akses dan keahlian yang sama pada teknologi digital. Meskipun beberapa permasalahan tersebut sudah ada sebelumnya, namun pandemi COVID-19 semakin memberikan gambaran yang jelas akan adanya kesenjangan digital di masyarakat (Jæger & Blaabæk, 2020).

Selama ini di seluruh SMP dan SMA baik negeri maupun swasta di kota Surakarta masih menggunakan kelas reguler dengan kegiatan belajar tatap muka antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Program akademik sekolah didasarkan pada kegiatan berbasis ruang kelas dan laboratorium yang intens. Kemudian terjadi penutupan sekolah secara nasional dimulai pada 24 Maret 2020. Sulit untuk segera memindahkan semua aktivitas akademik ini secara online. Selain itu, situasi diasumsikan akan segera normal kembali dan sekolah dapat dibuka kembali dalam beberapa minggu. Sebagai tindakan sementara, guru-guru berupaya merekomendasikan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring dengan memanfaatkan berbagai media online untuk menunjang kegiatan belajar seperti *Google Doc*, *WhatsApp group*, dan belajar dari berbagai sumber daya online yang telah ada (kanal edukasi di TVRI, Rumah Pintar, dsb). Sementara itu, sekolah mengatur ulang strategi proses belajar mengajarnya dan kegiatan akademik dipindahkan ke platform online meskipun dengan beberapa modifikasi. Para guru dan siswa secara bertahap beradaptasi dengan skenario tersebut. Para guru sekarang menggunakan *Google classroom* untuk membagikan materi dan informasi terkait pembelajaran mereka, dan menyampaikan kuliah langsung melalui *Google Meet* atau *Zoom*. Para guru biasanya menggunakan program presentasi seperti *PowerPoint* untuk menyebarkan menyampaikan materi.

Selanjutnya dilakukan survei awal kepada 12 guru dan 30 siswa siswi SMP dan SMA di Surakarta tentang pendapat mereka tentang

pendidikan online selama pandemi COVID-19. Secara khusus, survei yang dilakukan yaitu mengenai pendapat siswa tentang penyampaian materi dan interaksi dalam pendidikan online. Semua siswa setuju bahwa sistem pendidikan online ini bisa membantu mereka untuk tetap bisa melanjutkan belajar selama pandemi. Semua guru yang diwawancarai juga menyatakan bahwa sekolah sekarang terus berusaha untuk menggunakan strategi yang inovatif untuk memastikan kelanjutan pendidikan bagi siswanya. Guru sekarang menyampaikan materi pembelajaran melalui berbagai platform. Guru menggunakan platform pendidikan online, perangkat lunak konferensi video, dan media sosial untuk mengajar. Platform pendidikan online, seperti *Google Classroom* dan *Zoom*, memungkinkan guru untuk berbagi catatan dan sumber daya multimedia yang berkaitan dengan materi dengan siswa. Platform pendidikan online juga memungkinkan siswa untuk bisa mengumpulkan tugas mereka dan guru bisa memantau kemajuan belajar siswa. Alat konferensi video, seperti *Google Meet*, *Zoom*, dan *Microsoft Teams* juga telah membantu penyelenggaraan pembelajaran online untuk mendukung kegiatan diskusi. Beberapa sekolah seperti SMAN 1 dan SMAN 3 Surakarta juga mengunggah materi pelajaran melalui situs web sekolah dan sistem manajemen pembelajaran mereka sendiri. Selain itu, guru juga menggunakan bantuan fasilitas laboratorium virtual di platform *Rumah Pintar* untuk mengajar mata pelajaran. Laboratorium virtual memungkinkan siswa untuk mensimulasikan eksperimen yang terkait dengan materi secara online (Diaz & Walsh, 2020; Vasiliadou, 2020).

Dengan berbagai upaya adaptasi pembelajaran daring yang telah dilakukan, namun tentu masih ada kekurangan tentang seberapa efisien siswa dapat berinteraksi dengan guru dan sesama siswa melalui berbagai alat online dan seberapa efektif teknik penilaian online yang telah dilakukan. Penelitian survei ini bertujuan untuk melihat tentang masalah ini.

B. Metode

Kuesioner

Kuesioner yang digunakan terdiri dari 19 item pernyataan terkait pembelajaran online selama pandemi COVID-19 (Tabel 1). Seorang siswa diminta untuk menanggapi setiap pernyataan pada skala “Ya” dan “Tidak”. Pernyataan tersebut terkait dengan proses belajar mengajar secara umum, penyampaian konten pembelajaran, interaksi siswa, penilaian dan kesehatan dan dampak sosial dari pendidikan online. Kuesioner diberikan kepada 158 siswa SMP dan SMA di Kota Surakarta pada tanggal 08 Desember 2020 dan terus menerima tanggapan mereka selama satu bulan.

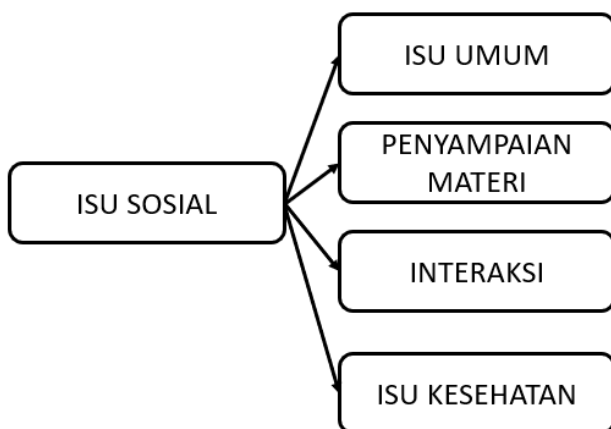
Tabel. 1. Daftar pernyataan

<i>Umum</i>	
U1	Pembelajaran berlangsung lebih baik di ruang kelas fisik daripada melalui online
U2	Para guru telah meningkatkan keterampilan mengajar online mereka sejak awal pandemi COVID-19
U3	Pendidikan online adalah alternatif yang layak selama pandemi COVID-19
<i>Penyampaian materi</i>	
M1	Bahan pelajaran yang memadai tersedia secara online
M2	Penggunaan Powerpoint dapat membantu KBM lebih informatif
M3	Perangkat lunak untuk mencatat membantu dalam berbagi diskusi materi antara guru dan siswa
M4	Pemanfaatan <i>platform online</i> bisa memberdayakan keterampilan pemecahan masalah
<i>Interaksi</i>	
I1	Interaksi guru dengan siswa berlangsung lebih baik di ruang kelas fisik daripada melalui <i>platform online</i> .

I2	Jika guru menjelaskan dengan penggunaan aplikasi online (presentasi, share screen, menulis dengan pena digital) membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih interaktif
I3	Jika guru dan siswa menunjukkan wajah mereka, maka kegiatan pembelajaran menjadi lebih interaktif
I4	Jika guru mengizinkan siswa untuk mengirim komentar di <i>chatbox</i> selama kegiatan pembelajaran, maka itu menjadi interaktif
Penilaian	
P1	Tes dan kuis <i>online</i> secara efektif mengevaluasi pengetahuan siswa
P2	Tugas dan tes mingguan membantu dalam proses pembelajaran
Isu Kesehatan	
K1	Pendidikan online menimbulkan ketakutan kehilangan konektivitas internet
K2	Pendidikan online menimbulkan kecenderungan untuk menggunakan teknologi digital secara berlebihan.
K3	Waktu menatap layar gawai yang berlebihan menyebabkan stress dan mempengaruhi pola tidur
K4	Penilaian online memicu lebih banyak kecemasan daripada bentuk penilaian tradisional.
Isu Sosial	
S1	Pendidikan online telah memengaruhi kehidupan sehari-hari siswa
S2	Pendidikan online menimbulkan kesenjangan digital di antara siswa

Analisis Data

Analisis yang digunakan yaitu menganalisis hubungan antar aspek pembelajaran online. Gambar 1 mengilustrasikan pengaruh berbagai aspek pembelajaran online pada masalah sosial yang terkait dengan pendidikan online.



Gambar 1. Model untuk menguji pengaruh berbagai aspek pembelajaran online pada isu isu sosial yang berkaitan dengan

C. Hasil

Sebanyak 158 siswa SMP dan SMA di Surakarta telah memberikan tanggapan terhadap survei yang dilakukan (Tabel 2). Para siswa memiliki pendapat beragam tentang pendidikan online selama pandemi COVID-19. Mayoritas siswa (65,82%) merasa, setuju atau sangat setuju, bahwa pembelajaran berlangsung lebih baik di ruang kelas fisik daripada melalui pendidikan online. Namun demikian, para siswa merasa bahwa para guru telah meningkatkan keterampilan mengajar online mereka sejak awal pandemi (67,72%) dan pendidikan online adalah alternatif yang layak dalam situasi saat ini (77,84%).

Para siswa menghargai sumber daya dan media online yang digunakan oleh para guru untuk menyampaikan materi ajar. Sebanyak 116 (73,41%) siswa merasa bahwa bahan pelajaran yang memadai sekarang sudah tersedia secara online. Siswa juga merasa tayangan slide (58,86%) dan program pencatatan online (68,98%) efektif dalam menyebarkan informasi. Terdapat 84 (53,16%) siswa merasa bahwa pemanfaatan *platform online* bisa memberdayakan keterampilan pemecahan masalah.

Para siswa juga mengungkapkan pendapat mereka tentang pembelajaran yang berlangsung bisa menjadi lebih interaktif. Sebanyak 118 siswa (74,48%) merasa bahwa mereka dapat berinteraksi lebih baik dengan guru di kelas tatap muka. Sebanyak 127 siswa (80,37%) merasa bahwa guru dapat menjadikan kegiatan belajar daring lebih interaktif jika guru menjelaskan materi secara langsung menggunakan fasilitas di platform yang digunakan seperti tatap muka daring atau penggunaan pena digital. Menariknya, hanya 56 siswa (36,07%) siswa yang merasa interaksi tersebut dapat meningkat jika guru dan siswa menunjukkan wajah mereka saat perkuliahan. Sebanyak 120 siswa (75,94%) merasa bahwa komunikasi antara guru dan siswa melalui *chatbox* selama pembelajaran akan membuat mereka lebih interaktif.

Hampir setengah dari siswa merasa bahwa penilaian biasa dapat membantu meningkatkan pembelajaran online. Sebanyak 76 (48,10%) siswa merasa bahwa penilaian online dapat mengevaluasi pengetahuan mereka dengan baik dan 71 (44,93%) siswa merasa bahwa ulangan mingguan memudahkan proses pembelajaran.

Para siswa merasa bahwa pendidikan online mempengaruhi kesehatan mereka. Data hasil survei menemukan bahwa 104 (65,82%) siswa merasa bahwa pendidikan online menimbulkan ketakutan kehilangan konektivitas Internet di antara mereka. Sebagian besar siswa (82,91%) merasa bahwa pendidikan online menyebabkan penggunaan teknologi digital secara berlebihan dan 74,68% siswa merasa bahwa waktu menghadap layar gawai yang berlebihan menyebabkan stres dan mempengaruhi tidur mereka. Sebanyak 86 (54,43%) juga merasa bahwa penilaian online menyebabkan lebih banyak kecemasan daripada bentuk penilaian tradisional.

Para siswa juga merasa bahwa pendidikan online memiliki implikasi kemasyarakatan yang terlihat dari hasil survey bahwa sebanyak 107 (67,72%) siswa merasa bahwa pendidikan online

memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan 101 siswa (63,92%) siswa merasa bahwa pendidikan online menunjukkan adanya kesenjangan digital di antara mereka.

Tabel 2. Data hasil responden

No	Indikator	Hasil responden			
		Ya		Tidak	
		n	%	n	%
1	U1	104	65.82	54	34.18
2	U2	107	67.72	51	32.28
3	U3	123	77.85	35	22.15
4	M1	116	73.42	42	26.58
5	M2	93	58.86	65	41.14
6	M3	109	68.99	49	31.01
7	M4	114	72.15	44	27.85
8	I1	118	74.68	40	25.32
9	I2	127	80.38	31	19.62
10	I3	57	36.08	101	63.92
11	I4	120	75.95	38	24.05
12	P1	76	48.10	82	51.90
13	P2	71	44.94	87	55.06
14	K1	104	65.82	54	34.18
15	K2	131	82.91	27	17.09
16	KK3	118	74.68	40	25.32
17	K4	86	54.43	72	45.57
18	S1	107	67.72	51	32.28
19	S2	101	63.92	57	36.08

D. Pembahasan

Pendapat siswa tentang pembelajaran selama pandemi COVID-19 bisa memberikan gambaran tentang bagaimana perbandingan kegiatan pembelajaran online dengan pembelajaran di ruang kelas fisik. Sebenarnya membandingkan kondisi keduanya memang agak tidak seimbang karena jelas kegiatan pembelajaran seperti diskusi dan kegiatan kolaboratif lainnya yang terjadi di ruang kelas fisik sulit ditiru di *platform online*.

Terlihat dari sudut pandang siswa bahwa guru mengalami peningkatan dalam keterampilan mengajar *online*. Selama ini guru terbiasa mengajar di ruang kelas fisik dan kebanyakan dari mereka

tidak memiliki pengalaman mengajar online sebelum pandemi ini.

Guru telah mempelajari teknik-teknik baru dan menyesuaikan dengan pengajaran online dalam hampir 10 bulan terakhir. Kegiatan diskusi antar-rekan sesama pengajar tentang alat dan teknik untuk mengembangkan pembelajaran online akan sangat bermanfaat.

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa guru biasanya menggunakan program presentasi dan program pencatatan untuk menyampaikan materi ajar kepada siswa. *PowerPoint* cocok jika seorang guru ingin menyampaikan materi dengan mengikuti urutan yang telah ditentukan. Aplikasi video atau menjelaskan secara langsung akan cocok jika seorang guru tidak ingin terlalu terikat pada urutan topic pembelajaran dan ingin membuat sesi pembelajaran lebih interaktif.

Teknologi pendidikan membutuhkan interaksi yang mendukung kualitas (Singh, Adhikary, Gupta, & Singh, 2010). Fasilitas dalam aplikasi platform pembelajaran online seperti pena digital dapat membuat kegiatan pembelajaran lebih hidup. Selain itu terdapat hal yang cukup menarik yaitu bahwa siswa tidak suka menunjukkan wajah mereka selama kegiatan pembelajaran karena siswa enggan berpartisipasi aktif di kelas. Guru dapat memposting pertanyaan terbuka di kotak obrolan dan meminta tanggapan siswa. Siswa dapat berbagi ide tentang pemecahan masalah, terutama dalam mata kuliah yang berkaitan dengan sains dan praktikum.

Banyaknya berbagai *platform* yang bisa digunakan dalam pembelajaran online bisa menjadi sumber daya yang bisa digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar mulai dari penyampaian materi, teleconference, maupun melakukan penilaian. Beberapa alat pendidikan online juga memfasilitasi pembelajaran kolaboratif (Adhikary, Gupta, Singh, & Singh, 2010). Namun, refleksi diri dari siswa sangat penting dalam pembelajaran online karena berdasarkan hasil survey ditemukan bahwa siswa merasa bahwa harus ada kebutuhan

untuk evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga proses belajar-mengajar di jalur yang benar. Guru dapat menggunakan alat dan teknik inovatif untuk hal yang sama. Beberapa studi empiris telah mengungkapkan bahwa siswa menderita stres dan kecemasan selama pandemi ini (Arora, Chakraborty, Bhatia, & Mittal, 2020. Islam et al., 2020). Guru harus mencoba memberikan kebebasan kepada siswa yang mengikuti pembelajaran online (Mahmood, 2020). Selain itu juga ditemukan bahwa masih ada banyak rumah yang memiliki perangkat digital yang jumlahnya yang menunjukkan adanya bentuk baru kesenjangan digital.

Solusi Skenario Pembelajaran

Guru kali ini mendapat tantangan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka hanya dengan separuh dari total siswa yang ada, sementara sisanya masih belajar dari rumah. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana guru bisa memastikan pemahaman siswa tetap merata meskipun berada di lokasi berbeda? Salah skenario pembelajaran yang bisa dikembangkan yaitu dengan memodifikasi aktivitas kegiatan belajar mengajar antara daring dan tatap muka, bisa dengan melakukan sebagian aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas, kini dapat diselesaikan di rumah terlebih dahulu secara mandiri oleh siswa sebelum akhirnya melakukan pembelajaran tatap muka lagi di kelas. Untuk menerapkan model pembelajaran ini pada konteks pembatasan pembelajaran tatap muka di semester baru, ada beberapa langkah umum yang dapat Bapak/Ibu Guru ikuti untuk memastikan pembelajaran tetap efektif (Gambar 2):



DI LUAR KELAS

- *Guru membagi materi menjadi 2 kategori:*
- *Dipelajari siswa secara mandiri*
- *Dipandu/ didiskusikan segan guru dan teman sebaya*
- *Guru menugaskan materi kategori A dengan media daring*
- *untuk dipelajari di rumah*
- *Secara berkala, guru menjadwalkan diskusi daring untuk memastikan siswa mengerjakan kategori A*



DI DALAM KELAS/ Teleconference

- *Guru mengulang kembali materi kategori A untuk memastikan pemahaman siswa*
- *Guru memandu diskusi/ aktivitas pembelajaran terkait materi kategori B*
- *Guru melakukan refleksi untuk memastikan siswa paham materi A dan B*
- *Guru mendapatkan umpan balik tentang kesan siswa saat belajar dengan pola ini*
- *Guru memberikan materi selanjutnya yang juga telah dipecah menjadi kategori A dan B*
- *Guru memberikan pengantar bagi siswa hal yang harus dilakukan di rumah agar lebih terarah*



DI LUAR KELAS

- *Siswa mempelajari selanjutnya kategori A secara daring mandiri di rumah sesuai instruksi yang telah disampaikan guru saat tatap muka.*

Gambar 2. Beberapa langkah umum yang dapat Bapak/Ibu Guru ikuti untuk memastikan pembelajaran tetap efektif

Sebagai penutup, perlu diketahui memang tidak ada pola pembelajaran yang ideal, semuanya tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi. Terlebih pada saat kondisi wabah seperti sekarang yang mengharuskan proses pembelajaran menggunakan media daring. Semua pola yang diterapkan mempunyai pro dan kontra, tetapi sebagai pendidik yang bijak haruslah mampu mengedepankan banyak kemanfaatan dan mengurangi ketidakmanfaatan. Pola-pola tersebut hendaknya merujuk kepada tujuan pendidikan nasional yang mengedepankan munculnya bangsa yang berkualitas, beradab, mandiri, dan berdaya saing, Pelajaran daring yang kita lakukan selama pandemi ini akan tetap berguna selama keadaan darurat di masa mendatang (Chatterjee & Chakraborty, 2020; Skulmowski & Rey, 2020).

E. Simpulan

Pelaksanaan pembelajaran online telah berlangsung cukup lama. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pendapat siswa tentang berbagai aspek pendidikan online selama pandemi COVID-19. Data hasil survey menunjukkan bahwa siswa menganggap pendidikan online sebagai alternatif yang layak dalam keadaan saat ini dan harus diikuti dengan berbagai perbaikan untuk peningkatan pembelajarannya. Guru harus terus mencoba membuat pembelajaran daring lebih dapat diterima di kalangan siswa. Teknik pembelajaran seperti *flipped classroom*, *case studies* dapat diperkenalkan dalam pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan adopsi pembelajaran daring dalam skala besar di seluruh dunia untuk pertama kalinya.

Referensi

Adhikary, K., Gupta, M. S., Singh, E. P., & Singh, S. (2010). Collaborating Towards Learning: Using Web 2.0 for Educational Idea Development. Proceedings of the Fifth Conference of Learning International Networks Consortium.

- Arora, A., Chakraborty, P., Bhatia, M. P. S., & Mittal, P. (2020). Role of emotion in addictive use of twitter during COVID-19 imposed lockdown in India. *Journal of Technology in Behavioral Science* in press.
- Bao, W. (2020). COVID-19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. *Human Behavior and Emerging Technologies*.
- Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. *Psychiatry Research*.
- Carroll, N., & Conboy, K. (2020). Normalising the “new normal”: Changing tech-driven work practices under pandemic time pressure. *International Journal of Information Management*.
- Chatterjee, I., & Chakraborty, P. (2020). Use of information and communication technology by medical educators amid COVID-19 pandemic and beyond. *Journal of Educational Technology Systems* in press.
- Copeland, W. E., McGinnis, E., Bai, Y., Adams, Z., Nardone, H., Devadanam, V., ... Hudziak, J. J.* (2020). Impact of COVID on college student mental health and wellness. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry* in press
- Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. *Journal of Educational Technology Systems*, Diaz, M. C. G., & Walsh, B. M. (2020). Telesimulation-based education during COVID-19. *The Clinical Teacher* in press.
- Essadek, A., Rabeyron, T. (2020). Mental health of French students during the Covid-19 pandemic. *Journal of Affective Disorders*.
- Hasan, N., & Bao, Y. (2020). Impact of “e-learning crack-up” perception on psychological distress among college students during COVID-19 pandemic: A mediating role of “fear of academic year loss”. *Children and Youth Services Review*.
- Islam, M. A., Barna, S. D., Raihan, H., Khan, M. N. A., & Hossain,

- M. T. (2020). Depression and anxiety among students during the COVID-19 pandemic in Bangladesh: A web-based cross-sectional survey. *PLoS One*.
- Jæger, M. M., & Blaabæk, E. H. (2020). Inequality in learning opportunities during Covid 19: Evidence from library takeout. *Research in Social Stratification and Mobility*.
- Jiang, R. (2020). Knowledge, attitudes and mental health of university students during the COVID-19 pandemic in China. *Children and Youth Services Review*, 119, 105494.
- Kaparounaki, C. K., Patsali, M. E., Mousa, D. P. V., Papadopoulou, E. V., Papadopoulou, K. K., & Fountoulakis, K. N. (2020). University students' mental health amidst the COVID-19 quarantine in Greece. *Psychiatry Research*, 290, 113111.
- Khan, A. H., Sultana, M. S., Hossain, S., Hasan, M. T., Ahmed, H. U., & Sikder, M. T. (2020). The impact of COVID-19 pandemic on mental health & wellbeing among home-quarantined Bangladeshi students: A cross-sectional pilot study. *Journal of Affective Disorders*.
- Lassoued, Z., Alhendawi, M., & Bashitialshaer, R. (2020). An exploratory study of the obstacles for achieving quality in distance learning during the COVID-19 pandemic. *Education Sciences*, 10(9), 232.
- Lembani, R., Gunter, A., Breines, M., & Dalu, M. T. B. (2020). The same course, different access: The digital divide between urban and rural distance education students in South Africa. *Journal of Geography in Higher Education*.
- Mahmood, S. (2020). Instructional strategies for online teaching in COVID-19 pandemic. *Human Behavior and Emerging Technologies* in press.
- Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online teaching-learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic. *International Journal of Educational Research Open* in press.
- Nash, C. (2020). Report on digital literacy in academic meetings during the 2020 COVID-19 lockdown. *Challenges*, 11(2), 20.

- Patricia, A. (2020). College students' use and acceptance of emergency online learning due to COVID-19. *International Journal of Educational Research Open in press*.
- Peters, M. A., Wang, H., Ogunniran, M. O., Huang, Y., Green, B., Chunga, J. O., ... Khomera, S. W. (2020). China's internationalized higher education during COVID-19: Collective student autoethnography. *Postdigital Science and Education*.
- Ray, S., & Srivastava, S. (2020). Virtualization of science education: A lesson from the COVID-19 pandemic. *Journal of Proteins and Proteomics*, 11(2), 77–80
- Savage, M. J., James, R., Magistro, D., Donaldson, J., Healy, L. C., Nevill, M., & Hennis, P. J. (2020). Mental health and movement behaviour during the COVID-19 pandemic in UK university students: Prospective cohort study. *Mental Health and Physical Activity*.
- Singh, E. P., Adhikary, K., Gupta, M. S., & Singh, S. (2010). User Interface Considerations for Scalable C, An Online Collaborative Platform. *Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems and Web Technologies*.
- Skulmowski, A., & Rey, G. D. (2020). COVID-19 as an accelerator for digitalization at a German university: Establishing hybrid campuses in times of crisis. *Human Behavior and Emerging Technologies*.
- Vasiliadou, R. (2020). Virtual laboratories during coronavirus (COVID-19) pandemic. *Biochemistry and Molecular Biology Education*.
- Zhang, W., Wang, Y., Yang, L., & Wang, C. (2020). Suspending classes without stopping learning: China's education emergency management policy in the COVID-19 outbreak. *Journal of Risk and Financial Management*.
- Zhu, X., & Liu, J. (2020). Education in and after Covid-19: Immediate responses and long-term visions. *Postdigital Science and Education*.

CHAPTER 9

Dampak Banjir Terhadap Kerusakan Infrastruktur Sekolah di Pesisir Danau Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan

Muhammad Nasir, M.Pd.

A. Pendahuluan

Bencana banjir merupakan bencana alam yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia. Bencana alam ini menimbulkan permasalahan-permasalahan baik secara fisik maupun struktur sosial sehingga diperlukan perhatian yang cukup serius. Menurut *Norwegian Refugee Council* (2012) banjir dianggap sebagai bahaya terkait iklim yang paling merusak di dunia. permasalahan banjir berdampak pada manusia, berupa rusaknya lahan pertanian, pemukiman, sarana transportasi, sarana pendidikan dan bahkan dapat merenggut jiwa manusia serta harta kekayaan lainnya.

Salah satu daerah di Indonesia yang rawan banjir pada waktu musim penghujan adalah Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Tempe rawan banjir karena berbatasan langsung dengan Danau Tempe. Danau Tempe berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang dan Soppeng Sulawesi Selatan. Genangan banjir yang terjadi disebabkan oleh meluapnya Danau Tempe akibat sungai Walanae, sungai Bila, sungai Belokka, sungai Batu-batu dan sungai Lawo yang membawa sedimentasi dari daerah hulu kemudian bermuara di Danau Tempe.

Menurut Ali, *et al* (2018), beberapa isu terkait permasalahan banjir di Danau Tempe diantaranya 1) Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi perairan Danau Tempe telah mengalami perubahan antara lain sebagian dari wilayah danau telah menjadi daratan. 2) Terjadinya

akumulasi sedimen yang dibawa oleh aliran air menjadikan Danau Tempe semakin dangkal yang mengakibatkan daya tampung volume air menjadi berkurang. Total sedimen yang masuk yakni 1.069.099 m³ sementara yang dikeluarkan melalui Sungai Cendranae adalah 550.490 m³. Dengan demikian, sisa sedimen yang mengendap di dasar danau sebesar 510.609 m³.

Banjir telah memberi dampak yang sangat besar pada berbagai sektor khususnya pendidikan. Kerusakan bangunan sekolah sempat terhambatnya layanan pendidikan menjadi persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari bencana banjir. Terkait kerusakan bangunan menurut Permen PU No.24 Tahun 2008 adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia, atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu: (1) Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi. (2) Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain; dan (3) Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Dampak dari kerusakan bangunan berakibat pada layanan pendidikan. Khususnya pelayanan proses belajar mengajar. Keadaan ini terjadi karena bangunan sekolah yang terdampak banjir sehingga tidak dapat digunakan sebagai tempat belajar.

B. Permasalahan

Banjir yang terjadi di Kecamatan Tempe menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah . Gambaran umum tentang

bencana banjir dan potensi dampaknya terhadap kerusakan infrastruktur dan layanan pendidikan di Kecamatan Tempe menjadi persoalan utama pada tulisan ini. Berikut fokus permasalahan pada penelitian ini: (1) Dampak banjir tahunan terhadap kerusakan infrastruktur sekolah di Kecamatan Tempe, dan (2) Bagaimana layanan pendidikan pada sekolah yang terdampak banjir tahunan di Kecamatan Tempe.

C. Metode

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua sekolah di Kecamatan Tempe, yang terdiri dari 72 sekolah yang terbagi tiga tingkatan yaitu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah serta Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Sederajat. Status sekolah tersebut sekolah negeri dan Swasta. Berikut Data Sekolah yang terdapat di Kecamatan Tempe.

Tabel 1. Data Jumlah Sekolah di Kecamatan Tempe

No	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	34	11	45	8	6	14	3	10	13

Sumber: Data Referensi Pendidikan Kabupaten Wajo 2019.

Sampel dipilih melalui purposive sampling. Artinya sampel ditentukan dengan pertimbangan tujuan penelitian dan berdasar kan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan. Total jumlah sampel adalah 9 Sekolah yang dikelompokkan menjadi tiga Zona (1, 2 dan 3). Ketiga zona tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Zona 1, Sekolah kebanjiran. Sekolah-sekolah ini adalah sekolah yang bangunan, fasilitas lain, dan sekitarnya terkena banjir selama kejadian banjir sebelumnya. Di sekolah-sekolah ini, banjir menyebabkan kerugian atau kesulitan bagi siswa dan kerusakan properti sekolah, mengakibatkan pembatalan atau gangguan kelas atau menghambat akses siswa dan guru ke sekolah. Banjir

- diduga menyebabkan dampak yang cukup besar pada penyediaan layanan pendidikan dan pendidikan anak-anak di kelompok ini.
- b. Zona 2, Tidak banjir tetapi terkena dampak. Sekolah-sekolah ini tidak terkena banjir tetapi digunakan sebagai pusat evakuasi atau berbagi fasilitas dengan sekolah lain yang terkena banjir atau terlantar akibat peristiwa banjir. Di sekolah-sekolah tersebut, cukup banyak siswa atau guru yang terkena dampak banjir yang berdampak besar pada penyediaan layanan pendidikan dan pendidikan anak-anak.
 - c. Zona 3, Tidak terkena banjir paling sedikit. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah yang tidak terkena banjir, tidak digunakan sebagai pusat evakuasi dan tidak menampung sekolah lain yang terendam banjir atau terlantar akibat banjir. Sangat sedikit keluarga guru dan siswa yang mungkin terkena dampak banjir, sehingga menyebabkan dampak minimal pada penyediaan layanan pendidikan dan pendidikan anak-anak.

Dari sekolah sampel, dipilih guru secara acak diantara mereka untuk dijadikan informan. Jumlah guru yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 3 Orang. Data dari guru berupa data layanan pendidikan yang terkait dengan keterlaksanaan pembelajaran.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui survey, wawancara, dan penelitian pustaka dengan cara mengumpulkan catatan sekolah tentang laporan kerusakan dan dampak banjir lainnya pada sekolah dan masyarakat. Pengambilan data dilakukan dengan survey lapangan, dimana peneliti mengamati kondisi tiap komponen elemen bangunan. Pengukuran luas kerusakan komponen elemen bangunan dilakukan dengan menggunakan meteran dan dihitung persentasenya sesuai dengan peraturan dari Kemendikbud (2015). Wawancara dilakukan dengan terdiri dari 3 guru. Guru yang diutamakan adalah guru yang mengalami banjir di sekolah tiap tahunnya.

Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menghitung bobot persentase kerusakan tiap komponen/elemen bangunan, sesuai dengan komponen standar penilaian tingkat kerusakan bangunan pada sesuai dengan aturan Kemendikbud (2015). Setelah didapati nilai persentase kerusakan, maka tiap komponen bangunan kemudian digolongkan tingkat kerusakannya sesuai empat kategori tingkat kerusakan, yaitu :

- Rusak Ringan (RR): $\leq 30\%$
- Rusak Sedang (RS) : $> 30\% -45\%$
- Rusak Berat (RB): $> 45\% -65\%$
- Rusak Total (RT): $\geq 65\%$

Sedangkan data layanan pendidikan berfokus pada keterlaksanaan proses pembelajaran. Data keterlaksanaan proses pembelajaran pada sekolah terdampak banjir akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan angket yang diberikan kepada responden. Data penelitian berupa angket menggunakan kisi kisi. Dan hasil dalam penelitian ini berupa persentase. Dengan menggunakan indikator sebagai berikut.

- Sangat Tinggi 75%-100%
- Tinggi 50%-74
- Rendah 25%-49%
- Sangat Rendah 1%-24%

D. Hasil dan Pembahasan

Pembagian Sekolah berdasarkan Zona

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo adalah kecamatan terluas dan merupakan tempat ibukota Kabupaten Wajo yaitu Sengkang. Jumlah Sekolah secara keseluruhan dari jenjang SD sampai dengan

SMA sederajat negeri dan Swasta adalah 72 (tujuh puluh dua). Berdasarkan jumlah sampel penelitian yaitu 9 Sekolah maka setiap zona terdapat 3 sekolah yang menjadi tempat pengambilan data. Berikut data sekolah berdasarkan zona berdasarkan dampak banjirnya.

Tabel 2. Data Sample Sekolah Berdasarkan Zona

Zona	Kode Sekolah	Jenjang/ Status Sekolah
Zona 1	1. Z1.40300000 2. Z1.40303509 3. Z1.40303066	SMP /Negeri SD/ Negeri SD. Negeri
Zona 2	1. Z2.40320145 2. Z2.40320145 3. Z3.40303536	MTs/Swasta SD/Negeri SD/Negeri
Zona 3	1. Z3.40303150 2. Z3.40303302 3. Z3.40303122	SMA/Negeri SD/ Negeri SD/ Negeri

Sumber: Data hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas sekolah yang berada pada Zona 1 adalah sekolah kebanjiran. Sekolah-sekolah ini adalah sekolah yang bangunan, fasilitas lain, dan sekitarnya terkena banjir selama kejadian banjir sebelumnya. Di sekolah-sekolah ini, banjir menyebabkan kerugian atau kesulitan bagi siswa dan kerusakan properti sekolah, mengakibatkan pembatalan atau gangguan kelas atau menghambat akses siswa dan guru ke sekolah. Sekolah sekolah ini berada di tepi Danau Tempe. Sekolah-sekolah ini meliputi [Z1.40300000](#), [Z1.40303509](#), [Z1.40303066](#). Berikut kondisi sekolah dengan kode [Z1.40300000](#) pada saat banjir 2019.

Pada Zona 2 yaitu tidak banjir tetapi terkena dampak. Sekolah-sekolah ini tidak terkena banjir tetapi digunakan sebagai pusat evakuasi atau berbagi fasilitas dengan sekolah lain yang terkena banjir atau terlantar akibat peristiwa banjir. Sekolah sekolah tersebut diberi kode [Z2.40320145](#), [Z2.40320145](#) dan [Z3.40303536](#). Selanjutnya

pada Zona 3 Tidak terkena banjir paling sedikit. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah yang tidak terkena banjir, tidak digunakan sebagai pusat evakuasi dan tidak menampung sekolah lain yang terendam banjir atau terlantar akibat banjir (Asti, 2016)

Kerusakan Infrastruktur

Analisis tingkat kerusakan dilakukan pada 1 kategori ruangan yaitu Ruang kelas dan. Analisis tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa bangunan/ruang tersebut merupakan ruangan fungsional khususnya proses belajar mengajar tiap-tiap sekolah. Tabel 3 menunjukkan analisis kerusakan dampak pada bangunan pada ruang kelas berdasarkan 3 zona.

Tabel 3. Persentase Kerusakan Sekolah Berdasarkan Zona

Kode Sekolah	Kerusakan	Rata-Rata % Kerusakan	Kategori
1. Z1.40300000	1. 30%	43%	Sedang
2. Z1.40303509	2. 45%		
3. Z1.40303066	3. 56%		
4. Z2.40320145	1. ≤1%	≤1%	Ringan
5. Z2.40320145	2. ≤1%		
6. Z3.40303536	3. ≤1%		
7. Z3.40303150	4. ≤1%	≤1%	Ringan
8. Z3.40303302	5. ≤1%		
9. Z3.40303122	6. ≤1%		

Sumber: Data Hasil Penelitian

Data diatas melaporkan bahwa banjir di zona 1 masing-masing berdampak luar biasa terhadap sekolah di zona tersebut. Sekolah-sekolah berada di tepi danau Tempe yang meliputi sekolah dengan kode [Z1.40300000](#), [Z1.40303509](#) dan [Z1.40303066](#) telah menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Pada saat banjir datang gedung sekolah terendam banjir dengan ketinggian 1,5 sampai dengan 3 meter. Keadaan ini mengakibatkan gedung sekolah tidak dapat digunakan selama banjir berlangsung.

Data hasil analisis tingkat kerusakan pada tiap sekolah khususnya di zona 1 dilaporkan bahwa sekolah [Z1.40300000](#) didapatkan data kerusakan secara keseluruhan yaitu 30%. Angka ini berada pada kategori rusak ringan. Selanjutnya sekolah dengan kode [Z1.40303509](#) mengalami kerusakan 45% dengan kategori rusak sedang. Kerusakan tertinggi pada sekolah [Z1.40303066](#) dengan tingkat kerusakan mencapai 56% atau pada kategori tinggi, Kemudian digabungkan rekapitulasi penilaian tingkat kerusakan bangunan gedung sekolah pada zona 1 yaitu rata-rata 43% ini berarti rata-rata tingkat kerusakan sekolah terdampak banjir berada pada kategori ringan.

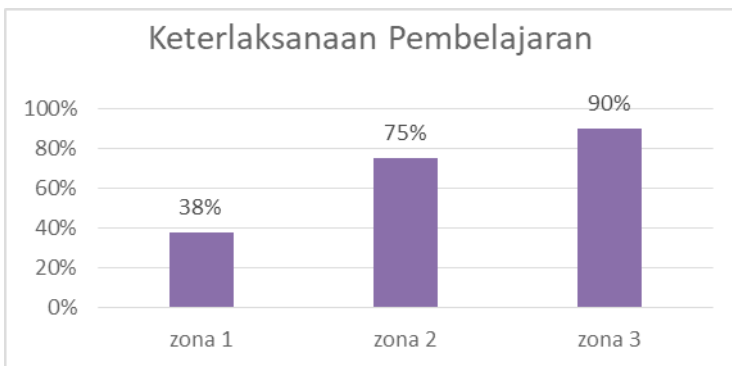
Menurut Dardiri (2012), kerusakan bangunan merupakan proses melemahnya kekuatan dan ketahanan konstruksi dan material bangunan menerima beban-beban dari luar atau beban berat. Selain itu Kerusakan bangunan menurut Permen PU No.24 Tahun 2008 adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia, atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Banjir yang terjadi mengakibatkan beberapa dinding sekolah mengelupas dan retak. Lantai sekolah menjadi bagian bangunan yang terdampak sangat parah (Marfai et al., 2014)

Pada zona 2 dan 3 kondisi kerusakan hampir tidak ada. Pada setiap tahunnya tidak terjadi genangan banjir pada zona ini. Akan tetapi pada zona 2 dengan kode sekolah [Z2.40320145](#), [Z2.40320145](#) dan [Z3.40303536](#) dijadikan sebagai tempat evakuasi sementara siswa yang berasal dari zona 1. Sedangkan pada zona 3 gangguan yang terjadi adalah beberapa guru dan siswa terlambat masuk sekolah karena tempat tinggal mereka tergenang banjir. Bencana banjir sangat menakutkan bagi masyarakat, karena sekali terjadi banjir, kerusakan dan kerugian yang dialami akan memakan biaya sangat besar (Haloho & Purnaweni, 2020). Pada saat banjir aktivitas ekonomi

berhenti, infrastruktur tergenang banjir, penduduk mengungsi dari tempat tinggal, serta aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah berhenti (Rauf *et al.*, 2017)

Layanan Pendidikan

Layanan pendidikan pada penelitian ini berfokus pada keterlaksanaan pembelajaran pada setiap zona sekolah yang terdampak banjir. Pengambilan data keterlaksanaan pembelajaran merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar mata pelajaran sekolah yang mewakili masing-masing zona. Dengan jumlah total 3 guru. Analisis data menggunakan teknik deskriptif persentase. Gambar 1 berikut menyajikan data keterlaksanaan pembelajaran pada setiap zona.



Gambar 1. Layanan Pendidikan Sekolah Terdampak Banjir pada setiap Zona

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keterlaksanaan pembelajaran pada zona 1 dalam kategori rendah dengan persentase 38%, sekolah yang berada pada zona 2 keterlaksanaan pembelajaran mencapai angka 75% dengan kategori sangat tinggi sedangkan pada zona 3 keterlaksanaan pembelajaran mencapai 90% dengan kategori sangat tinggi. Data keterlaksanaan pembelajaran pada zona 1 tergolong rendah karena selama banjir siswa dan guru tidak dapat mengakses sekolah hampir seluruh bangunan sekolah terendam banjir (Asti,

2016). Kondisi ini mengakibatkan guru dan siswa tidak dapat bertatap muka pada proses pembelajaran . Kondisi ini diatasi dengan mengungsi di sekolah pada zona 2 dan . Kendala lain adalah tidak semua siswa dan guru dapat mengakses sekolah pada zona 2. Pada kondisi ini persentase kehadiran siswa dan guru juga tidak dapat maksimal.

Berbeda pada zona 2 yaitu sekolah yang tidak terdampak banjir dari segi bangunan tetapi beberapa guru dan siswa terhalang mengakses sekolah, selain itu sebagian ruang belajar pada sekolah di zona 2 dipakai oleh siswa yang mengisi dari sekolah zona 1. Sekalipun harus berbagi ruangan dan waktu masuk tetapi menurut data yang dikumpulkan keterlaksanaan pembelajaran pada sekolah di zona 2 masih tergolong sangat tinggi. Kondisi berbeda terjadi pada sekolah di zona 3. Setiap tahunnya tidak ada gangguan yang berarti terkait keterlaksanaan pembelajaran pada di sekolah ini (Asti, 2016). Sekolah masih bisa melaksanakan proses pembelajaran tanpa hambatan kecuali keterlambatan siswa dan guru masuk sekolah karena harus melewati banjir.

E. Rekomendasi

Rekomendasi untuk mengurangi dampak banjir pada sekolah di Kecamatan Tempe, khususnya terkait kerusakan bangunan sekolah dan penyampaian layanan pendidikan ditujukan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, kondisi banjir tahunan, telah mengganggu proses pembelajaran karena bangunan sekolah terdampak banjir, hal ini dapat disiasati dengan membangun bangunan sekolah semi permanen dengan konstruksi kayu bertiang (menyerupai rumah panggung). Jenis bangunan ini masih dapat digunakan pada saat banjir berlangsung karena lantai sekolah yang dapat didesain lebih tinggi dari permukaan air. Rekomendasi berikut ditujukan kepada sekolah pada zona 2 dan 3 kelas yang berada pada sekolah ini menjadi lebih padat karena dijadikan pusat evakuasi. Untuk itu sanitasi yang memadai dan

privasi dan keamanan yang diperlukan untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan. Fasilitas ini harus sesuai untuk keperluan lain selama digunakan untuk evakuasi

F. Simpulan

Berdasarkan klasifikasi sekolah yang terdampak banjir maka sekolah sekolah tersebut dikelompokkan ke dalam tiga zona, yaitu zona 1 sekolah yang bangunannya terdampak oleh banjir dan mengganggu aktivitas pembelajaran, kedua adalah zona 2 yaitu sekolah yang tidak terdampak banjir tapi bangunan sekolahnya digunakan untuk mengunci dan tempat belajar dari sekolah zona 1 serta yang ketiga ada zona 3, yaitu sekolah yang tidak terdampak tetapi guru dan siswa beberapa terhalang mengakses sekolah karena genangan banjir. Dari hasil analisis data kerusakan infrastruktur yang berfokus pada kerusakan ruangan belajar dengan indikator dinding dan lantai sekolah didapatkan data kerusakan bangunan gedung sekolah pada zona 1 yaitu rata-rata 43% ini berarti rata-rata tingkat kerusakan sekolah terdampak banjir berada pada kategori ringan. Selanjutnya hasil dari penelitian di 3 sekolah mewakili masing masing zona kesimpulan bahwa keterlaksanaan pembelajaran pada zona 1 dalam kategori rendah dengan persentase 38%, sekolah yang berada pada zona 2 keterlaksanaan pembelajaran mencapai angka 75% dengan kategori sangat tinggi sedangkan pada zona 3 keterlaksanaan pembelajaran mencapai 90% dengan kategori sangat tinggi.

Referensi

- Asrofi, A., Hardoyo, S. R., & Sri Hadmoko, D. (2017). Strategi Adaptasi Masyarakat Pesisir Dalam Penanganan Bencana Banjir Rob Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(2), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.26257>
- Asti, A. F. (2016). Bencana Alam Dan Budaya Lokal: Respons Masyarakat

- Lokal Terhadap Banjir Tahunan Danau Tempe Di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. *Annual International Conference on Islamic Studies (ANICIS) XII*, 3, 1429–1445. <https://core.ac.uk/download/pdf/34212362.pdf>
- Dardiri, A. (2012). Analisis Pola, Jenis dan Penyebab Kerusakan Bangunan Gedung Sekolah Dasar. *Jurnal Teknologi dan Kejuruan* Vol 35 No.1, Februari 2012 p.21-80
- Dirjen Cipta Karya, Departemen PU. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.
- Haloho, E. H., & Purnaweni, H. (2020). Adaptasi Masyarakat Desa Bedono Terhadap Banjir Rob Di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(4), 150–158. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/28997>
- Jenderal, D., Dan, P., Kelautan, D., & Perikanan, D. A. N. (2004). *Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL*. 16.
- Kemdikbud RI, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. 2015. Panduan Verifikasi Bantuan Revitalisasi Sekolah Dasar. Jakarta.
- Marfai, M. A., Cahyadi, A., & Kasbullah, A. A. (2014). Dampak Bencana Banjir Pesisir Dan Adaptasi Masyarakat Terhadapnya Di Kabupaten Pekalongan. *Makalah Pekan Ilmiah Thunan Ikatan Geograf Indonesia, 2009*, 1–10. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dampak+bencana+banjir+pesisir+2017+&btnG=
- Norwegian Refugee Council. (2012). *Assessment capacity project (ACAPS). Disaster summary sheet-floods*. Retrieved from <http://www.acaps.org/img/disasters/dss-floods.pdf>.
- Mukti Ali ,S.Trisutomo, Sri Aliah Ekawati, Resti Kharisma, A.Arlyn Avila ,S.A Ikke, A. Ridayanti, Arman (2012). Pemetaan Daerah Rawan Banjir Berbasis Sistem Informasi Geografis (Gis) Di Pesisir Danau Tempe Kabupaten Wajo. *Jurnal Arsitektur, Kota dan Permukiman (LOSARI)*
- Rauf, S., Aboe, A. F., & Wahyuni, H. (2017). Dampak Banjir Terhadap Infrastruktur Di Kabupaten Wajo Berbasis Data Citra Modis Nrt. *Jurnal Transportasi*, 17(3), 225–234. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/journaltransportasi/article/view/2868>

CHAPTER 10

Dikotomi Pandangan Masyarakat Pulau Sapudi terhadap Pendidikan Umum dan Agama Pesantren

Oleh: Asy'ari, M.Pd.

A. Pendahuluan

Di Indonesia, bentuk dikotomi pendidikan berlangsung sejak adanya sistem lembaga pendidikan di era pertengahan abad ke-19 hingga memasuki masa kemerdekaan. Kala itu, belanda menerapkan politik etik yang salah satu bentuknya membuka sekolah bagi kaum bumiputera (SR) pada tahun 1870. Tentu, dengan tujuan untuk kepentingan mereka di tanah jajahannya, seperti untuk mencetak tenaga kerja. Dalam sistem pendidikan ini, pendidikan agama tidak diberikan di sekolah dengan alasan pemerintah bersikap netral untuk tidak mencampuri masalah pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan tanggung jawab keluarga. Dipihak lain, pribumi Indonesia yang memiliki keteguhan aqidah serta jiwa nasionalis (kaum Santri) tak mau mengikuti pola pendidikan belanda. Mereka memperkuat basis pendidikan agama melalui lembaga pesantren. Di pesantren, peserta didik mendapatkan pelajaran agama secara mendalam, hanya mendapat sedikit porsi pendidikan umum (Sains). Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin dan perintis kemerdekaan menyadari betapa pentingnya pendidikan agama (Wahid, Abdul, 2014).

Akan tetapi, dikotomi pendidikan juga tak kunjung berhenti hingga saat ini baik secara kultural maupun struktur kenegaraan. Secara kultural, masyarakat umum bahkan sebagian pelaku pendidikan masih menganggap adanya pemilahan “ilmu-ilmu agama” (al-‘umum aldiniyyah atau religious sciences) dengan ilmu-ilmu umum. Dari

sisi struktural tampak lebih nyata. Meskipun telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional melalui UU Sisdiknas 3003, namun pendidikan Agama Islam melalui madrasah, institut agama, dan pesantren masih menjadi kaplingan Kementerian Agama, sedangkan pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, dan kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Padahal sesungguhnya ilmu tak berbeda, semuanya datang dan milik Allah. Juga, pendidikan Islam tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan Islam secara teoritis belaka, tetapi pendidikan Islam juga menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku serta memberi bekal pengetahuan teknologi serta kecakapan hidup (Wahab, Abdul, 2013).

Oleh karena dari penjabaran dari sekilas sejarah di atas bahwa dikotomi memiliki makna yang sama yaitu pemisahan antara pendidikan umum dari pendidikan agama. Dikotomi selalu melahirkan pandangan perbedaan di satu sisi dan penyamaan di sisi yang lain. Menurut Mustaqim, Muhammad (2015) bahwa pandangan dikotomis pada hakikatnya mengabaikan esensi atau nilai spirit pendidikan. Membedakan dan menyamakan lebih dimaknai pada tataran permukaan sehingga jelas merusak nilai spirit dari pendidikan Islam. dikotomi bukan hanya pada tataran pemilahan, tetapi telah masuk pada wilayah pemisahan yang dalam operasionalnya memisahkan mata pelajaran umum dari mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah yang pengelolaannya berjalan terpisah-pisah. Puncaknya pada pemerintah Orde Baru yang mengeluarkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tanggal 24 Maret 1975 yang menguatkan pemisahan pendidikan hingga saat ini tetap terjadi. Kemudian, dampaknya terasa merugikan dan makna Islam menjadi sempit karena pengkotak-kotakan ilmu akhirnya menomorduakan dan menganaktirikan pendidikan Islam (Wahab, Abdul, 2013).

Semua realitas dikotomi dalam sistem pendidikan di Indonesia

tersebut merupakan tantangan bagi para pemikir dan praktisi pendidikan. Diperlukan sejumlah kajian dan penelitian mendalam dan *applicable* yang mampu mengarah dan mendukung berbagai kebijakan untuk melakukan konvergensi dan integrasi sistem pendidikan di Indonesia tersebut (Kutsiyah, Farahdilla, et al., 2017). Oleh karena itu, dalam hal ini bagaimana tulisan ini dapat memberikan kontribusi solutif bagi hal tersebut. Namun dari semua dikotomi di atas, yang menjadi fokus tulisan ini adalah dikotomi pertama. Menurut Taufik (2010) bahwa persoalan dikotomi akan memberi penekanan, sekalipun pembahasannya nanti akan berimbas pada dikotomi-dikotomi lainnya sebagai konsekuensi dari adanya dikotomi tersebut.

Dikotomi sistem pendidikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum membentuk memisahkan kesadaran keagamaan dan ilmu pengetahuan (Wahid, Abdul, 2014). Dikotomi ini, bukan hanya pada dataran pemilahan tetapi masuk pada wilayah pemisahan, dalam operasionalnya yaitu pemisahan mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama, sehingga sekolah umum dan madrasah, yang pengelolaannya memiliki kebijakan masing-masing (Kutsiyah, Farahdilla, et al., 2017). Sistem pendidikan yang dikotomi pada pendidikan Islam akan menyebabkan pecahnya peradaban Islam dan akan menafikan peradaban Islam yang *kaffah* (menyeluruh) (Bisyri, M. Hasan, 2019). kemudian hal ini menjadi problematika tersendiri dalam dunia pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter anak bangsa yang berkarakter dan berdaya saing secara regional, nasional lebih-lebih internasional (Taufik (2010).

Dikotomi tersebut sebuah paradigma yang selalu marak diperbincangkan dan tidak berkesudahan. Munculnya dikotomi pendidikan umum dan agama akan berimplikasi terhadap model pemikiran. Di satu pihak ada pendidikan yang hanya memperdalam ilmu pengetahuan modern yang kering dari nilai-nilai keagamaan, dan di sisi lain ada pendidikan yang hanya memperdalam masalah

agama yang terpisah dari perkembangan ilmu pengetahuan. Secara teoritis makna dikotomi dapat dimaknai sebagai pemisahan secara teliti dan jelas dari suatu jenis menjadi dua yang terpisah satu sama lain di mana yang satu sama sekali tidak dapat dimasukkan kedalam yang satunya dan seterusnya (Taufik, 2010).

Kemudian upaya mengintegrasikan antara pendidikan umum dan agama khususnya pesantren sangat menjadi pemikiran utama dalam mensinergikan pemahaman kepada anak. Hal itu harus menjadi PR bagi praktisi pendidikan dan pemerintah untuk terus mengemas sebaik-baiknya tanpa tendensi apapun. Kemudian secara umum di daerah khususnya di pulau Sepudi masih terjadi dikotomi pendidikan yang tidak kunjung usai (Bisyri, M. Hasan, 2019). Karena kultur keagamaan masyarakat pulau Sapudi sangat kuat sehingga menganggap pendidikan umum tidak terlalu penting bagi masa depan anak-anaknya. Anggapan dari masyarakat pulau Sapudi bahwa pendidikan umum tidak menjadi bekal kehidupan akhirat, karena menurut masyarakat pulau Sapudi pendidikan agama adalah lebih menjanjikan sebagai bekal kehidupan akhirat yang abadi (Kutsiyah, Farahdilla, et al., 2017).

Sebagai gambaran umum tentang pulau sepudi yaitu bahwa letak pulau sapudi lebih kurang 27 mil laut di sebelah timur pulau Madura dengan luas: 126.686.257 Ha. Batas - batas wilayah pulau sapudi meliputi, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan ra'as, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kalianget dan dungkek, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan masalembu, sementara sebelah selatan berbatasan langsung dengan selat Madura. Adapun pembagian daerah pulau sapudi terbagi menjadi dua kecamatan yang terdiri dari kecamatan nunggunung dan kecamatan gayam dan termasuk Kabupaten Sumenep (Bisyri, M. Hasan, 2019).

Kemudian dari pembagian tersebut, di sebelah utara, kecamatan Gayam disebelah selatan yang keseluruhan pulau ini terdiri dari 18 Desa. Kecamatan Nunggunung membawahi 8 Desa diantaranya

sebagai berikut: Desa Nunggunung, Desa Sumber, Desa Talaga, Desa Tanah Merah, Desa Rosong, Desa Sokarami pesisir, Desa Sokarami timur dan Desa Sonok. Sedangkan Adapun kecamatan Gayam yang ditetapkan sebagai ibukota Sepudi membawahi 10 Desa, dengan nama – nama desanya sebagai berikut ; Desa Gayam, di sebelah timur Desa Prambanan, kemudian Desa Gendang timur, Desa Gendang barat, Desa Tarebung, Desa Kalowang, Desa Jambuir, Desa Karang (Kutsiyah, Farahdilla, et al., 2017).

Terjadinya dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama yang terjadi di Pulau Sepudi berjalan sampai sekarang, terutama masyarakat tradisional yang tidak memandang pendidikan umum bagian dari kebutuhan masa depan anak-anaknya. Masyarakat Pulau Sapudi yang berada di pedesaan masih terjadi kesenjangan pendidikan, karena tujuan dari pendidikan anak-anaknya yang terpenting bisa ngaji/baca al-qur'an perkara pendidikan umumnya hanya sampai SD dan SMP tidak dipermasalahkan atau hanya sampai SMA setelah itu dinikahkan, sehingga hal itu berdampak pada rendahnya pendidikan yang terjadi di Pulau Sapudi, khususnya di pedesaan. Berikut fokus permasalahan pada penelitian ini: (1) Bagaimana Pandangan Masyarakat Pulau Sapudi Tentang Pendidikan Umum dan Agama, (2) Bagaimana Pandangan orang tua terhadap Pondok Pesantren Sebagai Tempat Favorit Bagi Anak-anaknya. Adapun tujuannya adalah: (1) Menjelaskan Pandangan Masyarakat Pulau Sapudi Tentang Pendidikan Umum dan Agama, (2) Pandangan orang tua terhadap Pondok Pesantren Sebagai Tempat Favorit Bagi Anak-anaknya.

B. Metode

Metode yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan observasi secara langsung dilapangan, wawancara dengan responden dan dokumentasi. Metode kualitatif ini diterjemahkan untuk menelusuri permasalahan

pendidikan di Pulau Sepudi yang berkaitan dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama. Kemudian teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang dianggap mewakili dalam menjawab pertanyaan dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Wawancara dengan perwakilan pemilik lembaga pendidikan swasta/negeri, tokoh masyarakat, praktisi pendidikan dan perwakilan dinas pendidikan di tingkat Kecamatan. Kemudian sebagai peneliti secara langsung melakukan observasi ke lapangan untuk mengetahui situasinya. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. kejadian secara bersamaan tersebut sebagai sesuatu yang saling berkaitan dan merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum.

C. Hasil

Data Referensi Pendidikan Pulau Sapudi 2020

Hasil penelitian yang akan dinarasikan dalam tulisan ini bahwa peneliti menuangkan data sekolah yang ada di Pulau Sepudi mulai dari TK, SD, MI, SMP, MTS dan SMA yang menjadi tempat wajib berpendidikan anak-anak Pulau Sapudi. Data tersebut dapat dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data sekolah di Pulau Sepudi

No	Instansi	Kec. Gayam	Kec. Nunggunung
1	SD N	26	13
2	MI Swasta	8	4
3	SMP N	1	1
4	SMP SWASTA	2	2
5	SMA N	1	-
6	SMA SWASTA	1	2
JUMLAH		40	22

Sumber. Data Referensi Pendidikan (kemdikbud.go.id) Kec. Gayam dan Kec. Nunggunung

Data ini menjadi bagian terpenting untuk diketahui sebagai pendukung kepada pendidikan di Pulau Sepudi bahwa wajib belajar untuk anak-anak selama kurang lebih 12 tahun. Dari data yang dimaksud bahwa pendidikan di Pulau Sapudi masih relatif sederhana antara Swasta maupun Negeri. Kemudian desain pembelajarannya antara swasta dan negeri sangat berbeda. Namun yang lebih menarik pada tingkat SD dan MI di masyarakat Pulau Sapudi memiliki keunikan yang dianggap sebagai pendidikan yang berbeda. Kalau SD dianggap sebagai pengetahuan umum yang dilaksanakan di pagi hari sampai siang sedangkan MI dilaksanakan pada siang hari sampai sore. Kemudian pada tingkatan menengah dan menengah ke atas relatif sama dalam melaksanakan pendidikan dilaksanakan pagi hari sampai siang hari.

Dalam pelaksanaan pendidikan antara SD dan MI dilakukan bersamaan dengan hari yang sama oleh masyarakat Pulau Sapudi. Masyarakat pulau Sapudi yang kental dengan keagamaan anaknya sejak dini sudah disekolahkan 2 sekolah. Pagi hari anak-anaknya di sekolahkan di SD sedangkan siang hari disekolahkan di MI. kemudian tidak menutup kemungkinan pada sore hari anak-anaknya diantar ke langgar untuk belajar membaca Al-Qur'an dan begitu seterusnya ketika masih berumur di tingkat sekolah dasar.

Berkaitan dengan hal itu bahwa dapat dikuatkan oleh responden merupakan praktisi pendidikan sekaligus ketua kurikulum di salah satu sekolah menengah:

“Kebanyakan masyarakat Pulau Sapudi menganggap bahwa SD dan MI adalah pendidikan yang berbeda dalam membekali pengetahuan kepada anak-anaknya. Kalau sekolah MI sebagai upaya membentuk karakter keagamaan anak, sedangkan SD sebagai upaya memberikan pemahaman duniaan”.

Hal ini juga dikuatkan oleh salah satu dinas ditingkatkan kecamatan Pulau Sapudi dengan menuturkan bahwa:

“Anak-anak Pulau Sapudi secara umum dibekali dengan pendidikan keagamaan secara maksimal walaupun pendidikan umum juga

menjadi bekal dunia namun yang lebih sangat penting dalam persepsi masyarakat Pulau Sapudi bahwa keagamaan itu lebih penting sebagai cara pembentukan karakter religiusitasnya dan sebagai bekal akhirat, tegasnya”.

Maka dari dua pendapat responden tersebut bahwa pendidikan Pulau Sapudi masih terjadi dualisme alias dikotomi pendidikan yaitu pemisahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Karena secara kultur masyarakat Pulau Sapudi kental dengan keagamaannya walaupun pemahaman keagamaannya tidak secara kaffah tetapi pandangan masyarakat Pulau Sapudi menanamkan keagamaan lebih diutamakan ketimbang pada pengetahuan umum. Karena itu menjadi doktrin khusus masyarakat kepada anak-anaknya pendidikan keagamaan sangat dibutuhkan dalam membentuk karakter religiusitas anak-anak mereka.

Permasalahan Dikotomi Pendidikan Pulau Sapudi

1. Pandangan Masyarakat Pulau Sapudi Tentang Pendidikan Umum dan Agama

Ditinjau dari pandangan atau perspektif masyarakat Pulau Sapudi terkait dengan pentingnya pendidikan umum dan pendidikan agama. Secara umum sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pulau Sapudi bahwa masyarakat secara kultur keagamaan yang sangat kental sehingga persepsi penanaman keagamaan terhadap anak-anaknya menjadi doktrin utama sebagai upaya pembentukan karakter religiusitasnya. Sesuai dengan pendapat tokoh masyarakat sebagai responden yang dianggap sebagai sesepuh di lingkungan masyarakat Pulau Sapudi memberikan penjelasan bahwa:

“Masyarakat Pulau Sapudi kebanyakan mendidik anak-anak di pondok pesantren ketika lulus dari tingkat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, karena beranggapan bahwa pondok pesantren itu menjadi tempat yang baik untuk masa depan anak-anaknya, sehingga pendidikan umum sekolah negeri maupun swasta tidak 100% diminati oleh masyarakat Pulau Sapudi, jelasnya”

Maka dari itu, penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa masyarakat Pulau Sapudi mendoktrin anak-anaknya yang kebanyakan lebih memprioritaskan pemahaman keagamaan ketimbang pendalaman pengetahuan umum. Sehingga sesuai dengan yang peneliti temukan saat melakukan observasi dengan semboyan bahwa *“lebih baik pinter baca al-Qur’an itu lebih mulia ketimbang pintar pengetahuan yang sifatnya duniawi”*. Kemudian yang lebih empiris lagi bahwa lembaga privat di Pulau Sepudi tidak ada alias tidak diperlukan bagi masyarakat, walaupun seharusnya lembaga privat itu sebagai tempat tambahan setelah sekolah seperti misalnya (bahasa inggris, matematika, fisika, kimia, biologi dan lain-lain).

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Sapudi memprioritaskan pendidikan kepada anak-anaknya yaitu tentang keagamaan itu lebih meyakinkan menurutnya ketimbang pemahaman tentang pendidikan umum. Kemudian masyarakat Pulau Sapudi kalau dilihat dari segi ekonomi atau finansial cukup mampu dan rata-rata menengah ke atas, karena usahanya seperti bertani, nelayan dan lain-lain sehingga soal finansial untuk menyekolahkan anak-anaknya tidak kekurangan, namun itu tadi persepsi terhadap pendidikan masih terdoktrin kultur lama lebih mementingkan pendidikan agama walaupun ke pondok pesantren semahal apapun dari segi finansial tetap diupayakan. Sesuai pendapat responden yang bekerja di lembaga pendidikan menjelaskan bahwa:

“Orang sapudi kalau soal pendidikan dalam menyekolahkan anak-anaknya dilihat dari segi ekonomi rata-rata mampu sehingga berapapun biayanya tetap diupayakan tanpa terkecuali, karena yang menjadi masalah dalam masyarakat pulau sapudi tidak dipikirkan memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum secara utuh kepada anak-anaknya, tegasnya”

Akhirnya dapat ditegaskan bahwa pendidikan di Pulau Sepudi masih terjadi dikotomi dan hal ini menjadi PR bersama untuk terus

disinergikan oleh pemerintah daerah untuk mendesain kurikulum yang memadukan antara dua pemahaman tersebut. Karena perpaduan pendidikan agama dan umum harus menjadi tren utama kedepan untuk masyarakat Pulau Sapudi sehingga dapat membentuk dan terlahir anak bangsa yang berkarakter religius dan cerdas dalam ilmu pengetahuan.

2. Pondok Pesantren Menjadi Favorit Bagi Orang Tua Masyarakat Pulau Sapudi

Seiring dengan perkembangan zaman bahwa kultur masyarakat Pulau Sapudi masih relatif sama tidak ada perubahan soal pandangan terhadap pondok pesantren itu lebih utama ketimbang pendidikan lainnya. Kemudian doktrin orang tua ketika anak masuk sekolah umum menganggap tidak akan membenahi akhlak anak-anaknya. Orang tua bertujuan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya yang paling penting adalah pintar membaca Al-Qur'an, lebih-lebih masuk ke pondok pesantren.

Sesuai dengan observasi dilapangan bahwa pola asuh orang tua terhadap pendidikan itu lebih dominan terhadap yang berkaitan dengan keagamaan yang diselenggarakan di pondok pesantren daripada di lingkungan pendidikan umum barang tentu persepsinya tidak mengcover kepribadian anak-anaknya. Hal itu dapat diterjemahkan langsung oleh respon yang berinisial N sebagai tokoh masyarakat sekaligus orang yang memiliki anak asuh yaitu sebagai berikut:

“Pondok pesantren bagi masyarakat Pulau Sapudi menjadi pendidikan yang favorit bagi putra dan putrinya. Karena lingkungan pondok sangat disiplin dan harus mematuhi aturan-aturan sehingga sangat dijamin pembentukan karakter anak akan terbentuk. Hal lain lain pondok pesantren menjadi lingkungan yang nyaman untuk mengkaji tentang berbagai keagamaan, ujarinya”

Demikian ini menjadi penjelasan serius bahwa pondok pesantren bagi masyarakat Pulau Sapudi menjadi prioritas utama. Namun disisi

yang lain hasil observasi peneliti bahwa hal itu terkesan dikotomi pendidikan. Maka dari itu, dilihat dari responden yang berinisial I yang menjadi salah satu ketua kurikulum di lembaga pendidikan dengan tegas menyampaikan bahwa:

“Pendidikan di Pulau Sepudi seharusnya ini tidak tidak dikotakkan, karena menurut saya pribadi pemahaman tentang agama dan pengetahuan umum seperti mata uang yang saling berkaitan. Ketika itu disinergikan akan akan menghasil anak didik yang berkarakter agamis dan lincah dalam bekal duniawinya. Kalau pondok seharusnya menyeimbangkan antara materi umum dan agama, sedangkan yang di sekolah umum harus menambahkan materi agamanya walaupun di luar kurikulum, tegasnya”

Oleh karena itu, pendapat dari responden ini menjadi sangat rasional yang seharusnya memang harus disinergikan antara pemahaman keagamaan dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak di Pulau Sepudi sehingga menjadi nilai yang utuh dan dapat memberikan keseimbangan yang ideal. Lembaga pendidikan di lingkungan sekolah umum didesain untuk menambahkan pemahaman keagamaan, kemudian pondok pesantren harus ditambahkan materi umumnya.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini bahwa pendidikan di Pulau Sepudi masih terjadi dikotomi dan hal ini menjadi pemikiran bersama untuk terus disinergikan oleh pemerintah daerah untuk mendesain kurikulum yang memadukan antara dua pemahaman tersebut. Karena perpaduan pendidikan agama dan umum harus menjadi tren utama kedepan untuk masyarakat Pulau Sapudi sehingga dapat membentuk dan terlahir anak bangsa yang berkarakter religius dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Kemudian pandangan maupun sikap pribadi, kelompok masyarakat Pulau Sapudi terhadap pemahaman keduanya tidak hanya bersifat wacana tetapi implementatif yang harus dibuktikan di lembaga pendidikan (Syamsuddin, Muh, 2007.)

Kehidupan masyarakat pulau Sapudi yang majemuk diperlukan penghormatan atas berkembangnya kultur masyarakat dengan segala bentuknya. Hal ini menurut Djakfar, Muhammad. (2012) dikarenakan kultur masyarakat Pulau Sapudi menjadi salah satu faktor perekat sosial demi tegaknya kehidupan yang harmonis bagi suatu masyarakat dalam membangun kehidupan yang produktif di era modernisasi saat ini. Kemudian kultur masyarakat Pulau Sapudi dengan khasnya sebagai hasil karsa dan karya masyarakat yang merupakan eksistensi masyarakat Pulau Sapudi yang harus dilestarikan keberadaannya, karena dengan tanpa kesenjangan dalam pemahaman keagamaan akan tercipta kedamaian yang berdampak pada kerukunan yang berkemajuan (Mustaqim, Muhamad, 2015).

Masyarakat Pulau Sapudi yang kental dengan karakter keagamaannya yang masih terjadi dikotomi pemahaman yang perlu diluruskan. Maka yang harus ditekankan dalam pembahasan ini bahwa dengan secara daya dan upaya bagaimana menyatukan antara pemahaman pendidikan keagamaan dan pengetahuan umum yang orientasinya mencerdaskan kehidupan bangsa (Wahid, Abdul, 2014). Kemudian pengintegrasian antara pendidikan umum dan agama khususnya pesantren sangat menjadi pemikiran utama dalam mensinergikan pemahaman kepada anak-anak. Sehingga hal ini menjadi problem solving bagi praktisi pendidikan dan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang utuh (Faraby, Muhammad, Ersya, 2016).

Pulau Sapudi yang memiliki lebih kurang 27 mil laut di sebelah timur pulau Madura dengan luas: 126.686.257 Ha. Masyarakatnya yang membawa karakter biologis dan psikologis alamiah sekaligus warisan dari latar belakang historis kelompok etniknya, yaitu pengalaman kultural dan warisan leluhurnya. Dengan demikian perilaku, sikap dan nilai-nilai kemanusiannya sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat yang kental dengan etika keagamaan (Bisyri, M. Hasan, 2019). Terjadinya dikotomi pendidikan juga tidak

lepas dipengaruhi oleh kedangkalan pemahaman keagamaan sehingga timbul fanatisme yang terkesan pendidikan keagamaan lebih penting daripada pendidikan umum (Taufik, 2010).

Pada masa sekarang ini, pendekatan pendidikan agama dan pendidikan umum berlangsung melalui proses operasional menuju pada tujuan yang diinginkan, memerlukan model yang melandasinya, sebagaimana yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad saw yang dapat menyatukan pemahaman agama dan umum. Kemudian nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan yang berdasarkan kebutuhan perkembangan masyarakat Pulau Sapudi dipadukan dengan pengaruh lingkungan kultural yang ada setempat, sehingga dapat mencapai cita-cita luhur dan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup anak bangsa di segala aspek kehidupannya (Kutsiyah, Farahdilla, et al., 2017).

Kondisi pendidikan agama saat ini, mendapat sorotan tajam yang kurang menggembirakan dan dinilai menyandang “keterbelakangan” yang semuanya bermuara pada kelemahan yang dialaminya. Kelemahan pendidikan agama dilihat justru terjadi pada sektor utama, yaitu pada konsep, sistem, dan kurikulumnya, yang dianggap mulai kurang relevan dengan kemajuan peradaban umat manusia dewasa ini. Sehingga dianggap tidak mampu menyertakan disiplin-disiplin ilmu lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era revolusi industri 4.0 (Dafrizal, Jamri, 2017). Hal ini mempunyai pengertian bahwa pendidikan agama belum mampu menjawab arus perkembangan zaman yang sangat deras, seperti timbulnya aspirasi dan idealitas yang serba multi interest dan berdimensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang sangat beragam, serta perkembangan teknologi yang sangat pesat (Mustaqim, Muhamad, 2015).

Melihat kenyataan ini, maka pendidikan agama perlu mendapat perhatian yang serius dalam menuntut pemberdayaan yang harus disumbangkannya, dengan usaha menata kembali keadaannya,

terutama yang ada di Indonesia. Kemudian pendidikan agama dan pendidikan umum harus disinergikan atau dipadukan dengan pemahaman yang utuh sehingga menjadi problem solving bagi kehidupan anak bangsa kedepannya (Mustaqim, Muhamad, 2015). Keharusan ini, tentu dengan melihat keterkaitan dan peranannya dalam usaha pendidikan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim perlu ada terobosan seperti perubahan model dan strategi pelaksanaannya dalam menghadapi perubahan zaman tanpa adanya dikotomi pendidikan yang terjadi (Taufik, 2010).

Dari itu semua yang perlu dipikirkan dalam dunia pendidikan bagi semua pihak yaitu adanya usaha penataan kembali atau rekonstruksi pendidikan untuk menyeimbangkan pendidikan agama dan pendidikan umum di Indonesia pada umumnya dan di Pulau Sapudi pada khususnya. Maka dari itu, menurut Wahab, Abdul (2013) menyatakan bahwa diperoleh keuntungan yang majemuk yaitu seperti berikut: 1) Pendidikan agama dan pendidikan umum sebagai sub-sistem pendidikan nasional di Indonesia, yang akan dapat memperoleh dukungan dan pengalaman yang positif. 2) Pendidikan agama dan pendidikan umum dapat memberikan sumbangan dan alternatif bagi pembenahan sistem pendidikan di Indonesia dengan ragam kekurangan, masalah, dan kelemahannya. Dan 3) Sistem pendidikan agama dan pendidikan yang dapat dirumuskan akan memiliki akar yang lebih kokoh dalam realitas kehidupan kemasyarakatan.

E. Rekomendasi

Rekomendasi dari permasalahan terkait dengan dikotomi pandangan masyarakat Pulau Sapudi terhadap pendidikan umum dan agama pesantren yaitu:

1. Adanya perhatian dari pemerintah daerah dengan pendidikan negeri dan swasta dalam memikirkan mensinergikan pendidikan agama dan pendidikan sebagai upaya membentuk karakter anak

- bangsa yang tangguh dan berkualitas.
2. Menjalinkan komunikasi yang intens dalam bentuk diskusi interaktif untuk memadukan kedua pemahaman pendidikan agama dan pendidikan umum dari pihak pengasuh pondok pesantren dan lembaga pendidikan umum baik swasta maupun negeri.
 3. Perlu adanya controlling dalam pemerataan pendidikan Pulau Sapudi agar dapat menghasilkan anak bangsa yang berkualitas, inovatif, berdaya saing dan berpikir kritis.

F. Simpulan

Perpaduan pendidikan agama dan pendidikan umum harus menjadi tren utama kedepan untuk masyarakat Pulau Sapudi sehingga dapat membentuk dan terlahir anak bangsa yang berkarakter religius dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Kemudian, sinergi antara pemahaman keagamaan dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak di Pulau Sepudi sehingga menjadi nilai yang utuh dan dapat memberikan keseimbangan yang ideal. Lembaga pendidikan di lingkungan sekolah umum didesain untuk menambahkan pemahaman keagamaan, kemudian pondok pesantren harus ditambahkan materi umumnya, sehingga dapat diterjemahkan ke dalam pemahaman yang utuh dalam mengintegrasikan antara kedua pemahaman tersebut yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan agama dan pendidikan umum sebagai sub-sistem pendidikan nasional di Indonesia, yang akan dapat memperoleh dukungan dan pengalaman yang positif.
2. Pendidikan agama dan pendidikan umum dapat memberikan sumbangan dan alternatif bagi pembenahan sistem pendidikan di Indonesia dengan ragam kekurangan, masalah, dan kelemahannya.
3. Sistem pendidikan agama dan pendidikan yang dapat dirumuskan akan memiliki akar yang lebih kokoh dalam realitas kehidupan kemasyarakatan.

Referensi

- Bisyri, M. Hasan. (2019). Mengakhiri Dikotomi Ilmu Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Forum Tarbiyah*, 7(2).
- Dafrizal, Jamri. (2017). Mempersiapkan Mahasiswa Calon Guru Generasi Digital Native Dengan Teknologi. *Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman*, 4(2) 151-180
- Djakfar, Muhammad. (2012). Tradisi Toron Etnis Madura: Memahami Pertautan Agama, Budaya, dan Etos Bisnis. *Jurnal Harakah*, 14(1).
- Faraby, Muhammad, Ersya. (2016). Etos Kerja Islam Masyarakat Etnis Madura (Islamic Work Ethic of Madura Ethnic Community) *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3(1), 21-38, DOI:10.15408/sjsbs.v3i1.309
- Kutsiyah, Farahdilla, et al. (2017). Skenario Pembibitan Sapi madura di Pulau Madura (Scenario of Madura Cattle Breeding in Madura Island). *Jurnal Ilmu Ternak*, 17(1).
- Mustaqim, Muhammad. (2015). Pengilmuan Islam dan Problem Dikotomi Pendidikan. *Jurnal Penelitian*, 9(2).
- Syamsuddin, Muh.(2007). Agama, Migrasi Dan Orang Madura. Aplikasi, *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 8(2), 150-182.
- Taufik. (2010). Peta Pemikiran Pendidikan Islam Di Indonesia: Telaah Dikotomi Pendidikan. *Jurnal Hunafa*, 7(2), 145-156
- Wahab, Abdul. (2013). Dualisme Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Lentera Pendidikan*, 16(2), 220-229
- Wahid, Abdul. (2014). Dikotomi Ilmu Pengetahuan (Science Dichotomy). *Jurnal STIQRA*, 1(2).

INDEKS

A

Aceh - 25
Afektif - 9
Agama - 28
Agresivitas - 25
Aksesibilitas pendidikan - 34
Al-Qur'an - 77
Angka Partisipasi Kasar - 1
Angka Partisipasi Murni - 3
APBD - 50
APBN - 50
ASN - 39

B

Bangkalan - 60
Banjir - 102
Biaya - 109
BOS - 48
Budi pekerti - 65

C

Covid-19 - 68

D

Daerah khusus - 9
Daerah terpencil - 9
Danau Tempe - 102
Daring - 60
Desa - 65

E

Education For All - 1
Etika - 134

F

Filter - 30
Fasilitas - 39, 41, 49

G

Gender - 1
Google - 88

H

Hamil di luar nikah - 28
Homoseksual - 25
Hukum - 32
hygiene sanitation - 79

I

Ijazah - 38
Internet - 30
IPA - 47
Islam - 77

J

Jawa Timur - 1

K

Kalimantan Barat - 9
Karakter - 26
Kenakalan remaja - 25
Kepala Sekolah - 51
KKM - 11
Kompetensi - 12, 13
Kondisi ekonomi - 6
Kurikulum - 9
Kyai - 78

L
Laboratorium komputer - 47
Laptop - 49
Lembaga pendidikan - 49
Luring - 62

M
Madura - 117
Malaysia - X
Merokok - 30
Microsoft - 89
Minum-minuman keras - 25

N
Narkoba - 25
Negara - 34, 44

O
Orang tua - 48, 54
Orde Baru - 114

P
Pandemi - 48
Pasuruan - 68
Pemahaman ilmiah - 6
Pendidikan untuk semua - 1
Perkembangan kognitif - 5
Pertumbuhan seks sekunder - 25
Pesantren - 46
Pidie - 24
PKK - 55
PowerPoint - 88
PPG - 51
Psikolog - 88, 125

Psikomotorik - 9
Pulau Sepudi - 117

R
Reformasi - 45
Remaja - 1, 25, 27, 28

S
Santri - 68
Sapeken - 34
Seks bebas - 25
Skenario - 88
SMA - 88
SMK - 40
SMP - 88
Social distancing - 79
Swasta - 88
Stres - 93
Sumenep - 117
Surakarta - 87

T
Tawuran - 25
Tindak kriminal - 25
Transportasi - 9
Tulungagung - 1

U
UPTD - 62
Ustadz/ustadzah - 75

W
Wajo - 102
WhatsApp group - 88

Y

Yayasan - 46

Z

Zona - 50, 104, 105, 106

Zoom - 88

GLOSARIUM

- Afektif:** segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu. Menurut beberapa ahli, afektif ini erat kaitannya dengan kognitif.
- Agresivitas:** suatu perilaku yang bertujuan untuk merusak objek dan melukai orang lain secara fisik dan psikis, baik melalui tindakan fisik atau verbal.
- Aksesibilitas pendidikan:** kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya memasuki suatu program pendidikan.
- Angka Partisipasi Kasar:** proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.
- Angka Partisipasi Murni:** proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.
- BK:** bimbingan dan konseling; proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan Konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.
- BOS:** Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petunjuk teknis (juknis) mengenai pengelolaan Dana BOS reguler diatur dalam Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022.

Budi pekerti: kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang. Dari segi etimologi kata, istilah budi pekerti adalah gabungan dari dua kata yaitu budi dan pekerti. Arti kata budi sendiri adalah sadar, nalar, pikiran atau watak. Sedangkan arti kata pekerti adalah perilaku, perbuatan, perangai, tabiat, watak. Yang jika disimpulkan bahwa budi pekerti merupakan sesuatu yang berkaitan sangat erat mengenai karakter manusia baik dalam sifat maupun perbuatan, yang dilakukan dengan kesadaran. Sedangkan pengertian budi pekerti menurut KBBI adalah tingkah laku, akhlak, perangai atau watak. Dalam bahasa Arab, istilah budi pekerti sendiri disebut dengan akhlak dan dalam bahasa Inggris disebut dengan ethic, yang artinya adalah etika.

Daring: online; ini merupakan akronim dalam jaringan yang mana terhubung melalui jaringan komputer, internet maupun terhubung dengan jaringan yang lainnya. Daring ini juga disamakan dengan keadaan dari sebuah komputer atau PC atau perangkat yang mana bisa saling bertukar informasi dan dihubungkan melalui internet

Education for All: suatu model pendidikan yang menekankan akan pentingnya pendidikan bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya maupun orang miskin, sehingga dalam penerapan pendidikan itu tidak ada diskriminasi.

Estetika: ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk, serta bagaimana dapat merasakannya. Sebuah keindahan yang sudah terbentuk tentunya harus dapat dirasakan oleh banyak orang. Kembali menilik pada KBBI, estetika ini juga membahas bagaimana tanggapan manusia terhadap estetika tersebut.

Etika: ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya.

Gaya hidup: (Bahasa Inggris: *lifestyle*) adalah bagian dari

kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Istilah gaya hidup pada awalnya dibuat oleh psikolog Austria, Alfred Adler dan Ferdinand the Bull, pada tahun 1929. Pengertiannya yang lebih luas, sebagaimana dipahami pada hari ini, mulai digunakan sejak 1961. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-lain. Gaya hidup bisa dinilai relatif tergantung penilaian dari orang lain. Gaya hidup juga bisa dijadikan contoh dan juga bisa dijadikan hal tabu. Contoh gaya hidup baik: makan dan istirahat secara teratur, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, dan lain-lain. Contoh gaya hidup tidak baik: berbicara tidak sepatutnya, makan sembarangan, dan lain-lain.

Gender: berasal dari bahasa Latin, yaitu “genus”, berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya tergantung kepada waktu (tren) dan tempatnya. Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan.

HOTS: Higher-Order Thinking Skill; kemampuan berpikir tingkat yang kompleks untuk menguraikan, menyimpulkan, menganalisis, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi lainnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak memiliki algoritma, tidak dapat diprediksi, serta hanya dapat diselesaikan menggunakan pendekatan berbeda dari berbagai permasalahan dan contoh yang telah ada.

Homoseksual: rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama.

Hygiene sanitation: suatu tindakan atau upaya untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan melalui pemeliharaan diri setiap individu dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya, agar individu terhindar dari ancaman kuman penyebab penyakit

Karakter: sekumpulan sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda kebaikan, keutamaan dan kedewasaan moral seseorang.

Secara etimologis, istilah karakter berasal dari bahasa latin *character*, yang berarti watak, tabiat, sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak.

KDRT: Kekerasan dalam Rumah Tangga; a setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Kenakalan remaja: *juvenile delinquency*; gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

KKM: Kriteria Ketuntasan Minimal; Kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran dimulai, melalui musyawarah dewan guru pada satu sekolah.

Kompetensi: kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi yang diharapkan.

Luring: luar jaringan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* menjelaskan pengertian luring adalah terputus dari jejaring komputer.

Pandemi: sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.

Perkembangan kognitif: perkembangan dari kognisi yang mempengaruhi aliran kognitif yang juga disebut sebagai perilaku dan tingkah laku dari seorang anak dengan didasarkan pada kognisi. Merupakan tindakan dalam mengenal dan memikirkan sesuatu di mana perilaku atau tingkah laku ini terjadi.

Pesantren: sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan

mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Prestasi akademik: istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu pencapaian yang diperoleh dari hasil belajar seseorang dalam jangka waktu tertentu berupa pemahaman, penerapan, daya analisis, dan evaluasi yang dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertentu melalui penilaian yang dilakukan secara langsung oleh guru atau menggunakan tes yang dibakukan

Rehabilitasi: mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula, yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.

Remaja: waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa.

Social distancing: Gerakan sosial dimana seseorang dianjurkan menjaga jarak dengan orang lain, mengurangi interaksi sosial, menghindari tempat yang ada banyak orang seperti mall atau tempat makan

Stres: reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional (mental/ psikis) apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita.